

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2024



Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Januari 2025
Kepala BPSPL Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **13 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu **107,50%** (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2024 yaitu:

1. Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai **Rp2.421.607** dari target **Rp2.000.000** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai **320 orang** dari target **320 orang** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **3 Dokumen** dari target **3 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **16,31%** dari target **14%** sehingga persentase capaian sebesar **116,5%**.
5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai **1 Daerah** dari target **1 Daerah** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
6. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai **1 Kesepakatan** dari target **1 Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
7. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai **1 Kesepakatan** dari target **1 Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai **2 Kelompok** dari target **2 Kelompok** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Orang) tercapai **70 Orang** dari target **60 Orang** sehingga persentase capaian sebesar **116,67%**.

10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai **8 Jenis** dari target **7 Jenis** sehingga persentase capaian sebesar **114,29%**.
11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai **8 Jenis** dari target **4 Jenis** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **1 Dokumen** dari target **1 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan) tercapai **4 Kawasan** dari target **4 Kawasan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **94,98** dari target **93,76** sehingga persentase capaian sebesar **101,30%**.
15. Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **98,11** dari target **71** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **90,81** dari target **75** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai **93,65** dari target **88** sehingga persentase capaian sebesar **106,42%**.
18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **85,55** dari target **81** sehingga persentase capaian sebesar **105,62%**.
19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **4 Dokumen** dari target **4 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) tercapai **133,33%** dari target **94%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) tercapai **100%** dari target **80%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **100%** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **80%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **81,36** dari target **65** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 032.07.2.477425/2024 dengan Pagu Revisi anggaran sebesar **Rp19.008.625.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/> . Pada Tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **Rp18.739.996.019** atau **98,59%** dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target telah terapai. Namun capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan pembahasan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 berdasarkan rekomendasi laporan kinerja triwulan sebelumnya yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang).

Daftar Isi

Tim Penyusun	I
Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	VI
Daftar Gambar	VIII
Daftar Tabel	XII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.1.1. Kedudukan	1
1.1.2. Tugas	1
1.1.3. Fungsi	2
1.2. Susunan Organisasi	3
1.3. Keragaman SDM	5
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	5
1.4.1. Potensi	5
1.4.2. Permasalahan	6
1.5. Dasar Hukum	7
1.6. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	9
2.1.1. Visi	10
2.1.2. Misi	10
2.1.3. Tujuan	11
2.1.4. Sasaran Strategis	11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024	12
2.3. Metode Pengukuran Kinerja	17
2.3.1. Rumusan Pengukuran	17
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNPB BPSPL Pontianak	21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	26

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	39
3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	47
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	58
3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	63
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak	71
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak	80
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak	92
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	108
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan P3K yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak	112
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak.....	125
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	173
3. 3. Realisasi Anggaran	179
BAB IV PENUTUP	183
4.1. Kesimpulan	183
4.2. Rekomendasi	183
4.3. Tindak Lanjut	183
DAFTAR LAMPIRAN	186

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3
Gambar 1.1.2-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak	4
Gambar 1.1.3-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak	5
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak.....	20
Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun	22
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	19
Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	20
Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBPN dari Tahun 2022	22
Gambar 3.1.1-2. Tren Bulanan Penerimaan PNBPN tahun 2024	24
Gambar 3.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan	28
Gambar 3.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah	28
Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah	29
Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan	30
Gambar 3.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya	31
Gambar 3.1.2-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya	31
Gambar 3.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang	32
Gambar 3.1.2-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang.....	32
Gambar 3.1.2-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut	33
Gambar 3.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut.....	33
Gambar 3.1.2-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan	34
Gambar 3.1.2-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya.....	35
Gambar 3.1.2-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang	35
Gambar 3.1.2-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut.....	35
Gambar 3.1.2-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan.....	36
Gambar 3.1.2-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang.....	36
Gambar 3.1.2-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah	37
Gambar 3.1.2-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024	38
Gambar 3.1.2-19. Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL	38
Gambar 3.1.3-1. Tren Target dan Capaian IKU	40
Gambar 3.1.3-2. Verifikasi Permohonan KKPRL.....	41
Gambar 3.1.3-3. Sebaran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL	42
Gambar 3.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	42
Gambar 3.1.3-5. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura	43
Gambar 3.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Maestro Hotel	44
Gambar 3.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Samarinda	44
Gambar 3.1.3-8. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024	45
Gambar 3.1.3-9. Pengarusutamaan Gender pada Kegiatan Operasionalisasi KKPRL	46
Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA.....	47
Gambar 3.1.4-2. Tren Target dan Capaian IKU 4	49
Gambar 3.1.4-3. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu	50
Gambar 3.1.4-4. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan.....	51
Gambar 3.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi	51
Gambar 3.1.4-6. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting	52
Gambar 3.1.4-7. Hasil Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting	52
Gambar 3.1.4-8. Pengamatan Populasi Pesut.....	53
Gambar 3.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Pesut	53
Gambar 3.1.4-10. Survei Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu	54

Gambar 3.1.4-11. Survei Sosial Ekonomi.....	54
Gambar 3.1.4-12. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi	55
Gambar 3.1.4-13. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu	55
Gambar 3.1.4-14. Pelaksanaan <i>Conservation Goes to School</i>	56
Gambar 3.1.4-15. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 Tahun 2024	57
Gambar 3.1.5-1. Tren Capaian IKU 5	59
Gambar 3.1.5-2. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara	60
Gambar 3.1.5-3. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 pada tahun 2024	61
Gambar 3.1.6-1. Tren Capaian Kerja Sama selama 5 tahun terakhir	64
Gambar 3.1.6-2. Inisiasi dan Pembahasan Draft Kerja Sama	65
Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama	65
Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 Tahun 2024	66
Gambar 3.1.6-5. Capaian Kinerja Kerjasama/Kemitraan dalam 5 tahun terakhir	68
Gambar 3.1.6-6. Kegiatan Inisiasi dan Pembahasan Kemitraan	69
Gambar 3.1.6-7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan	69
Gambar 3.1.6-8. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Tahun 2024	70
Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK dalam 5 tahun	72
Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan	73
Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Tahun 2024	76
Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KK Mahakam Hulu	78
Gambar 3.1.7-5. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu ..	78
Gambar 3.1.7-6. Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu	79
Gambar 3.1.7-7. Pengarusutamaan Gender pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif	80
Gambar 3.1.8-1. Grafik Capaian IKU 10 dalam 5 tahun	82
Gambar 3.1.8-2. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat	83
Gambar 3.1.8-3. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat	83
Gambar 3.1.8-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat	84
Gambar 3.1.8-5. Penyediaan Data Populasi Terubuk	85
Gambar 3.1.8-6. Survei Penyediaan Data Potensi Pari Air Tawar	85
Gambar 3.1.8-7. Penyediaan Data Potensi Belida	86
Gambar 3.1.8-8. Pembuatan <i>Coral Stock Center</i> di Kalimantan Timur	87
Gambar 3.1.8-9. Monitoring <i>Coral Stock Center</i> di Kalimantan Timur	87
Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Penanganan Biota Dilindungi	88
Gambar 3.1.8-11. Grafik Penanganan Biota Dilindungi	88
Gambar 3.1.8-12. Bimbingan Teknis Penanganan Biota Dilindungi	88
Gambar 3.1.8-13. Sosialisasi Biota Dilindungi	89
Gambar 3.1.8-14. Workshop Penilaian E-PANJL	90
Gambar 3.1.8-15. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	91
Gambar 3.1.9-1. Grafik Capaian IKU 11 dalam 5 tahun	93
Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan Surat Rekomendasi	94
Gambar 3.1.9-3. Pemeriksaan Surat Rekomendasi	95
Gambar 3.1.9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Hiu dan Pari	95
Gambar 3.1.9-5. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Teripang	96
Gambar 3.1.9-6. Pemeriksaan SAJI	96
Gambar 3.1.9-7. Grafik Pengiriman SAJI DN Hiu dan Pari	97
Gambar 3.1.9-8. Grafik Pengiriman SAJI DN Barang Bawan	98
Gambar 3.1.9-9. Grafik Pengiriman SAJI DN Barang Bawan	98
Gambar 3.1.9-10. Penandaan Arwana	99
Gambar 3.1.9-11. Pemeriksaan keberangkatan	99

Gambar 3.1.9-12. Grafik Pendapatan PNPB	100
Gambar 3.1.9-13. Survei Pemanfaatan Arwana	101
Gambar 3.1.9-14. Persentase Legalitas Pemanfaatan Jenis Ikan Arwana	101
Gambar 3.1.9-15. Kurva Laju Pertumbuhan Arwana Super Red di Kalimantan Barat	102
Gambar 3.1.9-16. Survei Pemanfaatan Teripang	102
Gambar 3.1.9-17. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang	103
Gambar 3.1.9-18. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat	104
Gambar 3.1.9-19. Dokumentasi pengukuran	104
Gambar 3.1.9-20. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap	104
Gambar 3.1.9-21. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar	105
Gambar 3.1.9-22. Dokumentasi Pengukuran	105
Gambar 3.1.9-23. Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan	106
Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Perizinan Berusaha Jasa Kelautan	110
Gambar 3.1.10-2. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat	110
Gambar 3.1.10-3. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat	110
Gambar 3.1.10-4. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	111
Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan	114
Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah	114
Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah	115
Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan	115
Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya	116
Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya	117
Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang	118
Gambar 3.1.11-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang	118
Gambar 3.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut	119
Gambar 3.1.11-10. Dokumentasi penimbangan sampah di Tanah Laut	119
Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan	120
Gambar 3.1.11-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya	120
Gambar 3.1.11-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang	121
Gambar 3.1.11-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut	121
Gambar 3.1.11-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan	121
Gambar 3.1.11-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang	122
Gambar 3.1.11-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah ...	122
Gambar 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024	123
Gambar 3.1.11-19. Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL	124
Gambar 3.1.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan	126
Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN)	127
Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	133
Gambar 3.1.12-4. Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024	136
Gambar 3.1.12-5. Tren target dan capaian WBK BPSPL Pontianak	140
Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	142
Gambar 3.1.12-7. Tren Capaian IP ASN	144
Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	148
Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Komponen Nilai PM SAKIP Tahun 2023 dan 2024	151
Gambar 3.1.12-10. Kegiatan pleno Evaluasi AKIP	154
Gambar 3.1.12-11. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	155
Gambar 3.1.12-12. Nilai MP BPSPL Pontianak	159
Gambar 3.1.12-13. Tren Target dan Capaian Tahunan	159

Gambar 3.1.12-14. Tren Target dan Capaian IKU	162
Gambar 3.1.12-15. Tren Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah	167
Gambar 3.1.12-16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Pesut Lestari	168
Gambar 3.1.12-17. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Penyu Baro	168
Gambar 3.1.12-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Surya Perdana Mangrove	169
Gambar 3.1.12-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024	169
Gambar 3.1.12-1. Perbandingan Penerimaan PNBPN dengan Unit Kerja Lain	173
Gambar 3.1.12-2. Perbandingan Capaian Fasilitas KKPDP dengan Unit Kerja Lain	174
Gambar 3.1.12-3. Perbandingan Capaian Kerja Sama dengan Unit Kerja Lain	174
Gambar 3.1.12-4. Perbandingan Capaian Fasilitas MPA dengan Unit Kerja Lain	175
Gambar 3.1.12-5. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain	175
Gambar 3.1.12-6. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain	176
Gambar 3.1.12-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain	176
Gambar 3.1.12-8. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain	177
Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Capaian NKPA dengan Unit Kerja Lain	177
Gambar 3.1.12-10. Perbandingan Capaian IP ASN dengan Unit Kerja Lain	177
Gambar 3.1.12-11. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP dengan Unit Kerja Lain	178
Gambar 3.1.12-12. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan	178

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023	13
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023	14
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024	16
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak.....	22
Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNPB BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak.....	26
Tabel 3.1.2-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya	30
Tabel 3.1.2-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang	32
Tabel 3.1.2-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut	33
Tabel 3.1.2-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan	34
Tabel 3.1.2-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024.....	37
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak.....	39
Tabel 3.1.3-2. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Permohonan KKPRL	41
Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024.....	45
Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria	47
Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA	48
Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	48
Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak.....	48
Tabel 3.1.4-5. Realisasi Anggaran IKU 4 tahun 2024.....	56
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak.....	58
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2024.....	61
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak.....	63
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Tahun 2024	66
Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak.....	67
Tabel 3.1.6-4. Realisasi Anggaran IKU Kemitraan Konservasi	70
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak.....	71
Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Tahun 2024	75
Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Tahun 2024	79
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak	81
Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat	84
Tabel 3.1.8-3. Realisasi IKU 10 Tahun 2024	90
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak	92
Tabel 3.1.9-2. Jumlah BAP Panen Per Provinsi	99
Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Tahun 2024	106
Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNPB BPSPL Pontianak	108
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Tahun 2024	111
Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak	112
Tabel 3.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya	116
Tabel 3.1.11-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang	117
Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut	118
Tabel 3.1.11-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan	119
Tabel 3.1.11-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024	123
Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak.....	125
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Tahun 2024.....	133
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak	136
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak.....	139

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Tahun 2024.....	142
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak.....	144
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17	148
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP	149
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak.....	150
Tabel 3.1.12-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP	150
Tabel 3.1.12-11. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2024.....	154
Tabel 3.1.12-12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak.....	156
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Tahun 2024	157
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak.....	158
Tabel 3.1.12-15. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak.....	161
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak.....	164
Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah.....	165
Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak.....	166
Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 23 Tahun 2024.....	169
Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan.....	170
Tabel 3.1.12-21. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak.....	171
Tabel 3.1.12-22. Tabel nilai pengawasan kearsipan	171
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Tahun 2024.....	172
Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain..	177
Tabel 3.23.1.12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024.....	179
Tabel 3.1.122-3.1.12-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024	180
Tabel 3.1.12-1. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2024	183

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu meliputi:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan Kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

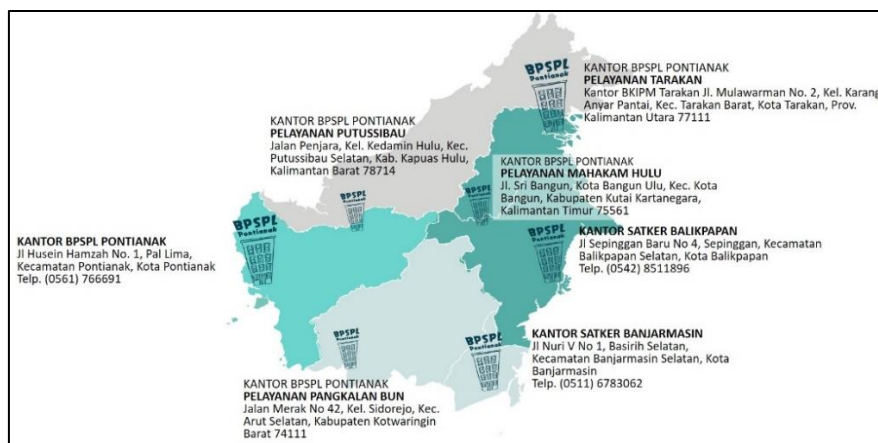
Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;

- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

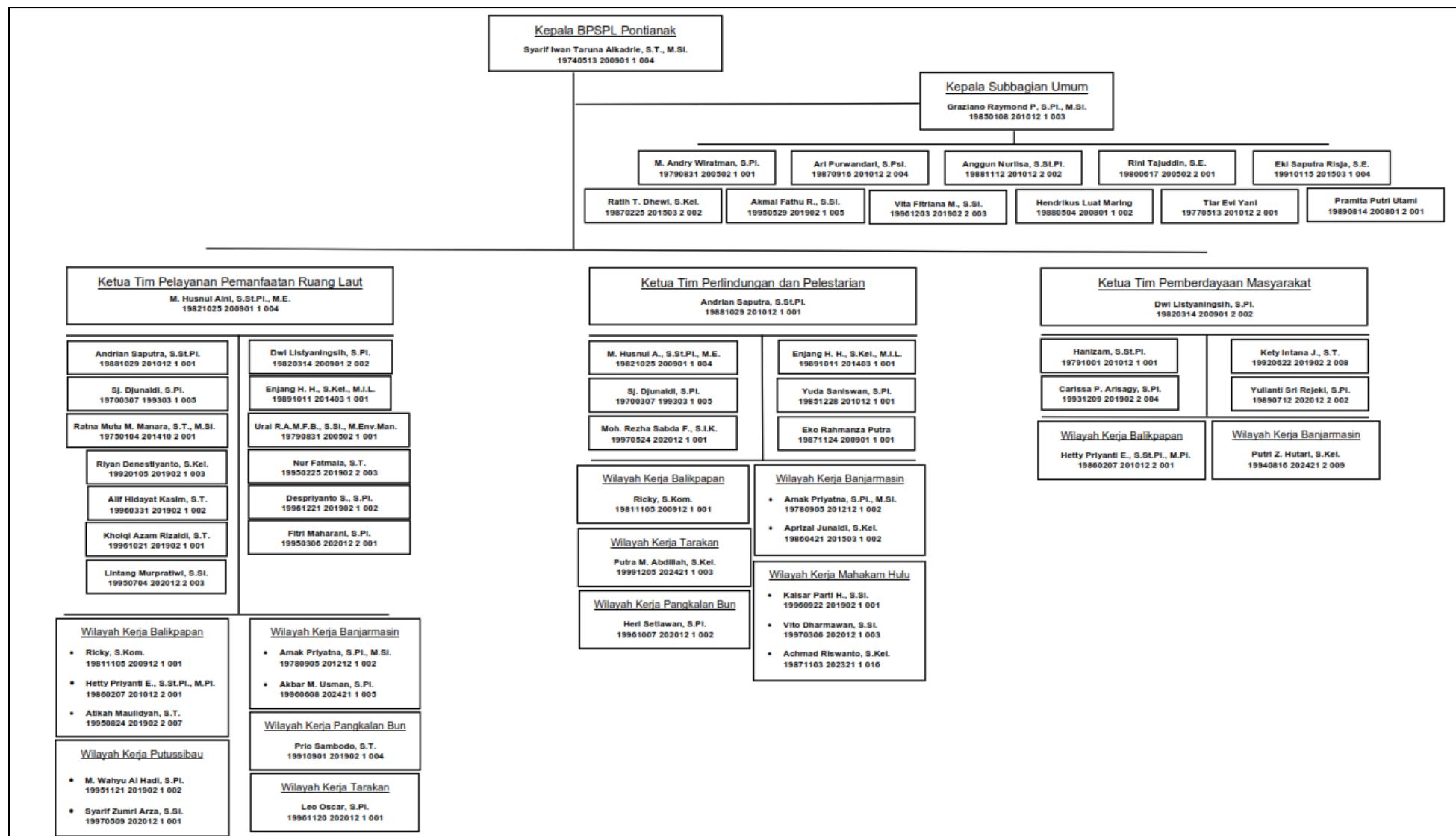


Gambar 1.1.32-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

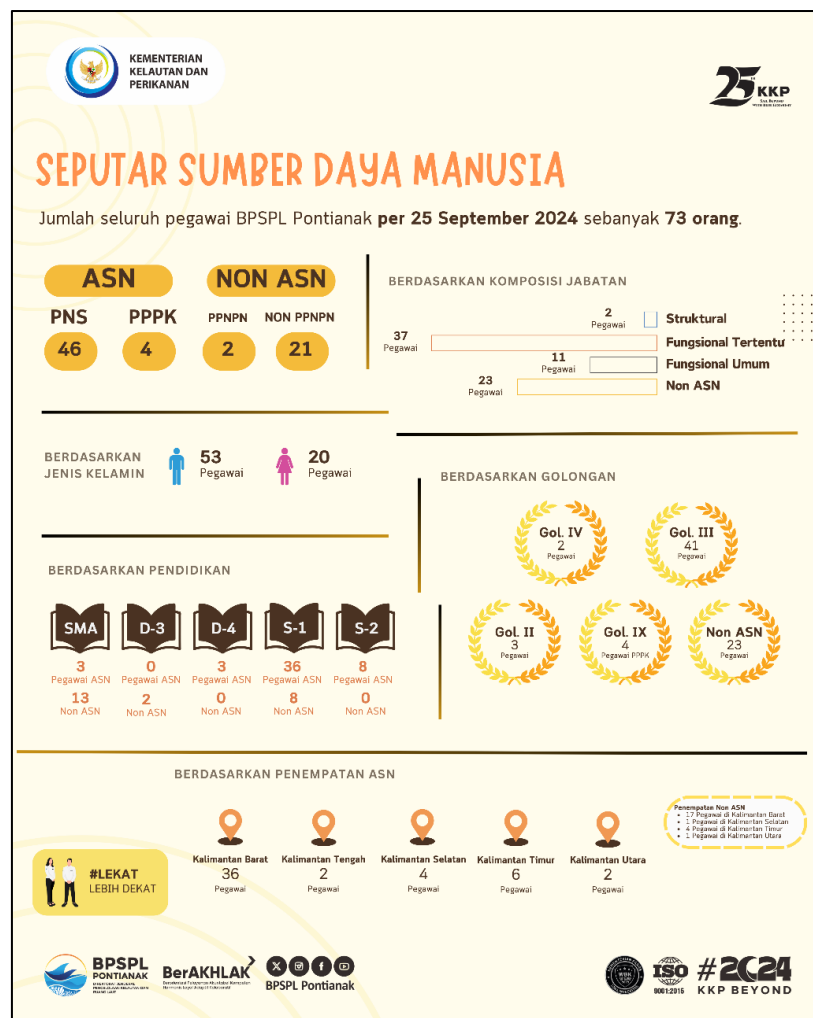
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.1.32-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2024 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 73 orang terdiri dari 50 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 21 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 21 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.



Gambar 1.1.3-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total

panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
- e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran
- ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020 - 2025 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budi daya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah **“Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**.

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang di dalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard* (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKM). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak
-	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Maret 2023 dan Maret 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2023
(IKU-1) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp.000)	(IKU-6) Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp)
(IKU-2) Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak terdapat IKU
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-1) Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)
(IKU-4) Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	(IKU-6) Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-5) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
(IKU-6) Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	(IKU-2) Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
(IKU-7) Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	
(IKU-8) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	(IKU-3) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
(IKU-9) Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	Tidak terdapat IKU
(IKU-10) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-4) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-11) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-12) Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-13) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak terdapat IKU

IKK	IKK
Tahun 2024	Tahun 2023
(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IK-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IK-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IK-11) Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IK-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	(IK-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IK-14) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IK-15) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IK-16) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-24) Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak terdapat IKU
Tidak terdapat IKU	(IKM-11) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)

Sumber data: BPSPL Pontianak, November 2023 dan Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penambahan IKU baru sebanyak empat indikator pada tahun 2024. Penambahan IKU-2 dan IKU-13 dikarenakan menindaklanjuti program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut. Sementara itu, penambahan IKU-24 dilakukan untuk mengakomodir penilaian kearsipan lingkup KKP yang dilaksanakan setiap tahun. Penambahan IKU-12 dikarenakan untuk mengakomodir anggaran Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diturunkan ke UPT.

Dalam perkembangan pengelolaan kinerja pada tahun 2024, terdapat arahan untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024. Kemudian menindaklanjuti pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 8 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi “Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)” dengan target menjadi 60 orang. Selain itu, terdapat juga perubahan pada IKM 15 menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak”. Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1.	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.000.000
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	320
3.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6.	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
		7.	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7.	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	60
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,76
		15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	71
		16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
		17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
		18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81
		19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
12.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
		24. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	65

Sumber data: BPSPL Pontianak - DJPKRL, Desember 2024

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Score Card (BSC).

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
 - b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level IV sampai ke level 0); dan
 - c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

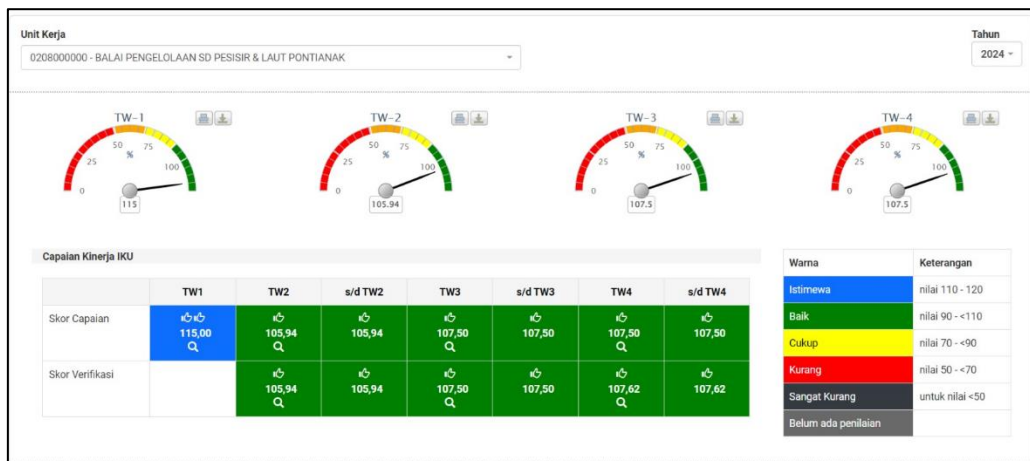
1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.



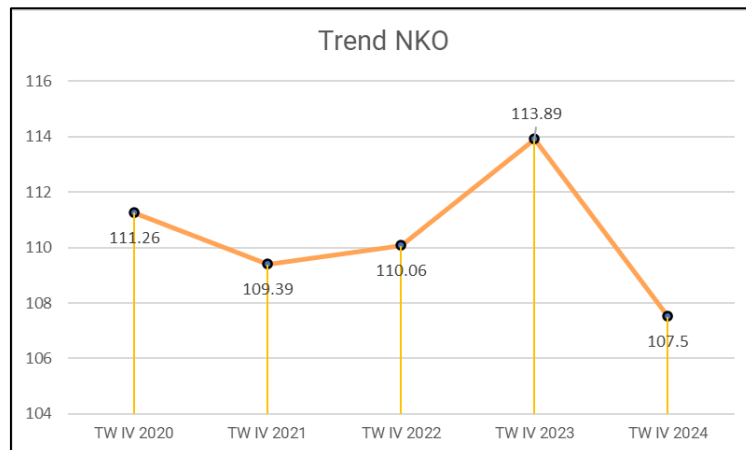
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 yaitu **107,50%** (masuk kategori Hijau = **Baik**). NKO tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan NKO pada Triwulan III, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan II dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan I. Secara umum, seluruh capaian IKU pada tahun 2024 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai PNPB BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai **Rp2.421.607** dari target **Rp2.000.000** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai **320 orang** dari target **320 orang** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **3 Dokumen** dari target **3 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **16,31%** dari target **14%** sehingga persentase capaian sebesar **116,5%**.

5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai **1 Daerah** dari target **1 Daerah** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
6. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai **1 Kesepakatan** dari target **1 Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
7. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai **1 Kesepakatan** dari target **1 Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai **2 Kelompok** dari target **2 Kelompok** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang) tercapai **70 Orang** dari target **60 Orang** sehingga persentase capaian sebesar **116,67%**.
10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai **8 Jenis** dari target **7 Jenis** sehingga persentase capaian sebesar **114,29%**.
11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai **8 Jenis** dari target **4 Jenis** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **1 Dokumen** dari target **1 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan) tercapai **4 Kawasan** dari target **4 Kawasan** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **94,98** dari target **93,76** sehingga persentase capaian sebesar **101,30%**.
15. Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **98,11** dari target **71** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **90,81** dari target **75** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai **93,65** dari target **88** sehingga persentase capaian sebesar **106,42%**.
18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **85,55** dari target **81** sehingga persentase capaian sebesar **105,62%**.
19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **4 Dokumen** dari target **4 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) tercapai **133,33** dari target **94** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) tercapai **80** dari target **100** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **100%** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.

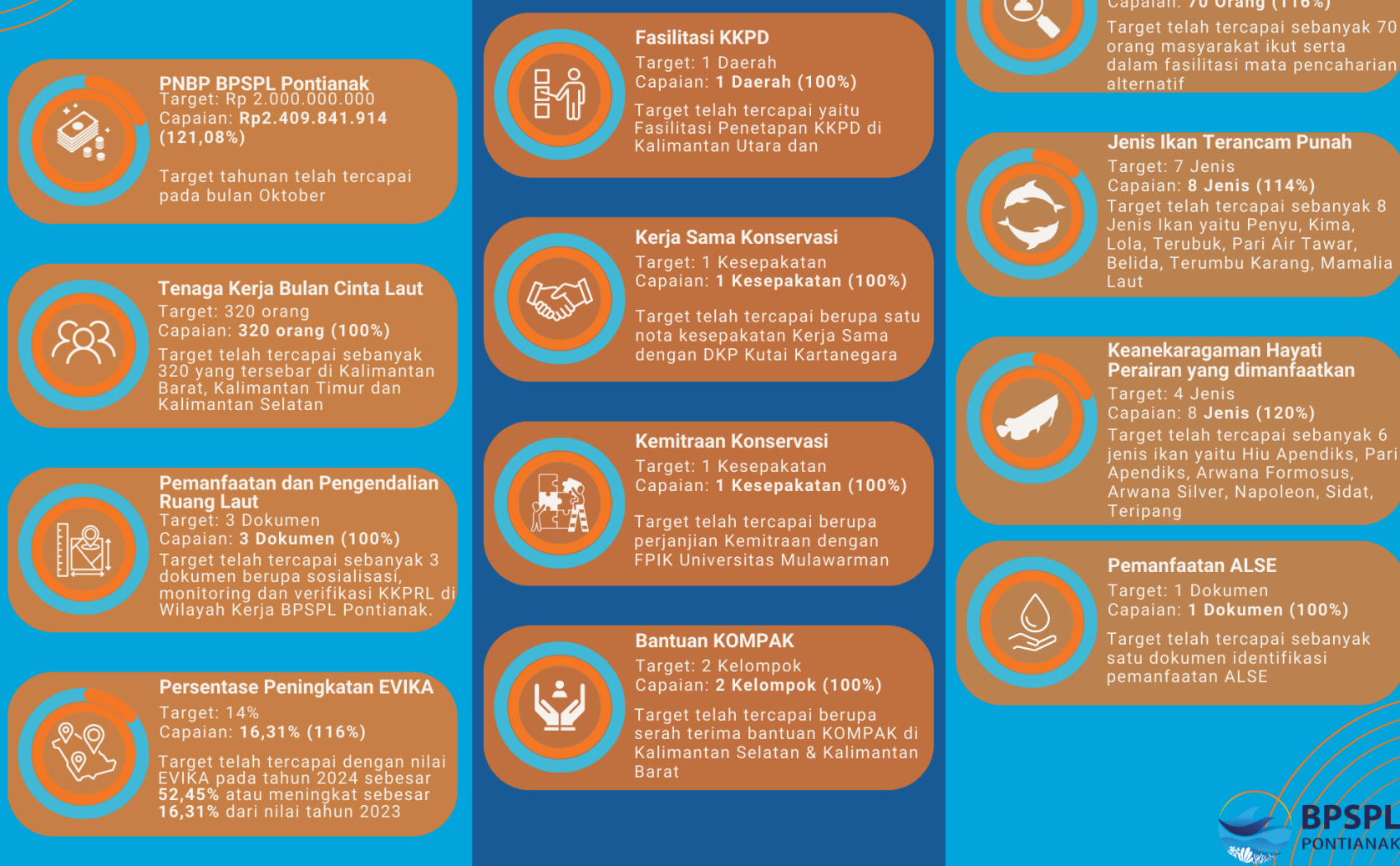
23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **80%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.
24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai **81,36** dari target **65** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.



Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun

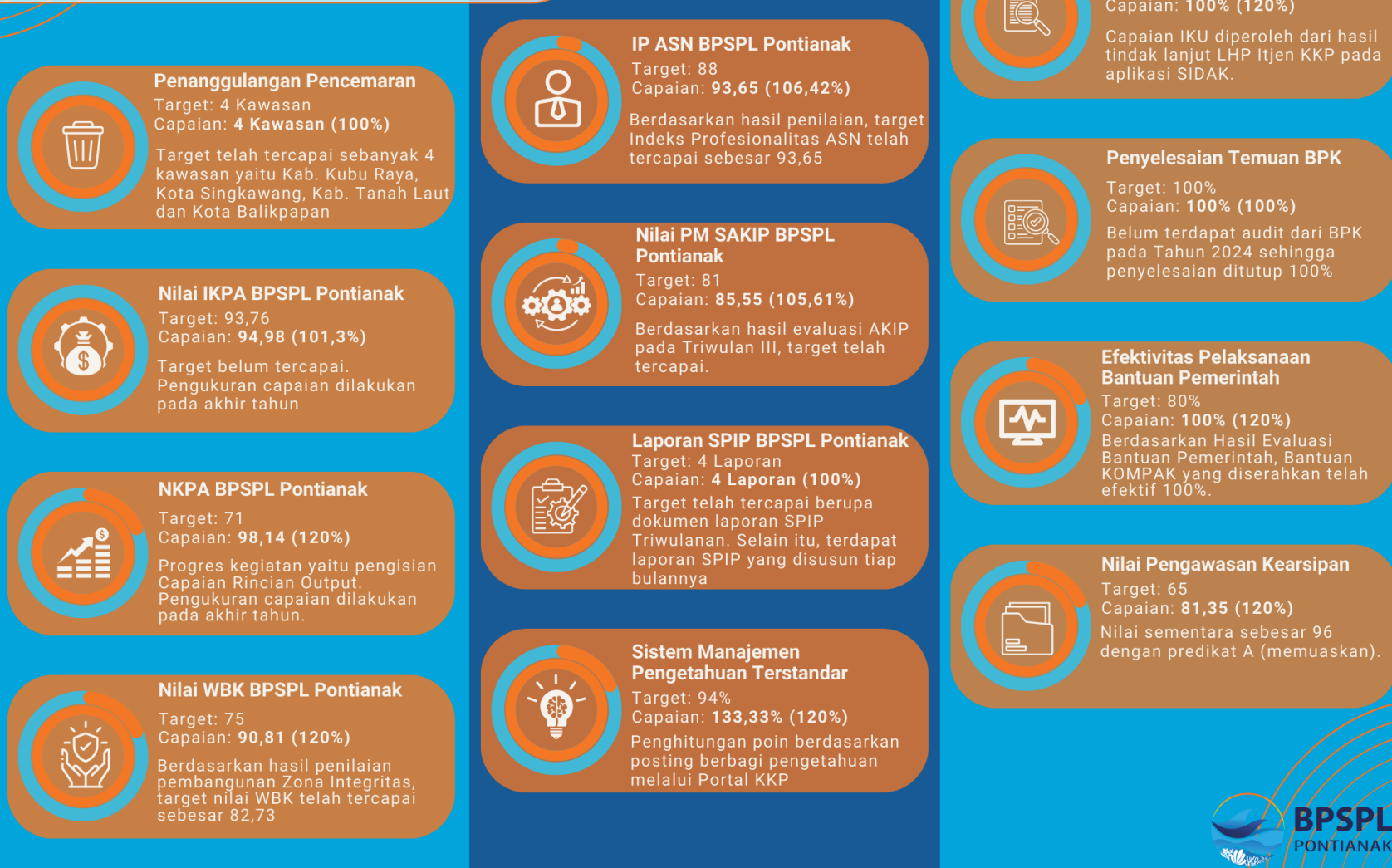
NKO IKU pada Tahun 2023 sebesar 113,89%. Terdapat penurunan 6,39% dari Tahun 2023. Jika dibandingkan Nilai Kinerja Organisasi selama lima tahun terakhir, NKO pada tahun 2024 merupakan nilai yang terendah. Penurunan nilai disebabkan karena bertambahnya jumlah Sasaran Kinerja membuat jumlah penyebut menjadi lebih besar sehingga dapat mengurangi nilai akhir jika nilai pembilang tidak terdapat peningkatan. Selain itu, terdapat beberapa Sasaran Kinerja yang memiliki nilai maksimum 100% seperti: Operasionalisasi KKPRL, Jumlah Kawasan BCL dan Identifikasi ALSE. Hal itu membuat nilai persen capaian untuk sasaran kinerja lain perlu ditingkatkan. Namun, terdapat sasaran kinerja yang mengalami penurunan capaian secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu pada Sasaran Kinerja Fasilitas KKP. Beberapa sasaran kinerja juga seharusnya dapat dimaksimalkan capaiannya yaitu Tenaga Kerja BCL, Fasilitas KKP, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan/Kerjasama.

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA BPSPL PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024



Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

$$PNBP_{BPSPL\ Pontianak} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

dimana,

$$PNBP_{Layanan} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Keterangan:

SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN¹⁾ + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan²⁾

Surat Rekomendasi = Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan

$PNBP_{Layanan}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

$PNBP_{BMN}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

$PNBP_{Lainnya}$ = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

¹⁾ untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

²⁾ dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Nilai PNBSP BPSPL Pontianak							
IKU-1	Nilai PNBSP BPSPL Pontianak (Rp000)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024 (Rp.000)	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
Rp2.374.620.820	Rp2.421.607.418	+Rp46.986.598	2.000.000	120	2 M	120	-	-

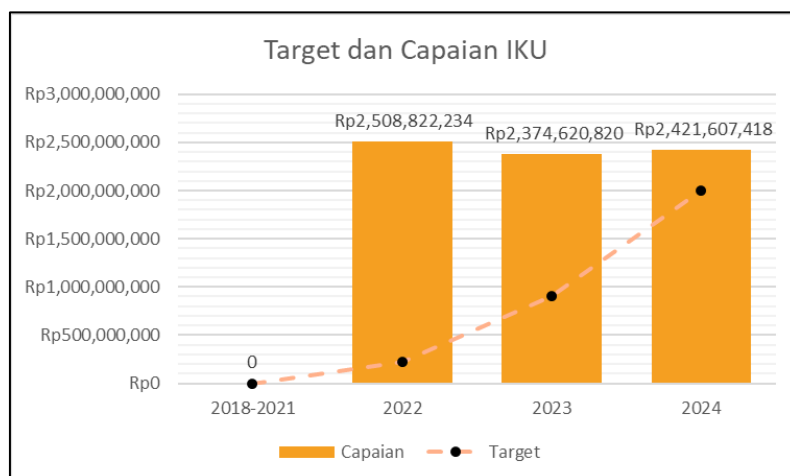
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Sekretaris Ditjen PKRL. Capaian nilai PNBSP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 (per tanggal buku 1 Januari – 31 Desember 2024) yaitu senilai Rp2.421.607.418 atau 121,08% dari target tahunan. Realisasi PNBSP tahun ini didapatkan dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.166.673; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 11.765.504; Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp1.187.220.241; dan Pendapatan Perizinan Lainnya sebesar Rp1.219.455.000.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi PNBSP BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar Rp2.374.620.820 dari target kinerja sebesar Rp900.000.000 (263%). Realisasi PNBSP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp2.421.607.418 atau terdapat peningkatan sebesar Rp46.986.598 (1,97%) jika dibandingkan dengan realisasi PNBSP tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan realisasi PNBSP tahun 2022 sebesar Rp2.508.822.234, terdapat penurunan pendapatan sebesar 3,67%. Peningkatan PNBSP pada tahun 2024 dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat penambahan penerimaan PNBSP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.



Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBSP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja tahun 2024 jika dapat dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan Tahun 2020 – 2024 telah mencapai target tahunan sebesar 121,08%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 121,08% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

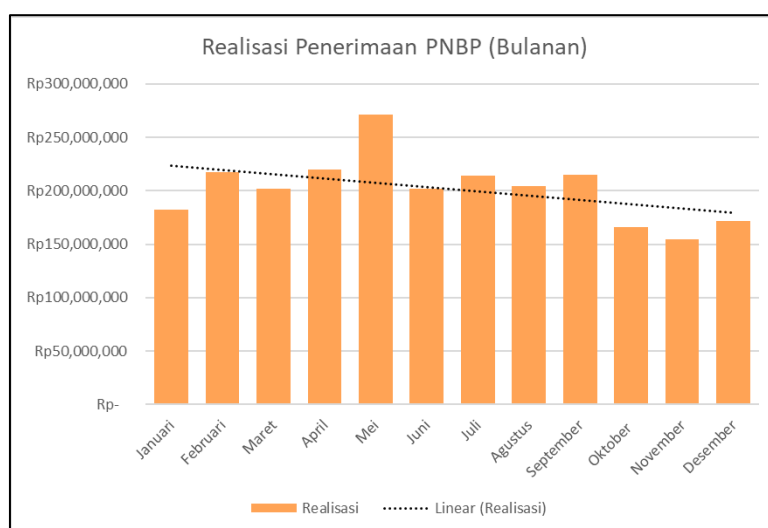
Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP pada tahun 2024.

Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Tahun 2024

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Perizinan Lainnya	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Januari	Rp166.667	Rp97.605.000	Rp84.835.416	
Februari	Rp166.667	Rp95.040.000	Rp122.154.895	
Maret	Rp166.667	Rp82.080.000	Rp120.028.700	Rp11.674.100
April	Rp166.667	Rp119.070.000	Rp100.940.315	
Mei	Rp166.667	Rp135.405.000	Rp135.707.140	
Juni	Rp500.001	Rp124.335.000	Rp77.165.975	
Juli	Rp166.667	Rp115.020.000	Rp98.691.815	
Agustus	Rp333.334	Rp108.135.000	Rp95.567.925	
September	Rp333.334	Rp114.345.000	Rp100.451.300	
Oktober	Rp333.334	Rp73.440.000	Rp92.482.350	

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Perizinan Lainnya	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
November	Rp333.334	Rp72.765.000	Rp81.306.780	Rp91.404
Desember	Rp333.334	Rp82.215.000	Rp89.561.730	
Jumlah	Rp3.166.673	Rp1.219.455.000	Rp1.198.894.341	Rp11.765.504
Total TW III	Rp2.421.607.418			

Berdasarkan pemantauan penerimaan PNBP bulanan, target PNBP tahun 2024 telah tercapai pada bulan Oktober. Tren penerimaan PNBP pada tahun 2024 fluktuatif tiap bulannya, namun cenderung menurun dengan nilai rata-rata bulanan sebesar Rp201.793.001. Pendapatan terbesar didapatkan pada bulan Mei dengan nilai Rp271.278.807 sementara pendapatan terkecil pada bulan November sebesar Rp154.405.114.



Gambar 3.1.1-2. Tren Bulanan Penerimaan PNBP tahun 2024

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan melibatkan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional sebagai petugas penerimaan PNB. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 1/BPSPL.2/KU.110/I/2024 tentang Struktur Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait rencana pengelolaan PNB tahun 2025. Target IKU pada tahun 2025 sebesar Rp1.800.000.000 dengan periode pengukuran IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung untuk IKU ini yang direncanakan yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) dan Penerimaan PNB melalui Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditambahkan pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Pembersihan Sampah di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut.

Teknik Menghitung

$$TK_{\text{BPSPL Pontianak}} = TK_{\text{Lokasi 1}} + TK_{\text{Lokasi 2}} + TK_{\text{Lokasi 3}} + TK_{\text{Lokasi 4}}$$

Keterangan:

$TK_{\text{BPSPL Pontianak}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{\text{Lokasi 1,2,3,4}}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	320	-	320	100	320	100	49	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat BPSPL Pontianak Nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024, telah melibatkan total 320 (tiga ratus dua puluh) nelayan meliputi Kota Balikpapan sebanyak 80 nelayan, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 80 nelayan, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 80 nelayan dan Kota Singkawang sebanyak 80 nelayan. Jumlah nelayan yang terlibat telah dilakukan verifikasi melalui Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nelayan di tiap lokasi Gernas BCL.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU “Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak”. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditambahkan pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Pembersihan Sampah di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Target Rencana Jangka Menengah yaitu sebanyak 49 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara target jangka menengah Ditjen PKRL dengan target dan capaian IKU ini, sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah. Meskipun begitu, capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah Ditjen JPKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu sebanyak 320 orang tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Matriks Kinerja & Pendanaan, capaian kinerja IKU ini tahun 2024 telah mencapai target sebesar 100% dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan Tahun 2020 – 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor aksesibilitas lokasi yang mudah diakses juga mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

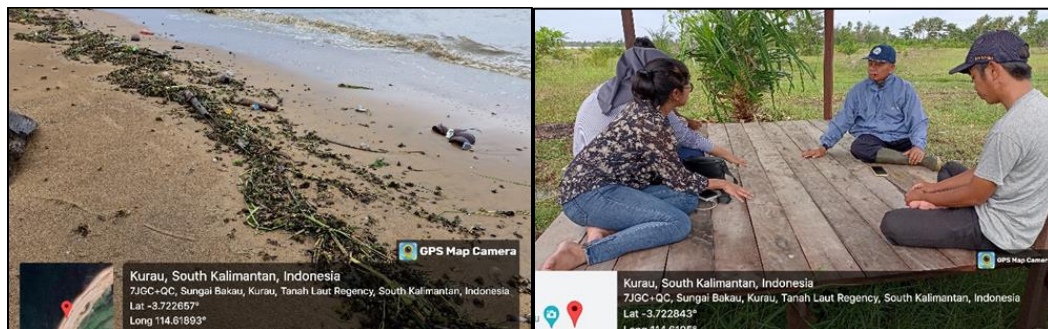
7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024 . Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 16 – 18 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.



Gambar 3.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapuk Besar, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi

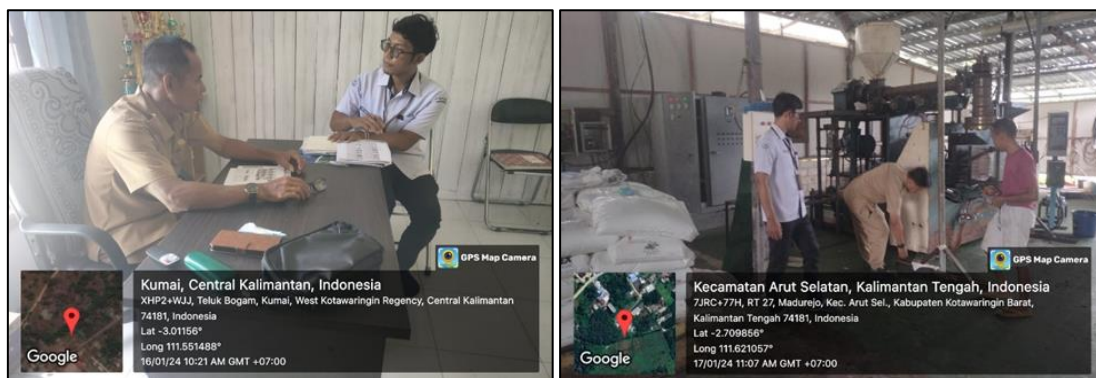
pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengelola sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model economy sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 80 nelayan dan KUB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/ pengepul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra *offtaker* potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan terendah dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.



Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapak Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPRKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Galak Super	10
	KUB Kakap Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

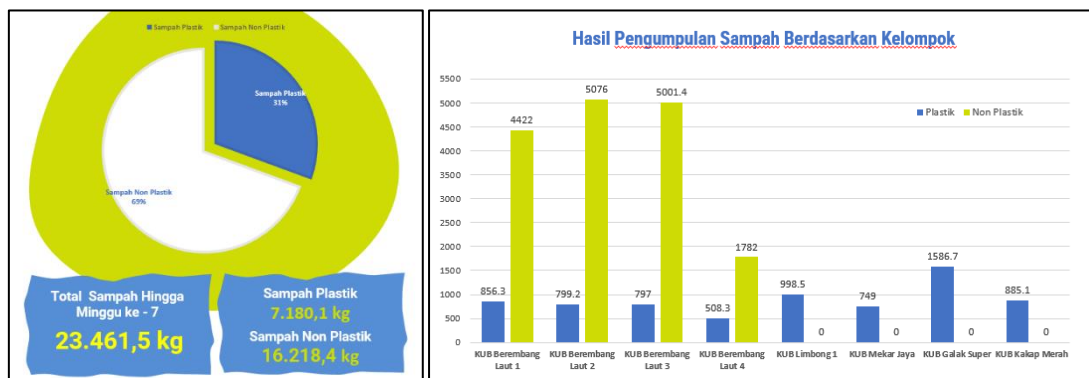
Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengelolaan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

➤ *Kegiatan Penimbangan dan Evaluasi Pelaksanaan*

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.863.000. KUB Berembang Laut II menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.875,2 kg.



Gambar 3.1.2-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya

d. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapak Besar	KUB Surya Perdana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mutiara	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bawal	10
	KUB Barakuda	10

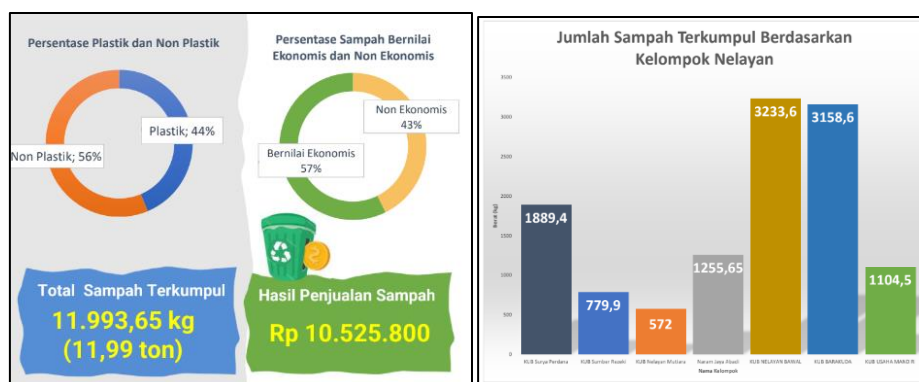
➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.993,65 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 57% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.525.800. KUB Nelayan Bawal menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.233 kg.



Gambar 3.1.2-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

e. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Citra Lestari	34
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.860,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.393 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut

f. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggian sebanyak 80 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggian	KUB Minasari	26
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Seraya	18
	KUB Lee Batakan Fajar	12
	KUB Anugrah Sinergi	12

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengelolaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.2-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta laut di Kabupaten Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,18 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.000.



Gambar 3.1.2-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

h. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapak Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 6,87 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.525.800.



Gambar 3.1.2-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

i. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.2-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

j. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggian sebanyak 80 orang). Kegiatan ini juga bemitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,84 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.161.700.



Gambar 3.1.2-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

k. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,348 kg di Pantai Singka; 7,887 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,619 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastic, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.



Gambar 3.1.2-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

l. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebusus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah

plastik sisa kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya.



Gambar 3.1.2-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

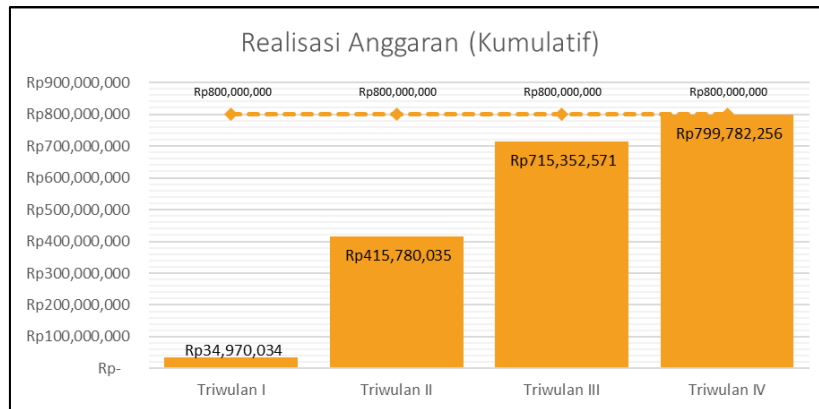
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitas Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp799.782.256 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.2-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada keseluruhan kegiatan gernas BCL masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat keterlibatan perempuan sebesar 14% dalam Gernas BCL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gernas BCL berupa keterlibatan dalam kepanitian kegiatan, pemberian materi dan evaluasi kegiatan.



Gambar 3.1.2-19. Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL

Pada pelaksanaan Gernas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Secara umum, pertanyaan dan saran/masukan didominasi oleh peserta laki-laki. Ketimpangan penyampaian aspirasi ini karena sebanyak 320 nelayan yang menjadi peserta Gernas BCL semuanya laki-laki. Perempuan yang mengajukan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Gernas BCL ini yaitu peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pesisir baik laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait dengan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2025.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
3	3	0	3	100	3	100	46	-

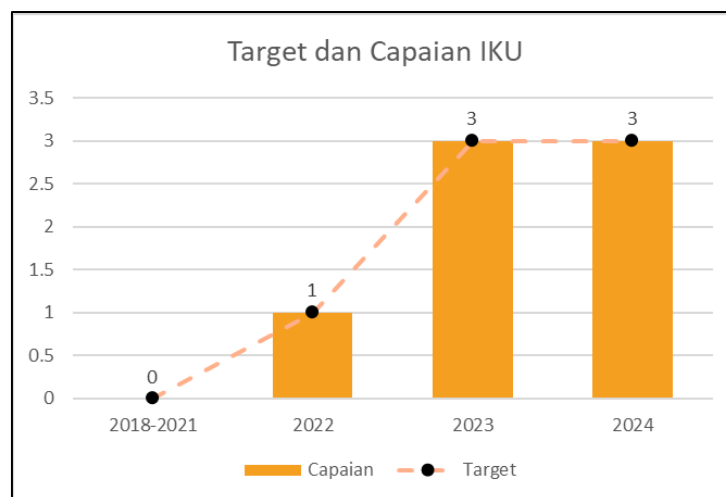
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Telah disusun dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak sebanyak 3 (tiga) dokumen yang: Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak serta koordinasi terkait dengan pelayanan pemanfaatan ruang laut. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja, capaian IKU ini telah mencapai realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 2 dokumen.



Gambar 3.1.3-1. Tren Target dan Capaian IKU

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL yaitu “Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Raung Laut di Pusat dan Daerah (Lokasi)” sebanyak 46 lokasi pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara target renstra DJPKRL dengan target kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun, Capaian IKU ini dapat berkontribusi dalam pencapaian target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024, dengan target pada tahun 2024 sebanyak 3 Dokumen. Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada Matriks Kinerja dan Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 100%..

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut engendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan penilaian teknis secara daring. Selain itu, penggunaan system aplikasi berbasis web *E-Sea* mendukung dalam penggunaan dan penguatan ruang laut. Sistem aplikasi berbasis web dan mobile ini memiliki fungsi dan kelebihan untuk mendukung penggunaan dan penguatan pengelolaan pemanfaatan ruang laut, proses ini dapat mempersingkat waktu proses perizinan pemanfaatan dan pengendalian ruang laut.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Sepanjang tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan penilaian teknis dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di seluruh provinsi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan verifikasi ini berupa penugasan dari pusat ataupun pendampingan penilaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Tercatat telah dilaksanakan penilaian teknis terhadap 122 pemohon dan verifikasi terhadap 98 pemohon yang tersebar di lima provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak. Jumlah verifikasi paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 66 permohonan, sementara jumlah verifikasi paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 permohonan.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Permohonan KKPRL

Provinsi	Jumlah Pemohon	Lokasi
Kalimantan Barat	4	Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang
Kalimantan Tengah	1	Kab. Pulang Pisau
Kalimantan Selatan	16	Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru
Kalimantan Timur	68	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur
Kalimantan Utara	9	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Total	98	

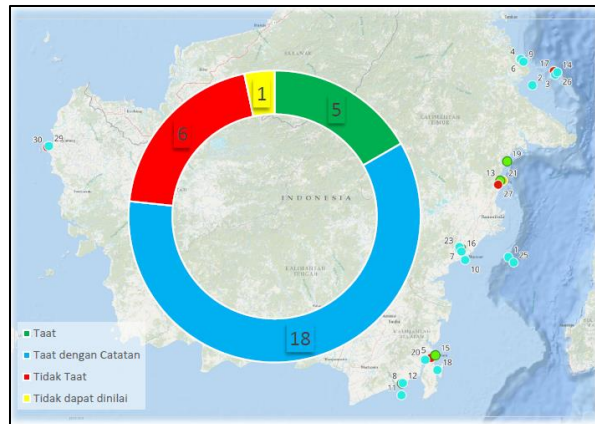
Dari 98 permohonan KKPRL yang telah diverifikasi, sebanyak 55 permohonan telah diterbitkan KKPRL. Sebanyak 26 permohonan KKPRL telah dimandatkan dari Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Kepada BPSPL Pontianak. Sebanyak 60 permohonan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah dilakukan pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total penerimaan PNBP dari PKKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sejumlah Rp95.779.915.400 dengan total luasan permohonan sebesar 5.200,30 hektar dan panjang permohonan 18,62 km.



Gambar 3.1.3-2. Verifikasi Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut pada 48 subjek hukum di 13 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi di Wilayah Kerja BSPL Pontianak. Kegiatan monitoring terbanyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 21 subjek hukum yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Sementara kegiatan monitoring paling sedikit dilakukan di Kalimantan Tengah sebanyak 6 subjek hukum yang tersebar di 2 Kabupaten.



Gambar 3.1.3-3. Sebaran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL

Sebanyak 30 subjek hukum dilakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL, sementara 18 subjek hukum diantaranya berupa kegiatan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Pelaksanaan penilaian kepatuhan berdasarkan prioritas yang memiliki risiko tinggi, bersifat strategis nasional, berdampak luas, dapat mengubah bentang perairan, berpotensi menimbulkan konflik, atau belum menyampaikan kewajiban laporan. Dari 30 subjek hukum yang dilakukan penilaian kepatuhan, sebanyak 5 subjek hukum berpredikat “Taati”, 18 subjek hukum berpredikat “Taati dengan catatan”, 6 subjek hukum berpredikat “Tidak Taati” dan satu subjek hukum tidak dapat dinilai kepatuhan pelaksanaan KKPRL.



Gambar 3.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pada tahun 2024, BPSPL Pontianak menyelenggarakan sosialisasi Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak tiga kali, yaitu:

➤ *Sosialisasi KKPRL di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Aula Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Civitas Akademisi Universitas Tanjungpura sebanyak 55 orang. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari BPSPL Pontianak dan Program Studi Teknik Kelautan, Universitas Tanjungpura. Disampaikan bahwa KKPRL (Konfirmasi Keserasian Pemanfaatan Ruang Laut) adalah izin dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari, baik untuk kegiatan berusaha melalui OSS maupun nonberusaha melalui sistem elektronik KKP (E-Sea), dan harus diperoleh sebelum kegiatan dimulai. Izin ini diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang di lokasi kegiatan dan berlaku untuk bangunan serta instalasi laut seperti pelabuhan, bangunan lepas pantai, pelindung pantai, dan terumbu karang buatan. Kegiatan seperti nourishment, yang melibatkan pengerukan dan dumping, juga memerlukan KKPRL. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.



Gambar 3.1.3-5. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura

➤ *Sosialisasi KKPRL di Maestro Hotel Pontianak*

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel Maestro Pontianak. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perizinan pemanfaatan ruang laut pada Nelayan di Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan mandat UUCK kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut berada di Pemerintah Pusat. Peranan dari pemerintah daerah adalah hasil penataan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan penerbitan persetujuan KKPRL diberlakukan 16 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan biota laut dan ekosistem pesisir/laut; pemberdayaan masyarakat; dan menghormati kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut salah satunya adalah nelayan. Jadi tidak ada privatisasi untuk area pemegang persetujuan KKPRL karena diatur kewajiban memberikan akses nelayan.



Gambar 3.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Maestro Hotel

➤ *Sosialisasi KKPRL di Kota Samarinda*

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2024 di Hotel Aston Samarinda, Kota SamarindaKaliamentan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut di perairan Pulau Kalimantan, Direktorat Perencaan Ruang Laut, Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta luring sejumlah 36 orang. Disampaikan bahwa laporan tahunan KKPRL wajib disampaikan melalui sistem E-Sea, dan pelaku usaha yang sebelumnya melaporkan via email akan beralih ke E-Sea pada 2025. Laporan tahunan menjadi kewajiban bagi setiap KKPRL yang diterbitkan, dengan jumlah laporan sesuai jumlah KKPRL yang dimiliki, termasuk bagi kegiatan nonaktif yang harus dilaporkan untuk pencabutan agar terhindar dari sanksi administratif. Pelaporan dilakukan oleh subjek hukum yang tercantum dalam KKPRL, sementara tanggung jawab kegiatan disesuaikan dengan penanggung jawab tahun berjalan. Laporan ini berbeda dari laporan izin usaha, yang ditujukan ke instansi pengampu, karena laporan KKPRL disampaikan ke KKP (Ditjen PKRL) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan ruang laut.



Gambar 3.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Samarinda

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana usulan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2024; koordinasi ke Direktorat PRL pasca Penilaian Teknis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 13 – 14 September 2024.

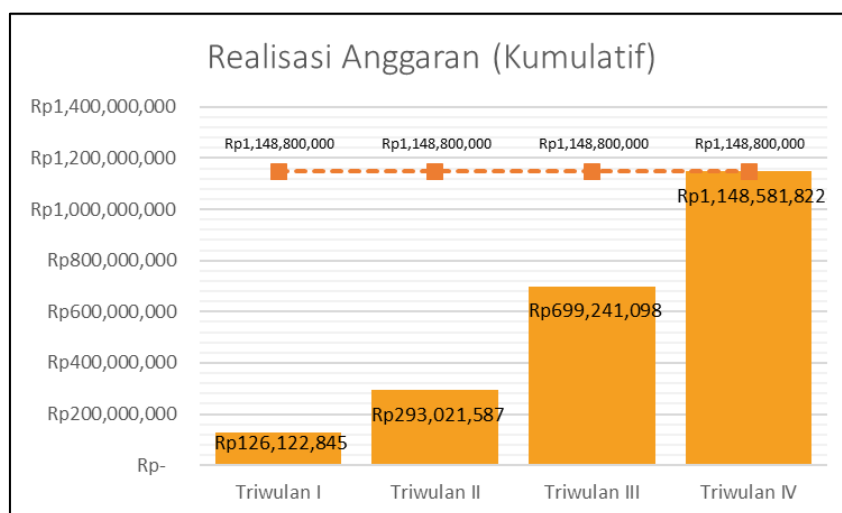
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2366.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2366.PBT.009.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp200.240.000	Rp200.133.942 (99,95%)	-
2.	[2366.PBT.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp349.760.000	Rp349.709.496 (99,99%)	-
3.	[2366.PBT.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp598.800.000	Rp598,738,384 (99,99%)	-
TOTAL		Rp 1.148.000.000	Rp1.148.581.822 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp1.148.581.822 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp1.148.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.3-8. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada kegiatan verifikasi dan monitoring KKPR yang dilakukan BPSPL Pontianak telah melibatkan pegawai dengan gender laki-laki (70%) dan perempuan (30%). Selain itu, upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi KKPR dengan mengundang perempuan sebagai narasumber.



Gambar 3.1.3-9. Pengarusutamaan Gender pada Kegiatan Operasionalisasi KKPRL

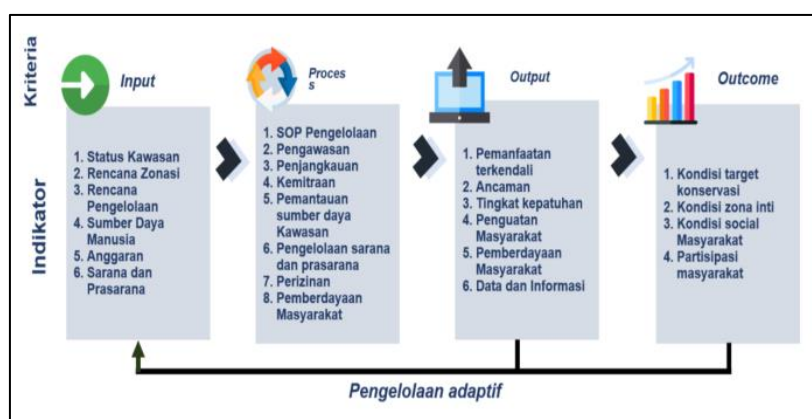
10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Sekretariat Ditjen PKRL dalam rangka mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSP Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSP Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSP Pontianak adalah Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSP Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPKRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.



Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
Output	6	15-20	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA

Kriteria	Ni	Nmax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
 Nilai Maksimum (nMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
 Nilai Kriteria (Nk) : $Ni / nMax \times 100\%$
 Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
 Nilai Akhir Kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$
 Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
36,44	16,31	+16,31	14	116,5	14	116,5	20 jt Ha	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

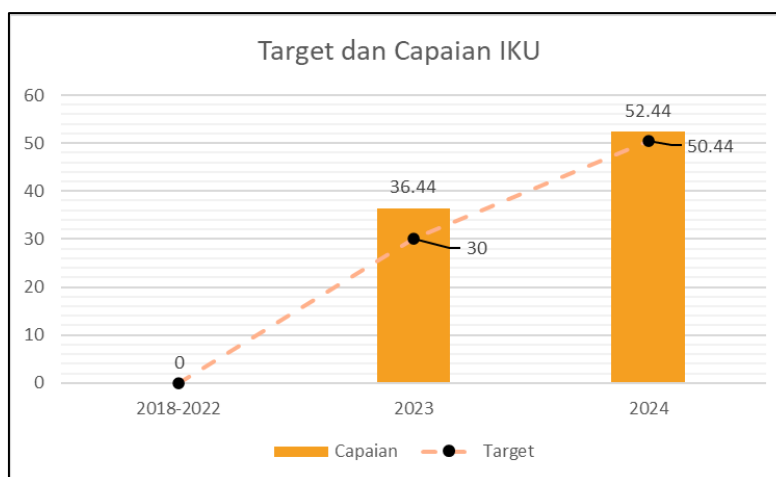
1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu mendapatkan nilai akhir sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 16,31% dan telah mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian sebesar (116%). Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya: penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi, Identifikasi

Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi, Pendataan Ikan Ekonomis Penting, Survei Jenis Ikan Dilindungi, Monitoring Sosial Ekonomi, Sosialisasi Kawasan Konservasi, Peningkatan SDM Pengelola Kawasan, *Conservation Goes to School* dan Sosialisasi Layanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 50,44%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,31%.



Gambar 3.1.4-2. Tren Target dan Capaian IKU 4

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan konservasi yang Operasional seluas 20 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan antara satuan yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL dengan target kinerja tahun 2024. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang operasional sebesar 0,21% dari target Rencana Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebesar 14% pada tahun 2024.. Capaian kinerja tahun 2024 dengan peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,31% telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 116,5%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini yaitu adanya SDM yang kompeten, kerjasama yang baik dengan mitra kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala pada pelaksanaan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu

yang belum dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan belum terdapat aturan mengenai perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah perairan darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pelaksanaan kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, akademisi, organisasi non profit dan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan dan pencapaian IKU ini.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

Penilaian Efaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil penilaian disepekat sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input: 760 dari total 1075 (71%)
- Skor penilaian kriteria proses: 265 dari total 430 (62%)
- Skor penilaian kriteria output: 295 dari total 650 (45%)
- Skor penilaian kriteria outcome: 1410 dari total skor 2780 (52,75%)



Gambar 3.1.4-3. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, melengkapi sarana dan prasarana untuk pengukuran dan pemantauan Kawasan, Menyusun dan melengkapi SOP pengelolaan beserta penerapannya, meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program penjangkauan yang terencana, pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi perizinan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program

pendampingan masyarakat, meningkatkan intensitas program penjangkauan masyarakat, monitoring dan analisis kondisi target konservasi di masing-masing zona.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kawasan

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara selenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan Kawasan Konservasi.



Gambar 3.1.4-4. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

c. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan, menganalisa memantau jumlah pelanggaran dan melihat kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan survei dilaksanakan secara rutin setiap tiga kali dalam satu minggu pada bulan Januari hingga November Bersama Yayasan Konservasi RASI dan instansi terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapang dan *Focus Group Discussion* (FGD), sementara metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.



Gambar 3.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Selama tahun 2024, telah dilakukan pemantauan sebanyak 88 kali dengan akitivitas penangkapan ikan ilegal yang teridentifikasi sebanyak 93 kejadian dengan melibatkan 130 nelayan. Kegiatan penangkapan ikan ilegal paling sering terjadi pada bulan April sebanyak 22 kejadian. Aktivitas penangkapan ilegal yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap destruktif berupa setrum, trawl dan racun. Sementara itu, hasil dari identifikasi pemanfaatan dan zonasi mendapatkan 5 orang nelayan yang menangkap ikan di Zona Inti yang tidak sesuai peruntukannya.

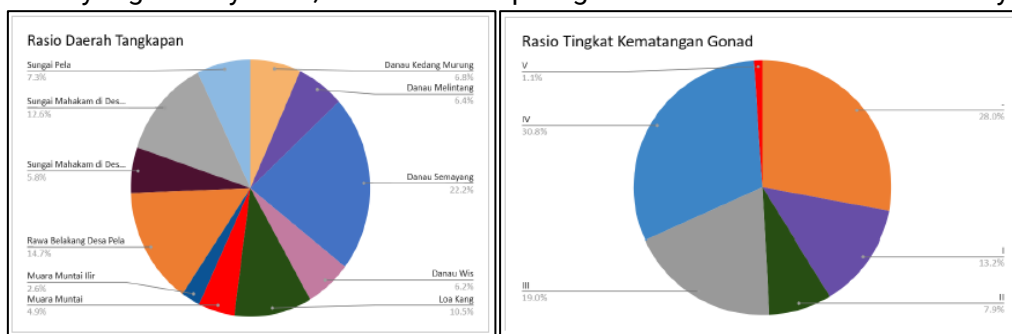
d. Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada Mei hingga November 2024 di Sembilan Desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini merupakan bagian dari Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel pengambilan data didapatkan dari hasil tangkapan nelayan. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan puyau (*Osteochilus vittatus*) dan ikan lepok (*Ompok miostoma*) yang merupakan komoditi ikan ekonomis di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendataan statistik rata-rata jenis ikan yang tertangkap serta penilaian kematangan gonad secara visual.



Gambar 3.1.4-6. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Sebanyak 347 ekor ikan puyau dan 124 ekor ikan lepok dilakukan pengukuran meristik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang dan lain-lain. Hasil morfologi ikan puyau yang didapatkan berada pada rentang panjang 10 - 26,5 cm dan ikan lepok sekitar 11,2 – 26,8 cm. Hasil pendataan didapatkan betina sebanyak 52,8% dan jantan sebanyak 45,9%. Pada tingkat kematangan gonad, sebanyak 28% tidak dapat diidentifikasi, matang gonad sebanyak 30,8%, diikuti TKG III sebanyak 19%, TKG I sebanyak 13,2% dan TKG V sebanyak 1,1%. Sebaran daerah penangkapan oleh nelayan paling besar di Danau Semayang sebanyak 22,2% sementara paling kecil di Muara Muntai Ilir sebanyak 2,6%.



Gambar 3.1.4-7. Hasil Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

e. Survei Jenis Ikan Dilindungi & Monitoring Kualitas Air

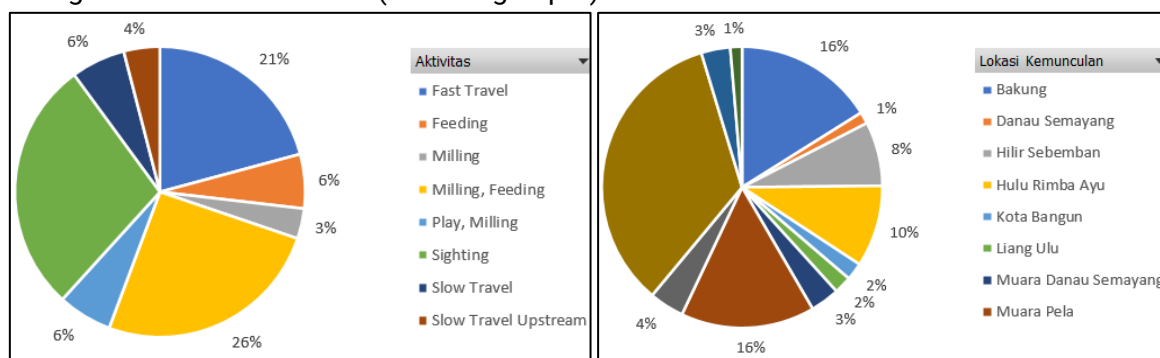
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam tiap Triwulan pada tahun 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Kemudian, dilakukan pencatatan hasil data berdasarkan matriks yang telah disusun. Pada saat ditemukan pesut, dilakukan pencatatan lokasi, pengambilan koordinat GPS, dan jumlah pesut

yang ditemukan Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan dengan parameter pH, DO, EC, TDS, Kecerahan, Temperatur secara insitu menggunakan *Water Quality Checker*.



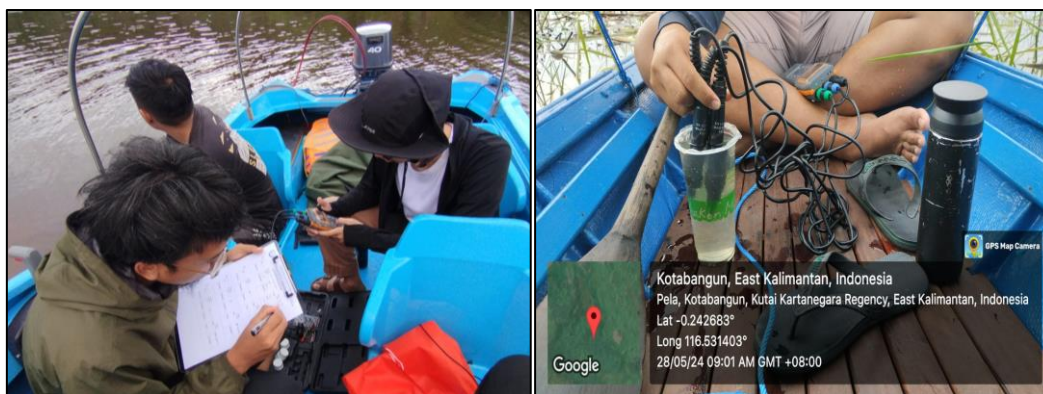
Gambar 3.1.4-8. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, didapatkan 23 kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 149 ekor. Individu terbanyak yang diamati berlokasi di Sangkuliman sebanyak 51 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Aktivitas pesut yang diamati sebagian besar berupa *sighting* (teramati) sebanyak 28%, diikuti oleh *milling* (melakukan aktivitas tanpa orientasi jelas) dan *feeding* (mencari makan) sebesar 26%. Sebesar 21% pesut yang teramati sedang melakukan *fast travel* (berenang cepat).



Gambar 3.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Pesut

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 29.4 – 30°C. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,6 – 4,7 mg/L. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,6 – 7,8. Sementara nilai TDS berkisar antara 9,9 – 74 ppm.



Gambar 3.1.4-10. Survei Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam ambang kelayakan baku mutu kelas dua merujuk PP Nomor 22 tahun 2021.

f. Monitoring Sosial Ekonomi

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada bulan April hingga September 2024. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pariwisata sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara *purposive sampling*, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Informasi yang didapatkan oleh responden di antaranya: profil responden, sikap terhadap kawasan konservasi, dukungan terhadap kawasan konservasi perairan, interaksi masyarakat, dampak kawasan konservasi, profil hunian dan properti, mata pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat, penangkapan dan pemasaran, konsumsi rumah tangga.



Gambar 3.1.4-11. Survei Sosial Ekonomi

Hasil akhir diperoleh 159 responden yang tersebar di 4 kecamatan. Responden yang didapatkan berprofesi sebagai nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan. Masyarakat pemanfaat di sekitar Kawasan konservasi memiliki variasi pendapatan antara Rp1.000.000 s.d. Rp5.000.000 tiap bulannya. Namun, pendapatan dari penangkapan ikan yang menjadi sumber utama penghasilan mengalami fluktuasi tergantung pada musim dan hasil tangkapan. Mayoritas responden menyadari bahwa aktivitas pengangkapan ikan secara ilegal dapat merusak ekosistem, namun hanya 58% responden yang mengetahui tentang

peraturan dan sanksi yang berlaku. Sekitar 65% responden setuju bahwa Kawasan konservasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun sebagian masyarakat merasa skeptis dan menganggap bahwa pembatasan akses dan aktivitas dapat merugikan secara ekonomi.

g. Sosialisasi Kawasan Konservasi

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada masyarakat/kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait dalam rangka upaya pengelolaan, serta penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni - September 2024. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam yang bernilai strategis secara nasional serta urgensi untuk melindungi habitat pesut. Selain itu, penjangkauan materi kawasan konservasi dilakukan dalam pemberian bahan cetak dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang terdiri dari tamu dan stakeholder. Hasil kegiatan sosialisasi berdasarkan *pre-test* dan *post-test* sosialisasi menunjukan peningkatan pengetahuan setelah kegiatan.



Gambar 3.1.4-12. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi

h. Sosialisasi Perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi

Tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yaitu untuk memfasilitasi penjangkauan melalui sosialisasi dan diskusi kepada pemangku kepentingan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Oktober 2024 di Desa Pela dan Desa Liang Ulu, Kecamatan Kotabangun, Kab. Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bekerjasama dengan Direktorat KBP dan Yayasan RASI sebagai narasumber.



Gambar 3.1.4-13. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

i. Conservation Goes to School

Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan peduli lingkungan hidup melalui perlindungan dan pelestarian kepada generasi muda di wilayah Kawasan

Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di Mtsn 2 Kutai Kartanegara, SMPN 1 Muara Wis, SMPN 1 Muara Kaman dan SMPN 1 Muara Muntai. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang eksistensi Pesut Mahakam. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya sumber daya air dan kehidupan di DAS Mahakam dengan bijak dan menjaga prinsip kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar 3.1.4-14. Pelaksanaan *Conservation Goes to School*

j. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi**

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Januari - Desember 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan yaitu Longboat Operasional, Drone, Tablet Pelayanan, Meubelair, Alat Komunikasi, Current Meter, Alat Pengolah Data, CCTV dan Rumah Rakit.

8. **Realisasi Anggaran**

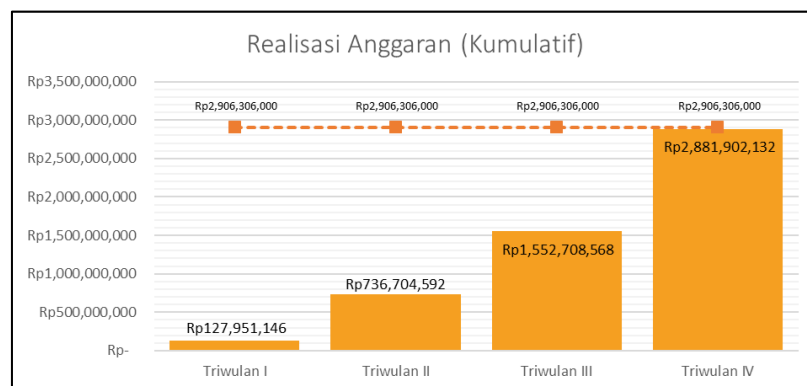
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [2362.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-5. Realisasi Anggaran IKU 4 tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 83.545.000	Rp 83.544.333 (100%)	-
2.	[2362.PBW.001.058] Pelayanan Peizinan Berusaha Kawasan Konservasi	Rp 128.618.000	Rp 128.607.976 (99,99%)	-
3.	[2362.PBW.001.065] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp 212.837.000	Rp 212.835.224 (100%)	-
4.	[2362.REA.002.051]	Rp 593.000.000	Rp 592.656.322 (99,94%)	-

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil			
5.	[2362.REA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp385.870.000	Rp 350.489.110 (99,91%)	-
6.	[2362.REA.002.053] Pemberdayaan Masyarakat	Rp1.197.798.000	Rp1.210.628.070 (100%)	-
7.	[2362.REA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp304.638.000	Rp303.141.097 (99,51%)	-
TOTAL		Rp2.906.306.000	Rp2.881.902.132 (99,16%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp2.881.902.132 atau 99,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.906.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.4-15. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan Direktorat KEBP dalam rangka mendiskusikan Perizinan Kawasan Konservasi Perairan darat yang belum bisa dilakukan oleh KKP. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rutin seperti monitoring biota dilindungi dan pendataan ikan ekonomis penting.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK-5	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
	2	-1	1	100	1	100	0,9 Jt Ha	-

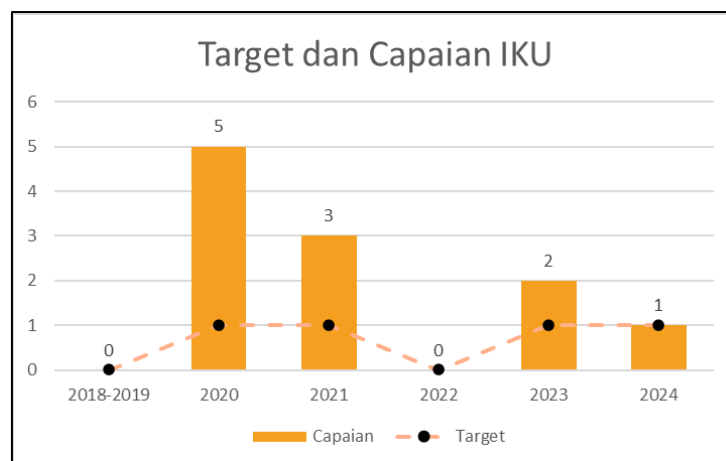
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan IKU ini disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Perlindungan dan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 5/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Namun, hanya Provinsi Kalimantan Utara saja yang menyampaikan Surat Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Cermin di Kabupaten Bulungan melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor 500.5.5.6/0549/DKP/GUB tanggal 13 Februari 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak telah difasilitasi penetapan usulan Kawasan Konservasi. Jika dibandingkan, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 daerah atau 50%. Bila dibandingkan dengan capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir, capaian tahun 2024 merupakan capaian terkecil. Hal ini dikarenakan anggaran adanya penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2023.



Gambar 3.1.5-1. Tren Capaian IKU 5

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 900.000 hektare luasan kawasan konservasi baru pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL dengan target kinerja tahun 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun luasan Kawasan Konservasi Pulau Cermin seluas 1.163,5 hektar yang diusulkan oleh Provinsi Kalimantan Utara telah berkontribusi sebesar 0,12% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu 1 daerah pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Sedangkan faktor penghambat pencapaian IKU ini yaitu terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi daerah secara luring jika lebih dari satu daerah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Daerah yang difasilitasi penyusunan penetapan kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Peraliran di Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk penyesunan penetapan Kawasan Konservasi, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi

Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Cermin dilakukan pada Triwulan I – Triwulan II 2024. Tahapan awal penyusunan dilakukan dengan menentukan target konservasi biota prioritas di Pulau Cermin. Setelah itu, dilakukan survey pengumpulan data ekologis dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi. Kemudian untuk menentukan Zonasi daerah konservasi, digunakan perangkat lunak MARXAN (*Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Anealling*). Setelah itu, dilakukan konsultasi publik untuk menjangkau masukan dari stakeholder terkait mengenai zonasi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.



Gambar 3.1.5-2. Konsultasi Publik Penetapa Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara

b. Pendampingan dan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjungseler, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 – 12 Juni 2024. Terdapat dua Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan luas total sekitar 25.482,08 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Binusan dan Pulau Sinelak, serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Palas Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau Cermin dengan luas 1163,59 hektar sedang diproses.



Gambar 3.1.5-3. Fasilitasi Usulan Penetapan KKP3K di Kalimantan Utara

c. Evaluasi Teknis Usulan Kawasan Konservasi

Tahapan evaluasi penetapan di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari penyampaian usulan penetapan, evaluasi teknis dari dokumen permohonan, pengajuan dokumen penetapan, pembahasan lingkup kementerian dan pengesahan Keputusan Menteri.

Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan Surat Usulan Penetapan KK Pulau Cermin melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor 500.5.5.6/0549/DKP/GUB. Hasil evaluasi teknis proses penetapan Kawasan Konservasi Pulau Cermin di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya: terdapat perbedaan luasan antara yang tertuang dalam alokasi Matek RTRW Provinsi dengan yang diusulkan, perlu memastikan garis pantai yang akan digunakan, perlu memastikan kepemilikan lahan pada area yang dijadikan Zona Inti.

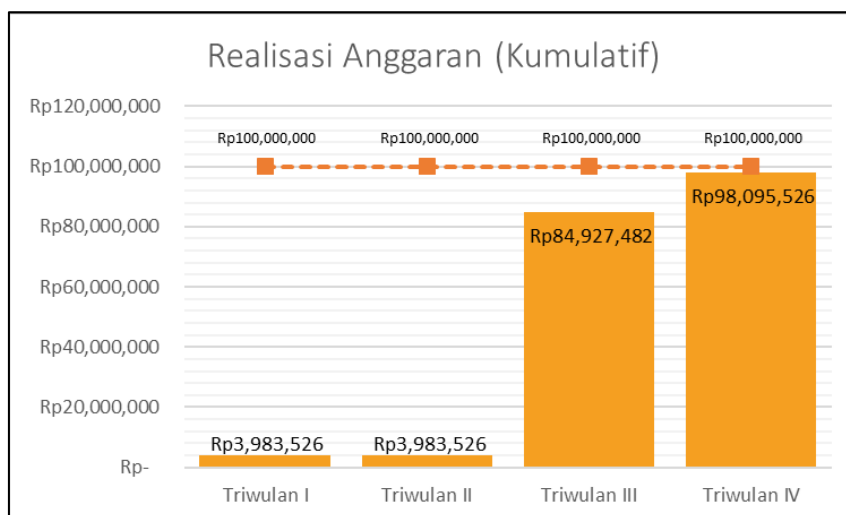
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp98.095.526 (98,09%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp98.095.526 (98,09%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp98.095.526 atau 98,09% dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.5-3. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 pada tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat KEBP dan Sekretariat Ditjen PKRL dalam rangka membahas target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU “Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak” pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-6	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	1	100	1	100	5	20

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Capaian IKU ini yaitu telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Terdapat sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama yang disusun pada tahun 2024, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU “Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak” pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.



Gambar 3.1.6-1. Tren Capaian Kerja Sama selama 5 tahun terakhir

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu “Konvensi dan Kerja Sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut” sebanyak 5 kesepakatan juta hektar pada tahun 2024. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 1 kesepakatan kerja sama telah berkontribusi sebesar 20% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan Adanya Rencana Kerja Tahunan dan Monitoring Implementasi Kerja Sama dilakukan secara berkala. Sedangkan Faktor Penghambat adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan pertemuan secara luring. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pertemuan secara daring.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring. Selain itu, optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya:

a. Insiasi & Penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama

Kegiatan insiasi dan jejaring kerja sama di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu dilaksanakan dengan diskusi antara pihak BPSPL Pontianak dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 25 Maret 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin isi dokumen yang didiskusikan yaitu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu selama tahun 2024. Pembahasan dilanjutkan dengan pendetailan mengenai matriks kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk finalisasi draft perjanjian kerja sama.



Gambar 3.1.6-2. Inisiasi dan Pembahasan Draft Kerja Sama

Kegiatan pembahasan finalisasi draft dokumen perjanjian kerja sama atau nota kesepakatan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tanggal 7 Mei di kantor BPSPL Pontianak secara daring dan luring. Kegiatan ini juga didampingi oleh Direktorat KEBP, Sekretarian Ditjen PKRL dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin pembahasan yaitu: perbaikan mengenai identitas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, merubah pertukaran data dan informasi menjadi berbagi pakai data dan informasi, serta pembahasan mengenai rencana aksi/rencana kerja.

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama

Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

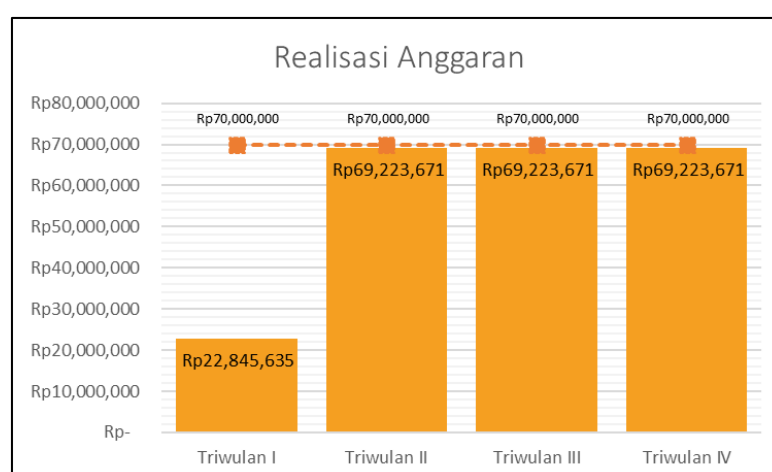
Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berdasarkan Komponen/Subkomponen.

Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-
TOTAL		Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 6 tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp69.223.671 atau 98,89% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).

**Gambar 3.1.6-4.** Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat KEBP dan Sekretariat Ditjen PKRL dalam rangka membahas target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

IKU 7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU “Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak” pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-7	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	100	1	100	1	100	5	20

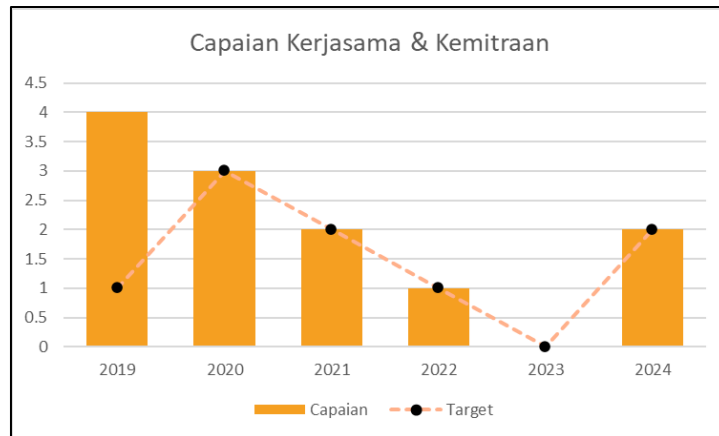
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Kegiatan IKU ini pada tahun 2024 telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU “Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak” pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.



Gambar 3.1.6-5. Capaian Kinerja Kerjasama/Kemitraan dalam 5 tahun terakhir

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu “Jejaring kemitraan Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut” sebanyak 5 kesepakatan pada tahun 2024. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 1 kesepakatan kerja sama telah berkontribusi sebesar 20% dari target jangka menengah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor pendukung pencapaian IKU ini adalah kesadaran pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari para pihak. Sementara penghambat yaitu adalah tidak adanya monitoring implementasi Perjanjian Kemitraan secara berkala.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan akademisi dan stakeholder terkait dan melakukan pertemuan secara daring. Selain itu, optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

5. Kegiatan Pendukung

a. Inisiasi & Pembahasan Draft Kemitraan

Kegiatan inisiasi kemitraan ini dilaksanakan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 di Hotel Mercure Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Direktorat KEBP, Sekretariat Ditjen PKRL, Biro Kerjasama KKP.

Penyusunan dan pembahasan draft kesepatan Bersama antara BPSPL Pontianak dengan FPIK Universitas Mulawarman di Kota Samarinda dilakukan pada 24 Januari 2024. Beberapa poin hasil diskusi diantaranya: perlu diadakan atau dilakukan kemitraan dengan masyarakat local, perlu pertemuan dan koordinasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Ruang lingkup perjanjian yang disepakatai adalah Penguatan Sumber Daya Manusia, Kajian Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi.



Gambar 3.1.6-6. Kegiatan Inisiasi dan Pembahasan Kemitraan

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sesuai Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.



Gambar 3.1.6-7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

6. Realisasi Anggaran

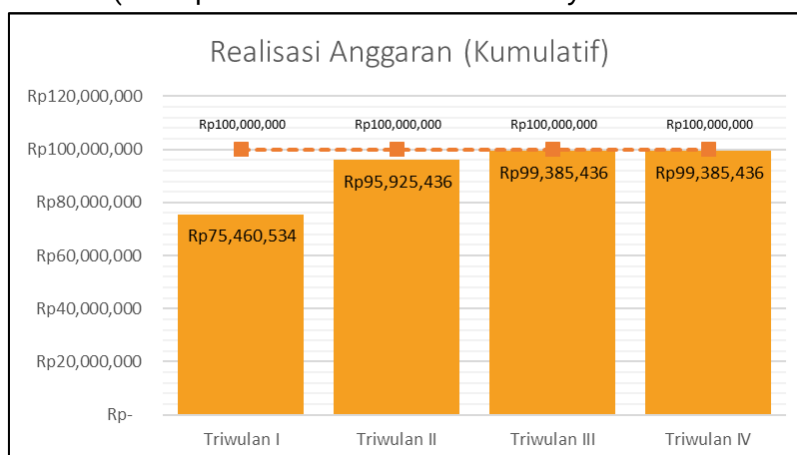
Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PEE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

Tabel 3.1.6-4. Realisasi Anggaran IKU Kemitraan Konservasi

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PEE.001.051.A] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.385.436 (99,38%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.385.436 (99,38%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.385.436 atau 99,38% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Paket *Fullday* di Kalimantan Timur).



Gambar 3.1.6-8. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat KEBP dan Sekretariat Ditjen PKRL dalam rangka membahas target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU-8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
3	2	-1	2	100	2	100	-	-

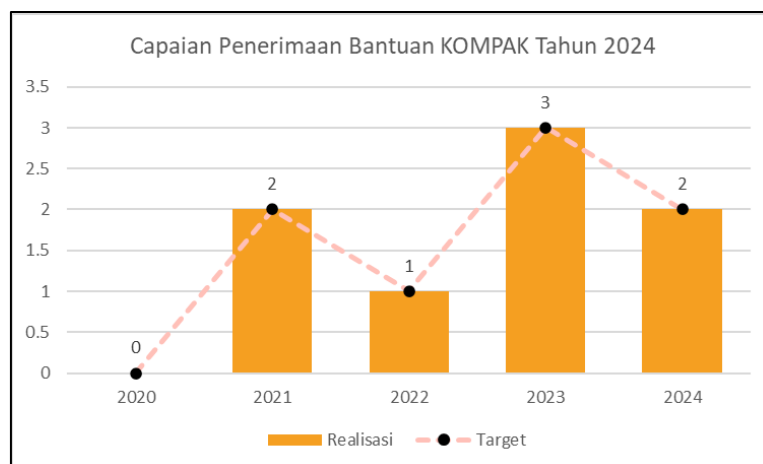
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah diserahkan Bantuan Pemerintah dari target Tahun 2024 sebesar 2 (kelompok) dari target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 26/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, telah dilakukan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Padaidi di Kabupaten Kotabaru sesuai Berita Acara Serah Terima nomor B.1578/BPSPL.2/PRL.440/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan serah terima bantuan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Cempedak Lestari di Kabupaten Ketapang B.3260/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Tren capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2024 mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024.



Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK dalam 5 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian kumulatif Tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp365.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada keaktifan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Telah dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, pengumpulan dan pendampingan penyusunan proposal juga dilakukan secara daring dapat menunjang efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Identifikasi, Usulan, Verifikasi dan Penetapan Kelompok Masyarakat

Identifikasi kelompok masyarakat calon penerima bantuan KOMPAK dilakukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2024 yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang dan Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Padaidi dan POKMASWAS Selayar Bersatu. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Padaidi merupakan kelompok masyarakat yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, penanganan biota laut terdampar dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2019, kelompok ini sudah/belum pernah mendapatkan bantuan KOMPAK dari Direktorat KKHL berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.



Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kendawangan. Identifikasi dilakukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Cempedak Lestari, POKMASWAS Tengar Bersatu, POKMASWAS Sadar Wilayah Pelapis, POKMASWAS Mangrove Cilincing Bersatu. Kelompok Masyarakat Pengawas Cempedak Lestari berlokasi di Dusun Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba, pesut dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/perguruan tinggi.



Gambar 3.1.7-3. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi, terdapat dua kelompok yang berpotensi mendapatkan bantuan, yaitu Pokmaswas Padaidi di Kalimantan Selatan dan Pokmaswas Cempedak Lestari di Kalimantan Barat. Kedua kelompok ini memenuhi sejumlah kriteria, antara lain telah memiliki legalitas atau penetapan resmi dari Dinas terkait, berada di Kawasan Konservasi Daerah, aktif mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam petunjuk teknis. Selain itu, Pokmaswas Padaidi telah menerima Bantuan Konservasi pada tahun 2019 dan menunjukkan kinerja yang baik, yang dibuktikan melalui laporan evaluasi Bantuan Konservasi selama dua tahun berturut-turut dengan nilai baik serta predikat AA (Memuaskan) dalam penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua kelompok ini dinilai layak untuk menerima bantuan guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan Surat Persetujuan Hasil Identifikasi dan Verifikasi oleh Direktur KEBP Nomor B.1091/DJPKRL.5/PRL.440/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 serta Memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor: B.4/BPSPL.2/PRL.440/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak menetapkan Pokmaswas Padaidi sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.01/BPSPL.2/PPK/V/2024. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Hasil Identifikasi dan Verifikasi oleh Direktur KEBP Nomor: B.1654/DJPKRL.5/PRL.440/VI/2023 tanggal 28 Juni 2024 dan Memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor: 11/BPSPL.2/KP.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak juga menetapkan Pokmaswas Cempedak Lestari sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.02/BPSPL.2/PPK/VI/2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- SP Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 uraian Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAPB No. 45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAST No.45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No.45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.3338/PP.2.10/PL.450/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 uraian Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pembayaran No. 51-1/BPSPL.2/PPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Berita Acara Pembayaran No. 51-2/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB.58/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024
- Berita Acara Serah Terima Pekerja (BAST) No.58/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Padaidi dari Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kompresor, satu unit kamera underwater dan satu unit housing underwater dengan nilai sebesar Rp. 98.235.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.1578/BPSPL.2/PRL.440/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.



Gambar 3.1.7-4. Serah Terima Bantuan KOMPAK Padaidi

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Cempedak Lestari dari Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat berbahan fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp. 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.3260/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.



Gambar 3.1.7-5. Serah Terima Bantuan KOMPAK Cempedak Lestari

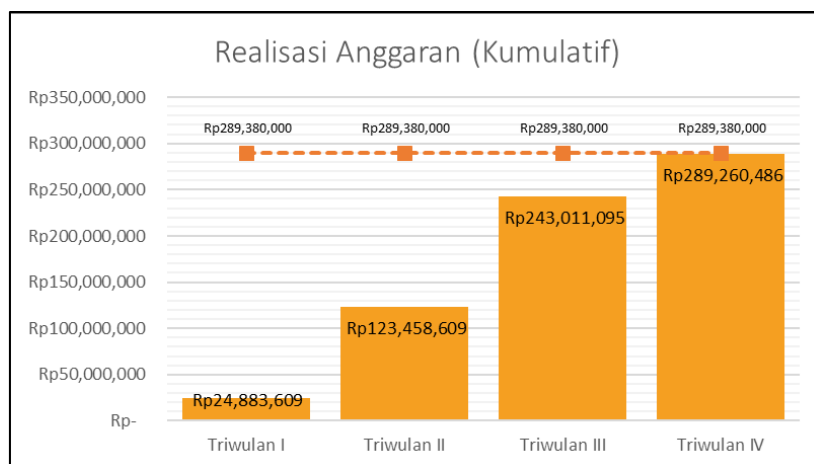
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp289.380.000	Rp289.260.486 (99,96%)	-
TOTAL		Rp289.380.000	Rp289.260.486 (99,96%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp289.260.486 atau 99,96% dari pagu anggaran sebesar Rp289.380.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.



Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan melibatkan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional pada rangkaian kegiatan bantuan KOMPAK.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan bantuan di tahun 2024.

IKU 9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

IKU ini baru terdapat pada tahun 2024 dan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. IKU ini merupakan pengembangan dari Sasaran Kinerja “Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak”. menindaklanjuti pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 8 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi “Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)” dengan target menjadi 60 orang.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU-9	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	70	-	60	116,67	1	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan. Terdapat realisasi sebanyak 70 (orang) masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Mahakam Wilayah Hulu yang difasilitasi pengembangan mata pencarian baru. Capaian tersebut melebihi target sebanyak 60 orang sehingga realisasi terhadap target sebesar 116,67%. Capaian kinerja disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL/2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU “Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru”. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu sebanyak 60 Orang masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencarian baru pada tahun 2024. Capaian IKU tahun 2024 sebesar 70 orang telah berkontribusi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 116,67%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat blokir anggaran yang baru dibuka pada bulan Juni sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 60 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja dan menyesuaikan target PK dengan target RO pada bulan Oktober 2024.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pelaksanaan kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

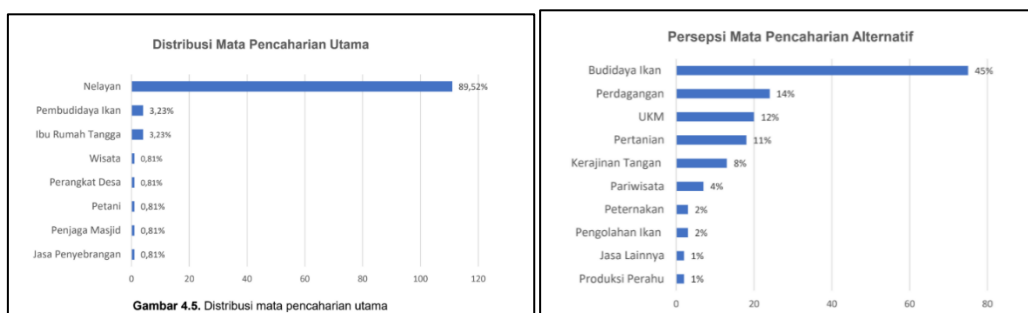
a. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat

Kegiatan identifikasi untuk mata pencaharian alternatif bertujuan untuk menggali potensi ekonomi masyarakat dan mengetahui jenis mata pencaharian yang sesuai dan berkelanjutan sebagai dasar penentuan pelatihan yang tepat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2024 berlokasi di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu wawancara menggunakan alat peraga berupa kuisioner pada enam desa: Desa Sangkuliman, Desa Pela, Desa Liang Ulu, Desa Liang Ilir, Desa Sebelimbingan, Desa Kota Bangun Sebrang. Sementara metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis skoring.



Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KK Mahakam Hulu

Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa mayoritas responden (89,52%) berprofesi sebagai nelayan. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas perikanan menjadi mata pencaharian utama di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Pendapatan Sebagian besar responden berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 atau kurang dari Rp3.536.506. Mayoritas responden memiliki ketertarikan terhadap pengembangan mata pencaharian alternatif yang mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Berdasarkan hasil skoring, kegiatan budidaya perikanan dinilai oleh responden sebagai alternatif mata pencaharian yang paling sesuai dan dapat berkelanjutan, diikuti dengan pengolahan produk kerajinan tangan dan pengembangan pariwisata yang berpotensi meningkatkan diversifikasi ekonomi masyarakat.



Gambar 3.1.7-5. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu

b. Pelatihan Peningkatan Mata Pencaharian Alternatif

Kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu serta mengembangkan mata pencaharian alternatif atau peluang usaha baru bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan pelatihan mata pencaharian alternatif dilakukan sebanyak dua kali yaitu pelatihan bidang perikanan pada tanggal 6 – 7 November 2024 dan pelatihan bidang pariwisata pada tanggal 10 Desember 2024.

Pelatihan bidang perikanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari 7 desa di 2 kecamatan. Kegiatan ini mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu mengenai cara-cara pemijahan ikan yang berkelanjutan untuk ikan mas (*Cyprinus carpio*). Selain itu, juga terdapat praktek di lapangan terkait dengan contoh pemijahan ikan.



Gambar 3.1.7-6. Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu

Pelatihan bidang pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 2 kecamatan. Kegiatan ini mengundang Ziealabel Craft sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu mengenai *digital marketing* untuk kerajinan lokal. Selain itu, juga terdapat praktek untuk membuat kerajinan tangan berbahan bamban yang bisa dijadikan cinderamata untuk peningkatan sumber daya pariwisata.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp296,610,000	Rp296,381,392 (99,92%)	-
TOTAL		Rp296,610,000	Rp296,381,392 (99,92%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari laki-laki dan perempuan. Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah peserta kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif. Pada kegiatan pelatihan pariwisata, jumlah peserta laki-laki yang ikut sebanyak 14 orang sementara Perempuan sebanyak 26 orang.



Gambar 3.1.7-7. Pengarusutamaan Gender pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan identifikasi awal terkait lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- b. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan,

Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

SK-8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU-10	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
10	8	-2	7	114,29	7	100	20	40

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

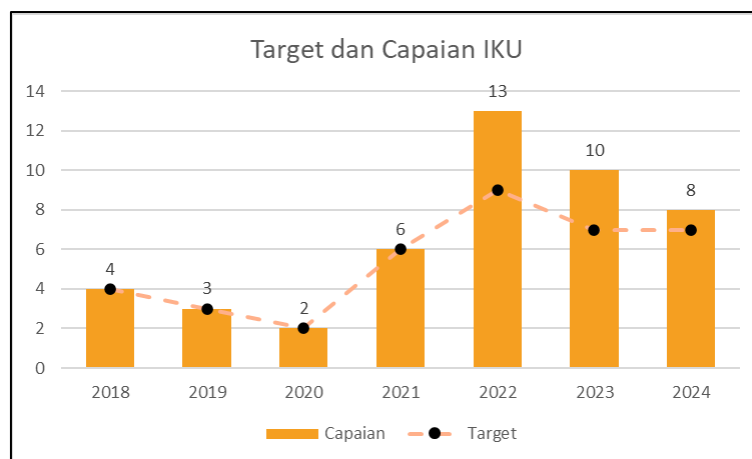
1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, realisasi IKU ini yaitu sebanyak 8 jenis meliputi Penyu, Kima, Lola, Karang, Mamalia Laut, Terubuk, Pari Air Tawar dan Belida. Terdapat satu kegiatan jenis ikan yang menjadi IKU tambahan, yaitu Penyediaan Data Populasi Belida. Persentasi capaian terhadap target perjanjian kinerja untuk IKU ini sebesar 114,29%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 6/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

- Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat;
- Penyediaan Data Populasi Kima di Kalimantan Barat;
- Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan;
- Penyediaan Data Populasi Ikan Terubuk di Kalimantan Barat;
- Penyediaan Data Potensi Pari Air Tawar di Kalimantan Tengah;
- Pembuatan Stock Center Karang di Kalimantan Timur;
- Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah; dan
- Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau Terancam Punah

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 10 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (kumulatif 8 jenis), maka progres kegiatan mengalami penurunan sebesar 20% dari progres kegiatan pada Tahun 2023. Hal itu dikarenakan tidak terdapat anggaran untuk penyediaan data potensi jenis Terubuk dan Pari Air Tawar. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, tren capaian mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2022 dan penurunan dari tahun 2022 – 2024.



Gambar 3.1.8-1. Grafik Capaian IKU 10 dalam 5 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki peran sebesar 40% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu 8 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki peran sebesar 100% dari capaian target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi penyu, respon cepat mamalia laut terdampar dan sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan pelapor. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat biota terdampar. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu tidak terdapat anggaran untuk penyediaan data potensi jenis Terubuk dan Pari Air Tawar. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Sekretaris Ditjen PKRL terkait dengan mata anggaran kedua kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data populasi penyu di Kalimantan Barat dilaksanakan di Pantai Sungai Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebusus, Kecamatan

Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 9 s.d. 14 Mei 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dengan anggota kelompok masyarakat Wahana Bahari Paloh. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Pantai Tanjung Api yang merupakan sekretariat atau Pos monitoring penyu dari Kelompok Masyarakat Pengawas Kambau Borneo. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.



Gambar 3.1.8-2. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Survey pendataan populasi penyu dilakukan dengan penyisiran tepi pantai pada malam hari yang dibagi menjadi 8 sektor dengan jarak antar sektor berkisar 500 meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya ditemukan penyu di sektor 3 sampai dengan sektor 7, tetapi ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Penyu yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 4 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang hasil relokasi dengan jumlah telur per sarang diantara 71 – 138 butir yang diperkirakan akan menetas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Pesisir Paloh. Jenis penyu yang sarangnya direlokasi adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.

b. Penyediaan Data Populasi Kima di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data populasi kima di Kalimantan Barat dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Lemukutan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 3 – 6 Februari 2024. Sebelum survei, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang berlokasi di Aula Kantor Desa Pulau Lemukutan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan warga Desa Pulau Lemukutan yang berprofesi sebagai nelayan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.



Gambar 3.1.8-3. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

Metode survey pendataan populasi kima yang dilakukan adalah metode *belt transek* yaitu dengan menarik garis transek lurus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 5 meter (2,5 meter kanan dan 2,5 meter kiri pengamat) pada 7 stasi pendataan. Total jumlah Kima (*Tridacna spp.*) yang ditemukan di 7 lokasi pendataan di Pulau

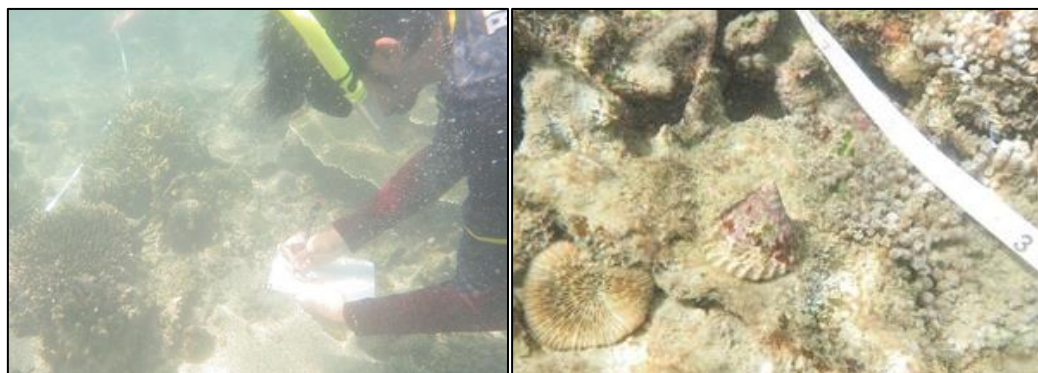
Lemukutan yaitu 984 ekor dengan jenis *Tricadna crocea*, *Tricadna maxima* dan *Tricadna squamosa*. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Taman Kima sebanyak 278 ekor. Sementara jumlah kima paling sedikit ditemukan di Teluk Surau dengan sebanyak 89 ekor.

Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. Surau	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	89
2	Tel. Cina	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	167
3	Tj. Palembang	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	152
4	Taman Kima	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	278
5	Air Tiris	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	119
6	Tj. Batu Bedaun	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	85
7	Tj. Merohom	<i>T. crocea</i> , <i>T. maxima</i> , <i>T. squamosa</i>	94
Total			984

c. Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan

Kegiatan penyediaan data populasi lola (*Trocas nilotus*) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 5 – 14 September 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dengan BKIPM dan PSDKP Kalimantan Selatan untuk mencari informasi mengenai lalu lintas dan penangkapan lola di Kalimantan Selatan. Selain itu, dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Padaidi yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informan yang mengetahui lokasi kerrang lola. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melakukan pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan nelayan sekitar terkait lokasi potensial Lola di Pulau Kerayaan.



Gambar 3.1.8-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat

Survei lapangan dilakukan di 3 lokasi/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif terhadap masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan menggunakan transek garis pada titik sampel. Stasiun pertama berlokasi di

bagian barat Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 4 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 11 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di bagian timur Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 9 individu lola di sekitar transek pengamatan. Total sebanyak 24 individu lola yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyediaan data populasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Kerayaan.

d. Penyediaan Data Populasi Ikan Terubuk di Kalimantan Barat

Kegiatan survey untuk penyediaan data populasi ikan terubuk dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 April tahun 2024 di Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara *snowball sampling*. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.



Gambar 3.1.8-5. Penyediaan Data Populasi Terubuk

Di Kalimantan Barat terdapat dua jenis ikan terubuk, yaitu *Tenualosa toli* dan *Tenualosa macrura*. Keberadaan *Tenualosa toli* hanya diketahui berdasarkan informasi dari wawancara dengan nelayan dan pengepul, sedangkan *Tenualosa macrura* teridentifikasi langsung melalui sampel yang diperoleh selama survei. Dalam survei tersebut, ditemukan total 19 ekor ikan terubuk, dan sebanyak 7 ekor dibawa oleh tim survei untuk pengukuran lebih lanjut. Hasil identifikasi morfologi dan morfometrik terhadap seluruh sampel menunjukkan bahwa jenis ikan tersebut adalah *Tenualosa macrura*. Selain itu, hasil uji DNA terhadap sampel ikan terubuk dengan kode TR-11 dan TR-13 juga mengonfirmasi jenis *Tenualosa macrura*.

e. Penyediaan Data Potensi Pari Air Tawar di Kalimantan Tengah

Survei penyediaan data potensi pari air tawar dilakukan pada tanggal 20 – 25 Oktober 2024 di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Karau Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara *snowball sampling*. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.



Gambar 3.1.8-6. Survei Penyediaan Data Potensi Pari Air Tawar

Hasil survei penyediaan data potensi pari air tawar di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa *Fluvitrygon signifler* (pari sungai pinggir putih) merupakan jenis pari air tawar yang ditemukan di Kabupaten Barito Selatan. Sebaran potensinya meliputi sepanjang Sungai Barito serta beberapa danau seperti Danau Raya dan Danau Lelek, yang memiliki karakteristik perairan air putih. Ikan ini lebih mudah ditemukan dan tertangkap pada saat kondisi air surut dengan kedalaman 2–7 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara, jumlah tangkapan *Fluvitrygon signifler* berkisar antara 2 – 6 ekor di setiap rentang waktu penangkapan ikan oleh nelayan.

f. Penyediaan Data Potensi Belida di Kalimantan Tengah

Kegiatan survey lapang penyediaan data potensi belida dilakukan pada tanggal 20 – 26 Oktober 2024 di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara *snowball sampling*. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.

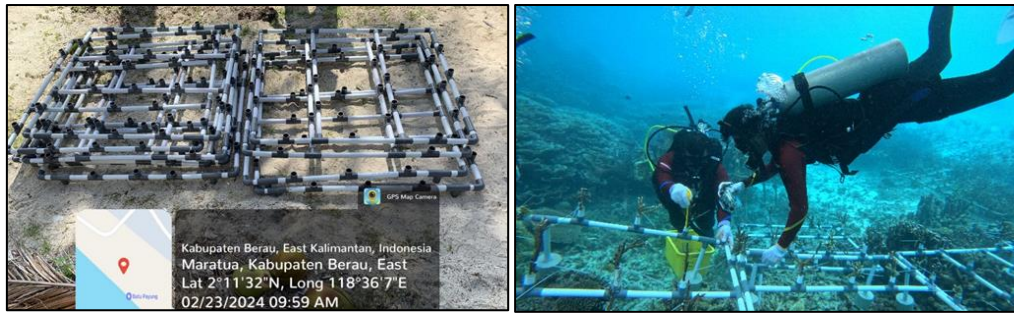


Gambar 3.1.8-7. Penyediaan Data Potensi Belida

Selama survei di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, terdapat dua nelayan yang menangkap dan membesarkan ikan belida. Berdasarkan hasil identifikasi visual, jenis ikan belida yang mereka pelihara diduga adalah *Chitala lopis*, meskipun diperlukan identifikasi lebih mendalam untuk memastikan jenisnya secara akurat. Lokasi potensial habitat ikan belida di Kabupaten Barito Selatan ditemukan di sekitar DAS Barito, khususnya perairan Sungai Putih. Beberapa danau yang menjadi habitat ikan belida meliputi Danau Leke di Desa Marawan Lama, Danau Raya di Desa Baru Muara Talang, serta Danau Lagun, Danau Hampalan, dan Danau Besar di Desa Kalahien.

g. Pembuatan Stock Center Karang di Kalimantan Timur

Pembuatan *Coral Stock Center* dilaksanakan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan *Coral Stock Center* dan Survey Pemantauan Coral Bleaching di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaksanakan oleh tim dari BPSPL Pontianak dan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Maratua Peduli Lingkungan (MPL), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Maratua, TNI AL Pulau Maratua, PT. Surga Hijau Lestari (Green Nirvana Resort), dan PT. Pratasaba Apta (Pratasaba Resort).



Gambar 3.1.8-8. Pembuatan *Coral Stock Center* di Kalimantan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media pipa paralon berukuran 1 x 1 meter, dengan jumlah bibit pada masing-masing media berjumlah 16 fragmen bibit karang. Bibit karang diambil dari sekitar lokasi *Coral Stock Center* pada kedalaman sekitar 5-10 meter. Adapun titik peletakan rak transplantasi berada pada kedalaman 5-10 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan dari 10 (sepuluh) rak pipa paralon, jenis karang yang ditanam adalah *Acropora* spp., *Porites* sp., *Millepora* sp. dan *Hydnophora* sp. dengan jumlah fragmen mencapai 160 fragmen karang.



Gambar 3.1.8-9. Monitoring *Coral Stock Center* di Kalimantan Timur

Kegiatan monitoring *coral stock center* dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 oleh Kelompok Masyarakat Maratua Peduli Lingkungan bekerja sama dengan Green Nirvana Resort. Monitoring dilakukan kepada 160 fragmen karang hasil transplantasi pada bulan Februari 2024 oleh BPSPL Pontianak. Hasil pengukuran pertumbuhan panjang dan lebar fragmen karang dari jenis *Acropora* spp, *Porites* spp., *Hidnophora* sp., dan *Millepora* sp. menunjukkan rata-rata pertumbuhan panjang 0,5 – 1,5 cm dengan pertumbuhan lebar berkisar antara 0,2 – 0,5 cm. Tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) pada karang hasil transplantasi sebesar 88%.

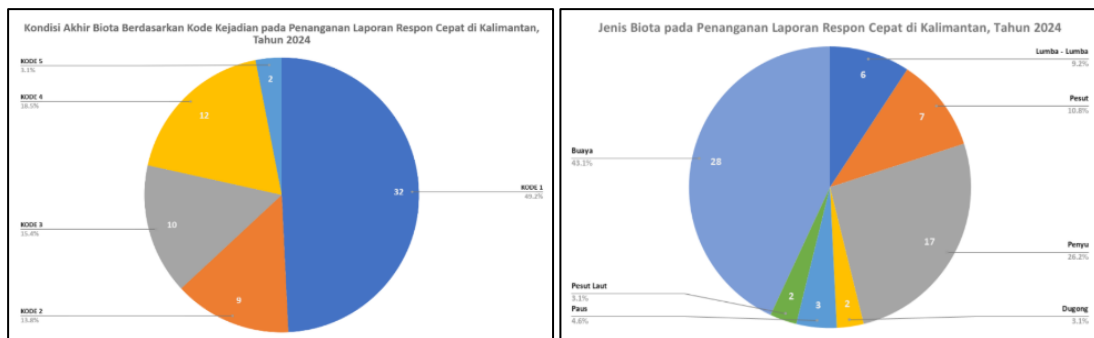
h. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah

Pelaksanaan kegiatan penanganan biota dilindungi dan/atau terancam punah dilakukan untuk menindaklanjuti laporan terkait permasalahan yang terjadi pada biota laut seperti kejadian terdampar, terjatir jarring dan tindakan penanganan lainnya. Metode pelaksanaan penanganan biota laut dilindungi disesuaikan dengan kondisi biota ditemukan. Penanganan biota yang ditemukan dalam keadaan hidup berupa diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Pada penanganan biota yang ditemukan dalam kondisi mati dapat dilakukan dengan cara dihanyutkan ke laut, dibakar, dikubur maupun ditenggelamkan ke laut.



Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Penanganan Biota Dilindungi

Sepanjang tahun 2024, tercatat 57 informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Sebanyak 33 ekor biota dilaporkan dalam keadaan mati, sementara sebanyak 32 ekor masih biota dilindungi ditemukan dalam keadaan hidup. Biota yang ditemukan dalam kondisi mati masih segar (kode 2) sebanyak 9 kejadian, biota yang ditemukan dalam kondisi mati mulai membusuk (kode 3) sebanyak 10 kejadian, biota yang ditemukan dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut (kode 4) sebanyak 12 kejadian, sedangkan biota yang ditemukan dalam bentuk kerangka (kode 5) sebanyak 2 ekor. Jenis biota laut dilindungi yang dilakukan penanganan paling banyak yaitu buaya muara (*Crocodylus porosus*) sebanyak 28 laporan kejadian. Sementara jenis biota laut dilindungi yang dilakukan penanganan paling sedikit yaitu dugong (*Dugong dugon*). Jenis lain yang dilakukan penanganan yaitu lumba – lumba, penyu, pesut air tawar, pesut laut dan paus.



Gambar 3.1.8-11. Grafik Penanganan Biota Dilindungi

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk penanganan biota dilindungi, BPSPL Pontianak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar pada tanggal 5 – 6 Juni 2024 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemaparan, diskusi dan praktek. Kegiatan ini mengundang beberapa stakeholder terkait dengan penanganan mamalia laut terdampar.



Gambar 3.1.8-12. Bimbingan Teknis Penanganan Biota Dilindungi

Selain itu, menindaklanjuti peralihan kewenangan beberapa spesies akuatik berdasarkan UU No 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, BPSPL Pontianak juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Respon Cepat Penanganan dan Pelepasliaran Buaya pada tanggal 11 November 2024 di kantor BPSPL Pontianak. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan dengan mengundang pemateri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

i. Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau Terancam Punah

Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah dilakukan dalam rangka memberikan kesadartahuan yang memadai terhadap masyarakat selaku bagian penting dari keberlanjutan upaya konservasi jenis ikan dilindungi/terancam punah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pertemuan langsung/tatap muka melalui penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan langsung beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.



Gambar 3.1.8-13. Sosialisasi Biota Dilindungi

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak lima kali di empat lokasi berbeda: Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Mei 2024, Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 Mei 2024, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2024 dan 29 – 30 Juni 2024, serta Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 22 – 24 Oktober 2024. Sebanyak 535 peserta telah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi biota dilindungi yang dilaksanakan, yang terdiri dari 339 orang laki-laki dan 196 perempuan. Peserta sosialisasi berasal dari pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta stakeholder terkait lainnya seperti NGO, TNI dan BKSDA.

j. Workshop Penilaian E-PANJI Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PANJI dilaksanakan pada tanggal 15-17 September 2024 di Hotel Ibis Style Bogor Raya, Kab. Bogor. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI) tahun 2024 serta yang menjadi 20 jenis ikan prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerangka penilaian E-PANJI memiliki kriteria dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang terbagi menjadi: input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 82,55 dengan kategori berkelanjutan.



Gambar 3.1.8-14. Workshop Penilaian E-PANJl

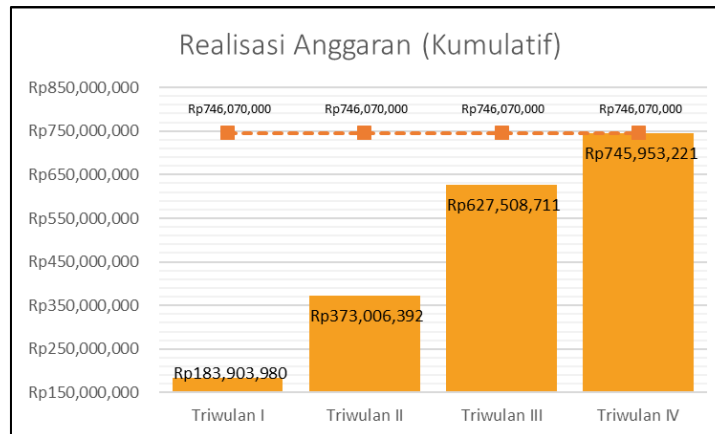
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8-3. Realisasi IKU 10 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp195.261.000	Rp195.202.352 (99,97%)	-
2.	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp122.793.000	Rp122.786.488 (99,99%)	-
3.	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp50.732.000	Rp50.687.512 (99,91%)	-
4.	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp377.284.000	Rp377.276.869 (100%)	-
TOTAL		Rp746,070,000	Rp745.953.221 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp745.953.221 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp746.070.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.



Gambar 3.1.8-15. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan penanganan jenis ikan dilindungi yang tedampar apabila ada kasus.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK-9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU-11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
	6	+2	4	120	5	120	20	40

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

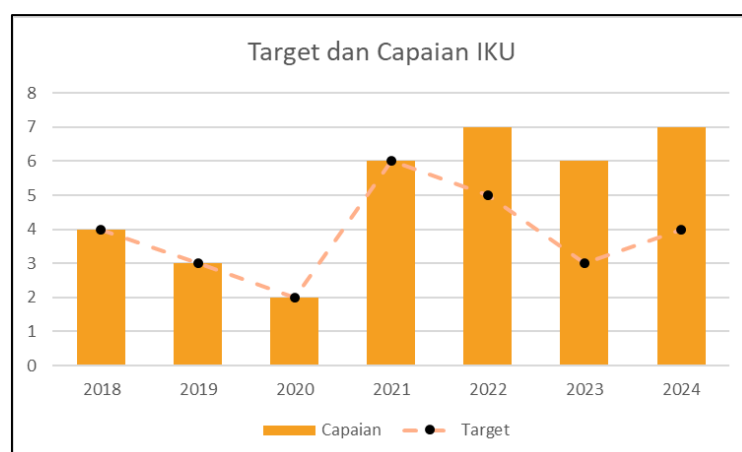
1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, realisasi IKU ini yaitu sebanyak 8 jenis meliputi Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Arwana Formosus, Arwana Brazil, Napoleon, Sidat, Belida dan Teripang. Terdapat empat jenis ikan yang menjadi IKU tambahan, yaitu Arwana Brazil, Napoleon, Belida dan Sidat. Persentasi capaian terhadap target perjanjian kinerja untuk IKU ini sebesar 120%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 2/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, Napoleon, Sidat, Belida, Arwana Formosus dan Arwana Brazil).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Formosus dan Arwana Brazil).
- Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang
- Evaluasi dan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 6 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (kumulatif 7 jenis), maka progres kegiatan mengalami peningkatan sebanyak 1 jenis atau sebesar 16,67% dari capaian pada Tahun 2023. Hal itu dikarenakan terdapat tambahan capaian jenis berupa Arwana Brazil, Napoleon dan Sidat. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, tren capaian mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2022 dan fluktuatif dari tahun 2022 – 2024.



Gambar 3.1.9-1. Grafik Capaian IKU 11 dalam 5 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah berperan sebesar 40% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah berperan sebesar 120% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNPB. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga

menghambat proses pemungutan PNB. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNB melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu inovasi yang dilakukan BPSPL Pontianak dalam rangka efisiensi pelayanan perizinan jenis ikan pada tahun 2024 yaitu melalui Formulir Elektronik Pemeriksaan Jenis Ikan (FORENSI). Merupakan formulir elektronik sederhana untuk membuat dokumen hasil pemeriksaan lapangan secara otomatis pada pemeriksaan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) di lingkup BPSPL Pontianak. Formulir ini dikembangkan dengan menggunakan form elektronik google secara gratis yang dilakukan otomatisasi ke dokumen pdf dengan menggunakan formulasi *python*, sehingga penyusunan lampiran berita acara dapat langsung dikerjakan dapat menggunakan ponsel pintar, di tempat dan saat itu juga. Formulir ini dapat mempersingkat waktu pelayanan khususnya pada pemeriksaan lapangan dengan output berupa berita acara. Efisiensi waktu sangat signifikan menjadi maks 1 jam dari sebelumnya mencapai 3 hari. Hal ini membuat penerbitan billing PNB dokumen SAJI di proses selanjutnya menjadi lebih cepat.

7. Kegiatan Pendukung

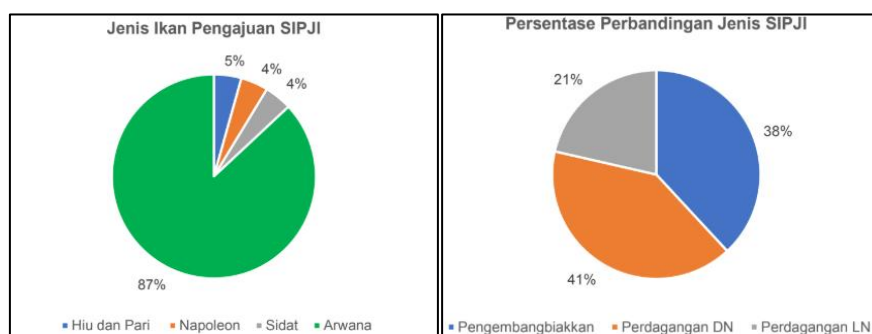
Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2024 pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal PKRL serta BPSPL Pontianak. Pelaksanakan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2024 telah dilakukan verifikasi SIPJI sebanyak 42 kali dari 23 pelaku usaha yang melakukan permohonan. Lokasi paling banyak pelaku usaha yang mengajukan verifikasi didominasi oleh Kalimantan Barat sebanyak 19 pelaku usaha, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 3 pelaku usaha dan Kalimantan Utara sebanyak 1 pelaku usaha.

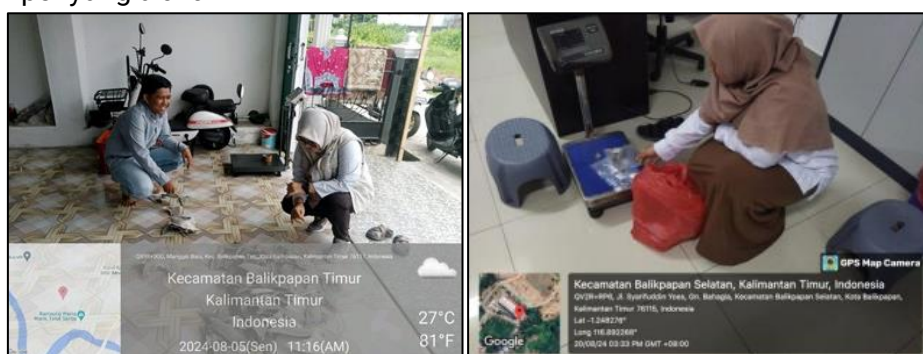


Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

Berdasarkan jenis SIPJI yang dimohonkan, terdapat tiga jenis SIPJI yaitu SIPJI pengembangbiakan sebanyak 38%, SIPJI perdagangan dalam negeri sebanyak 41% dan SIPJI perdagangan luar negeri sebanyak 21%. Sebagian besar pelaku usaha yang mengajukan SIPJI bergerak pada pemanfaatan jenis ikan arwana. Sementara hanya untuk jenis lainnya (hiu/pari, napoleon, sidat) hanya 4% dari keseluruhan verifikasi.

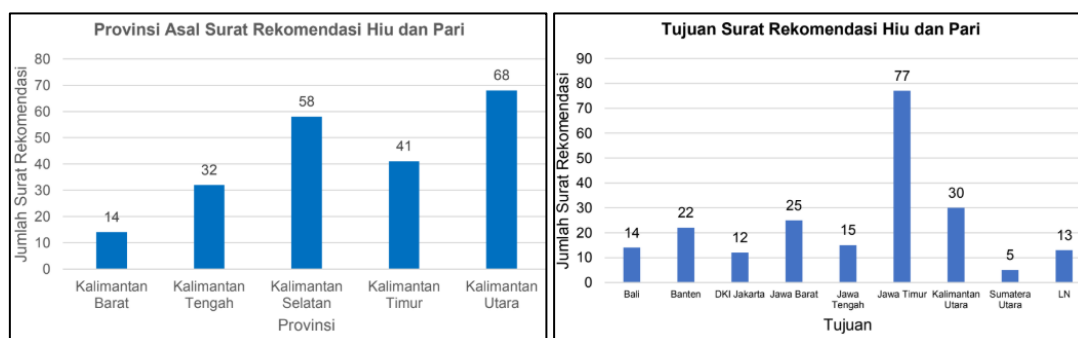
➤ Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.



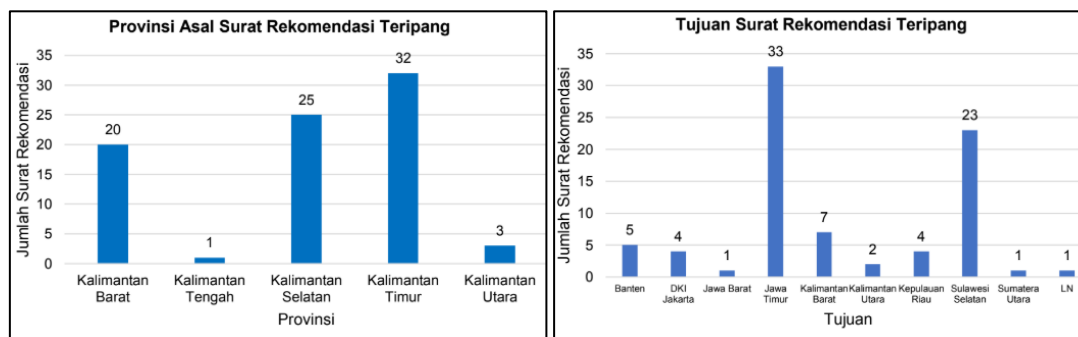
Gambar 3.1.9-3. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

Selama Tahun 2024 terdapat total 213 Surat Rekomendasi hiu pari dan 81 Surat Rekomendasi Teripang telah diterbitkan oleh BPSPL Pontianak. Surat rekomendasi hiu/pari paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Utara sebanyak 68 surat, sementara surat rekomendasi hiu/pari paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi hiu/pari didominasi untuk dalam negeri (DN) sebanyak 200 surat dengan provinsi Jawa Timur menjadi tujuan dalam negeri (DN) yang paling banyak sebesar 77 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Terdapat 27 jenis hiu dan pari *look alike species* yang dikirimkan pada tahun 2024 dengan *Maculabatis gerardi* (Pari Bintang) menjadi spesies paling banyak dikirimkan.



Gambar 3.1.9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Hiu dan Pari

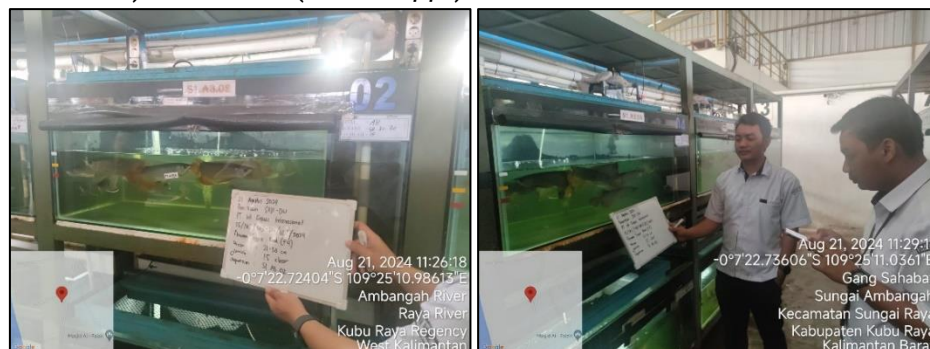
Surat rekomendasi teripang paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 32 surat, sementara surat rekomendasi teripang paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 1 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi teripang didominasi untuk dalam negeri (DN) sebanyak 80 surat dengan provinsi Jawa Timur menjadi tujuan dalam negeri (DN) yang paling banyak sebesar 30 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Terdapat 35 jenis teripang yang dilalulintaskan pada tahun 2024 dengan jenis *Holothuria scabra* (Teripang Pasir) menjadi jenis paling banyak dikirimkan.



Gambar 3.1.9-5. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Teripang

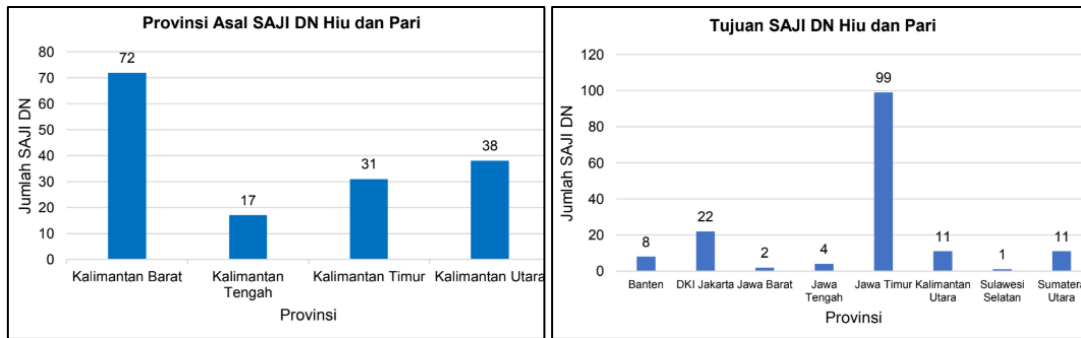
➤ *Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)*

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Tahun 2024 terdapat 158 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 1.966 SAJI DN untuk jenis Arwana *Scleropages formosus* telah diterbitkan, 173 SAJI DN untuk Arwana *Osteoglossum bicirrhosum* (Arwana Brazil). Selain itu terdapat penerbitan SAJI DN untuk jenis Napoleon (*Chellinus undulatus*) dan Belida (*Chitala spp.*).



Gambar 3.1.9-6. Pemeriksaan SAJI

SAJI DN hiu/pari paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 72 surat, sementara SAJI DN hiu/pari paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 17 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN hiu/pari didominasi oleh pengiriman ke Provinsi Jawa Timur sebanyak 99 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak satu surat. Terdapat 23 spesies hiu dan pari Apendiks CITES yang dikirimkan pada tahun 2024 dengan *Rhynchobatus springeri* (Pari Kemejan) menjadi spesies paling banyak dikirimkan.



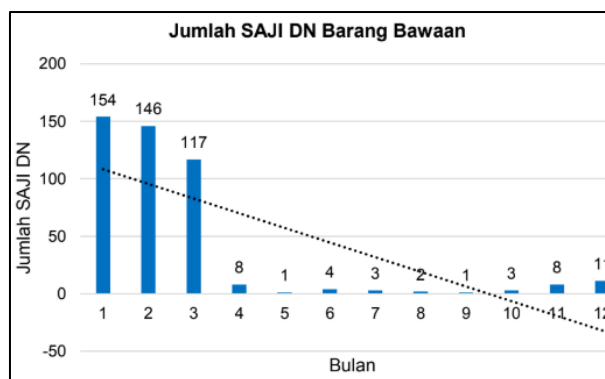
Gambar 3.1.9-7. Grafik Pengiriman SAJI DN Hiu dan Pari

Penerbitan SAJI DN Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) didominasi untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 1.940 surat, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Selatan sebanyak 5 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak ditujukan ke DKI Jakarta sebanyak 617 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi di wilayah Timur Indonesia sebanyak masing-masing satu surat. Terdapat 3 jenis strain (varian) Arwana Kalimantan yang dikirimkan sepanjang tahun 2024 dengan Arwana Super Red menjadi varian yang paling banyak dikirim sebanyak 50.303 ekor. Penerbitan SAJI DN Arwana Brazil (*Osteoglossum bicirrhosum*) seluruhnya berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 173 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Brazil paling banyak ditujukan ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 101 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau sebanyak masing-masing satu ekor. Jumlah ikan Arwana Brazil yang dikirimkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 276.626 ekor.

Jenis ikan lain yang diterbitkan SAJI pada tahun 2024 yaitu jenis napoleon (*Cheilinus undulatus*) sebanyak satu surat dan jenis belida (*Chitala lopis*) sebanyak satu surat. SAJI untuk jenis napoleon berupa SAJI perdagangan yang dikirimkan dari Kalimantan Timur ke Sulawesi Selatan sebanyak 28 ekor. Pemanfaatan napoleon masih tergantung dengan sisa stok yang berada di gudang pelaku usaha hasil pembesaran, hal tersebut karena nilai NDF dari napoleon masih negative, sehingga pemanfaatan dari alam tidak diperkenankan. Sementara SAJI untuk jenis belida berupa SAJI untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sebanyak 70 ekor yang dikirimkan dari Kalimantan Selatan ke Jawa Timur.

➤ Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

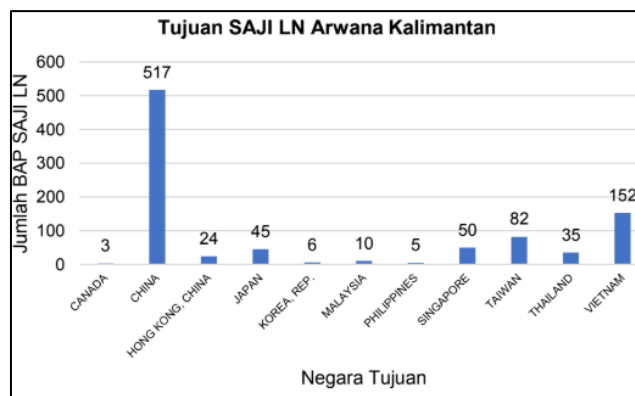
Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Pada tahun 2024, sebanyak 458 SAJI DN Barang Bawaan telah diterbitkan. Jumlah SAJI DN Barang Bawaan paling banyak terdapat pada bulan Januari – Maret dengan jumlah lebih dari 100 surat setiap bulannya. Namun, jumlah penerbitan menurun tajam pada bulan berikutnya hingga kurang dari 20 surat tiap bulannya. Hal tersebut karena penambahan persyaratan berupa tiket pesawat guna mencegah penyalahgunaan SAJI DN barang bawaan.



Gambar 3.1.9-8. Grafik Pengiriman SAJI DN Barang Bawaan

➤ *Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*

Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama tahun 2024 terdapat 919 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 250 surat. Negara dengan tujuan ekspor terbanyak didominasi oleh yaitu China dengan 517 surat, kemudian Vietnam dengan 152 surat dan Taiwan dengan 82 surat. Negara dengan tujuan ekspor paling sedikit yaitu Kanada sebanyak 3 ekor.



Gambar 3.1.9-9. Grafik Pengiriman SAJI DN Barang Bawaan

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan 557 pemeriksaan penandaan.



Gambar 3.1.9-10. Penandaan Arwana

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 2.795 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim sebanyak 846.400.



Gambar 3.1.9-11. Pemeriksaan keberangkatan

➤ *Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat*

Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakkan dan bukan berasal dari tangkapan alam. Pada tahun 2024, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 586 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Lokasi verifikasi hasil pemanenan paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan barat untuk 168.527 ekor ikan arwana. Sementara lokasi verifikasi hasil panen paling sedikit dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 214 ekor.

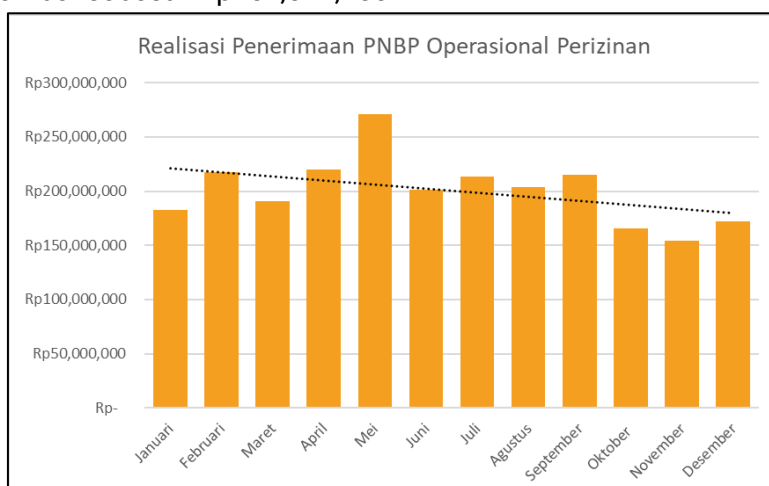
Tabel 3.1.9-2. Jumlah BAP Panen Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah BAP	Jumlah Ikan (Ekor)	Jumlah Pelaku Usaha
1	Kalimantan Barat	581	168.527	42
2	Kalimantan Selatan	2	725	1
3	Kalimantan Timur	3	214	1

Sepanjang tahun 2024, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 67.688 sertifikat. Penerbitan sertifikat paling banyak dilakukan pada bulan Januari sebanyak 10.976 sertifikat. Sementara penerbitan paling sedikit berada di bulan Agustus sebanyak 2.615 sertifikat. Berdasarkan strain (varian) arwana. Jenis *super red* paling banyak diterbitkan sertifikatnya sebanyak 65.975 sertifikat, diikuti *banjar red* sebanyak 1.382 sertifikat, *green* 318 sertifikat dan *golden red* 13 sertifikat.

➤ **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

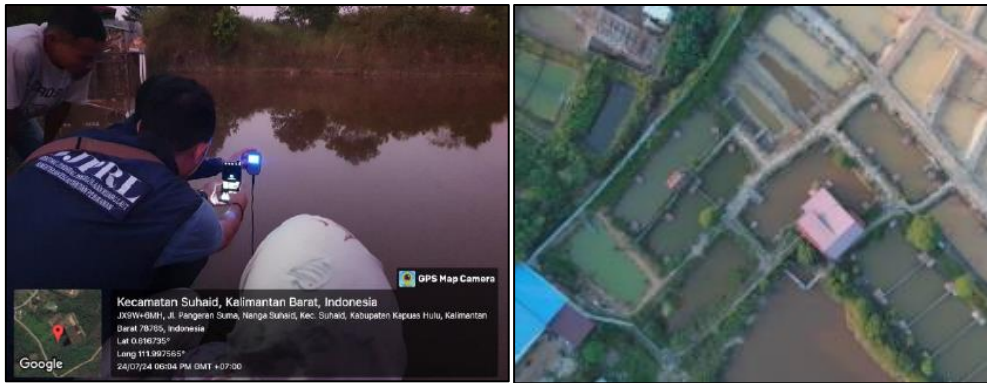
Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan tahun 2024 (Kumulatif) sebesar Rp2,406,675,241. Tren penerimaan PNBP bulanan pada tahun 2024 cenderung menurun dengan fluktuasi tiap bulannya. Rata-rata aritmatik penerimaan PNBP Operasional Perizinan sebesar Rp200,556,270 tiap bulannya. Nilai PNBP tertinggi pada tahun 2024 didapatkan pada bulan Mei sebesar Rp271,112,140, sementara terendah didapatkan pada bulan November sebesar Rp154,071,780.



Gambar 3.1.9-12. Grafik Pendapatan PNBP

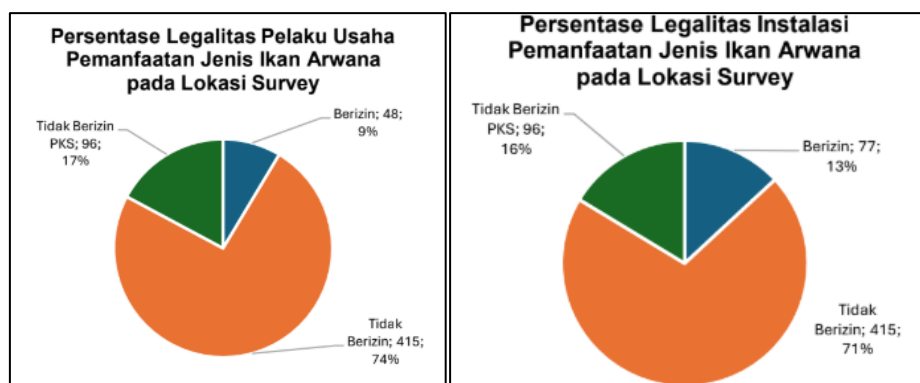
b. Survei Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat

Kegiatan Survey Pemanfaatan Arwana bertujuan untuk mengetahui sebaran dan jeni pemanfaatan arwana, mengetahui data potensi produksi hasil pengembangbiakan, mengetahui alur perdagangan arwana dan mengetahui laju pertumbuhan arwana di Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertahap selama kurun waktu Juli – November 2024. Lokasi kegiatan survey pemanfaatan arwana dilakukan di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan *purposive sampling* atau berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu. Selain itu, dilakukan pengumpulan data spasial pengambilan titik koordinat dan foto udara menggunakan *drone* pada *farm* arwana di lokasi survey. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif data hasil wawancara, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) dan analisis laju pertumbuhan spesifik.



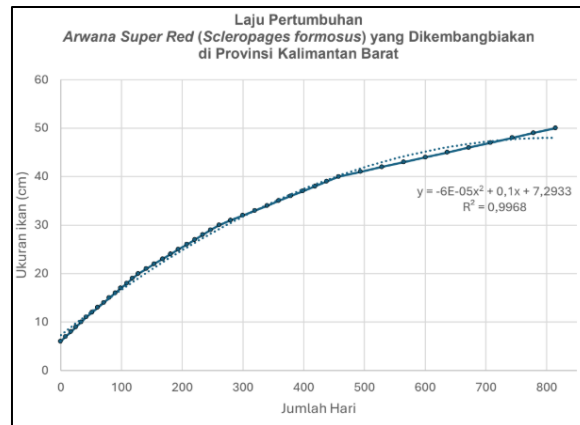
Gambar 3.1.9-13. Survei Pemanfaatan Arwana

Dari hasil pengumpulan data di lapangan, terdapat 588 instalasi yang dimiliki oleh 559 pelaku usaha dengan hanya 9% yang telah memiliki izin. Sebanyak 17% pelaku usaha melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain yang telah memiliki izin dan 74% sisanya tidak memiliki izin. Tingginya pelaku usaha yang tidak memiliki izin disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingginya permintaan pasar dan kurangnya pengawasan penegakan hukum. Sebaran lokasi instalasi dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, infrastruktur dan kemudahan akses pasar. Alur distribusi arwana di Kalimantan Barat mencerminkan kompleksitas rantai pasok yang melibatkan berabagai actor dan wilayah. Daerah hulu menjadi pusat utama produksi benih yang kemudian dipasok ke Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak sebagai pusat pembesaran dan pembentukan ikan sebelum dikirim ke pasar domestic maupun internasional.



Gambar 3.1.9-14. Persentase Legalitas Pemanfaatan Jenis Ikan Arwana

Pada survei pemanfaatan arwana tahun 2024 yang melibatkan 16 pelaku usaha di Kapuas Hulu, Kubu Raya, Mempawah, Sekadau, dan Sintang, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) menunjukkan nilai berkisar antara 104 hingga 12.312 ekor, dengan PD. Dian Ardyka mencatatkan PPHP tertinggi sebesar 12.312 ekor, sedangkan kategori perorangan tertinggi diraih oleh Sudiono dengan 2.117 ekor. Beberapa perusahaan seperti PT. Jaya Arwana Indonesia, CV. Lucky Indo Aquatic, PT. New Borneo Arwana, dan PD. Dian Ardyka telah memiliki BMP berdasarkan audit PPHP 2023, dengan nilai masing-masing 8.554, 7.584, 3.888, dan 4.099 ekor. Dibandingkan dengan hasil survei tahun 2024, terjadi peningkatan produksi di tiga perusahaan, yaitu PT. Jaya Arwana Indonesia dari 8.554 menjadi 11.907 ekor (+3.353), CV. Lucky Indo Aquatic dari 7.584 menjadi 8.165 ekor (+581), dan PD. Dian Ardyka dari 4.099 menjadi 12.312 ekor (+8.213), sedangkan PT. New Borneo Arwana mengalami penurunan dari 3.888 menjadi 2.722 ekor (-1.166).

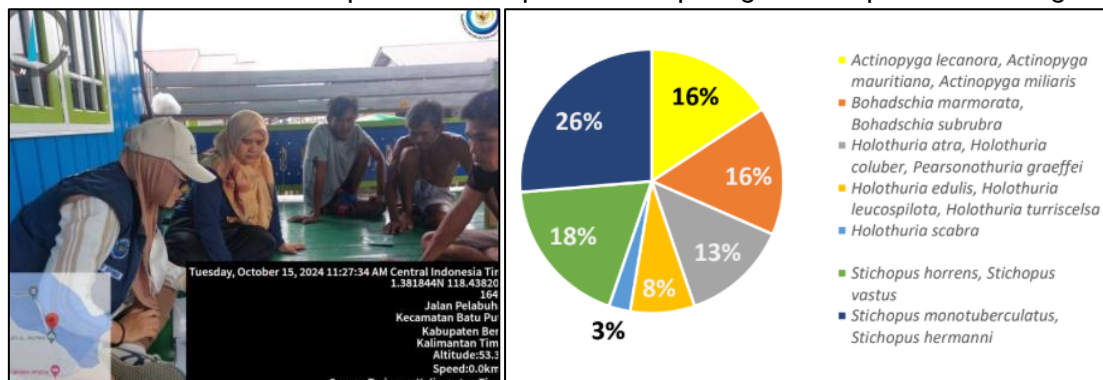


Gambar 3.1.9-15. Kurva Laju Pertumbuhan Arwana Super Red di Kalimantan Barat

Hasil wawancara dengan pelaku usaha arwana di Kalimantan Barat menunjukkan laju pertumbuhan spesifik arwana *Super Red* pada berbagai stase ukuran: 1–11 cm sebesar 1,178 mm/hari, 12–20 cm sebesar 1,055 mm/hari, 21–30 cm sebesar 0,752 mm/hari, 31–40 cm sebesar 0,507 mm/hari, dan 41–50 cm sebesar 0,280 mm/hari. Kurva pertumbuhan arwana *Super Red* yang dibudidayakan digambarkan menggunakan model polinomial dengan persamaan $y = 6 \times 10^{-5}x^2 + 7,2933$ dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 9,9968. Nilai R^2 yang sangat mendekati 1 menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam menjelaskan pola pertumbuhan ikan arwana berdasarkan data yang diamati.

c. Survei Pemanfaatan Teripang di Kalimantan Timur

Kegiatan survey pemanfaatan teripang bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis teripang dan potensi ekonomi dari yang pemanfaatan teripang di Kabupaten Berau. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 19 Oktober 2024 di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan *purposive sampling* atau berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu. Dari hasil wawancara, terdapat 15-17 jenis teripang yang umum dibeli dari nelayan. Jenis teripang yang dominan diperdagangkan yaitu jenis teripang gamat batu/gamat buku (*S. monotuberculatus* dan *S. hermanni*). Jenis ini juga memiliki harga yang paling tinggi dibandingkan dengan teripang lainnya, berkisar antar Rp10.000 – Rp50.000 per kg dalam kondisi basah dan Rp800.000 – Rp1.500.000 per kg setelah produk dikeringkan.



Gambar 3.1.9-16. Survei Pemanfaatan Teripang

d. Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang

Kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPSPL Pontianak secara daring dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai peningkatan kapasitas pegawai BPSPL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan verifikasi SAJI maupun Rekomendasi. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai etika pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Diklat Aparatur (BDA) KKP Sukamandi. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.



Gambar 3.1.9-17. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai biologi, identifikasi pemanfaatan dan status perlindungan teripang dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Disampaikan bahwa teripang merupakan salah satu famili dari timun laut, yaitu famili *Holothuriidae*. Dalam penentuan jenis teripang, salah satu bagian tubuh yang dapat dijadikan acuan yaitu spikula (kerangka dalam yang terletak di dalam teripang). Teripang umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk memperbaiki stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis teripang yang masuk ke dalam Appendix CITES, yaitu *Holothuria fuscogilva*, *Holothuria nobilis*, *Holothuria Whitmaei*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, dan *Thelenota rubralienata*. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi teripang dan post-test sebagai evaluasi kegiatan.

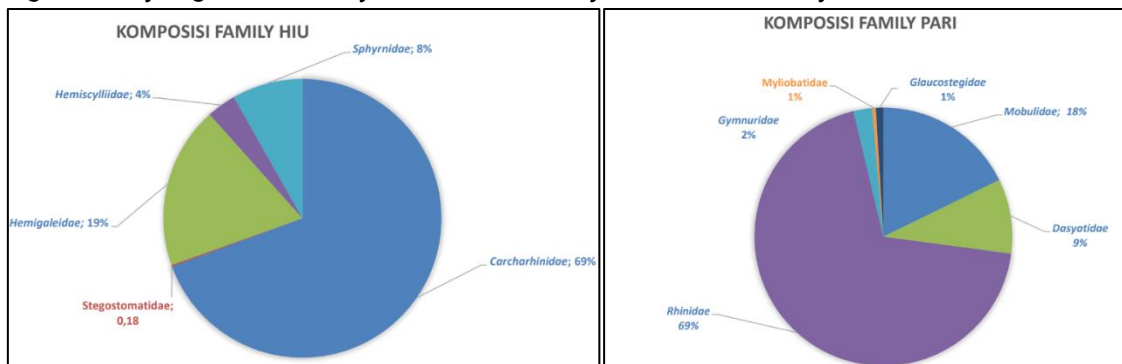
k. Enumerasi/Pendataan Hiu Pari Apendiks

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Januari – Desember 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap lokasi:

➤ Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPN Pemangkat pada periode Januari – Desember, didapatkan total 1.704 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 73,68%. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 1.182 ekor. Sementara itu, sebanyak total 221 ekor pari didaratkan sepanjang tahun 2024 dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 42% ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 154 Ekor. Jenis hiu

yang paling sedikit didaratkan yaitu dari family *Sphyrnidae* sebanyak 140 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Myliobatidae* sebanyak 1 ekor.



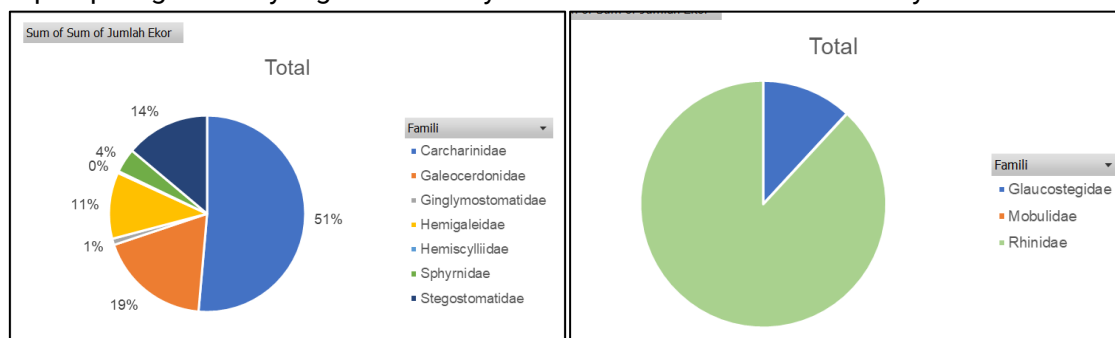
Gambar 3.1.9-18. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat



Gambar 3.1.9-19. Dokumentasi pengukuran

➤ Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

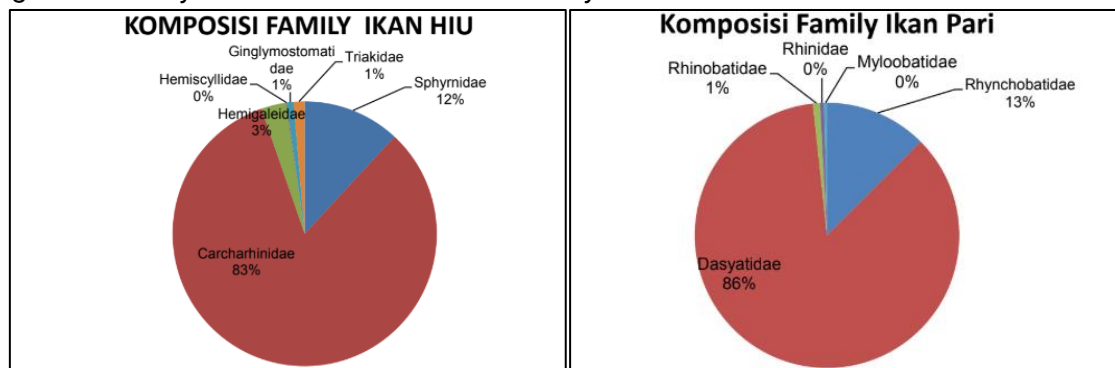
Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode Januari – Desember, didapatkan total 677 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 354 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 346 ekor. Sementara itu, sebanyak total 36.966 ekor pari didaratkan sepanjang tahun 2024 dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 16.594 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 14.617 Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari family *Sphyrnidae* sebanyak 27 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Mobulidae* sebanyak 5 ekor.



Gambar 3.1.9-20. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

➤ *Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPI Manggar*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPI Manggar pada periode Januari – Desember, didapatkan total 3.778 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 3.577 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 3.127 ekor. Sementara itu, sebanyak total 583 ekor pari didaratkan sepanjang Tahun 2024 dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 81 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili *Rhynchobatidae* sebanyak 73 Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari famili *Hemiscylliidae* sebanyak 4 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 3 ekor.



Gambar 3.1.9-21. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar



Gambar 3.1.9-22. Dokumentasi Pengukuran

e. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, apendiks CITES dan *look alike species* diantaranya:

➤ *Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan*

Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan dilakukan secara rutin setiap bulan dalam rangka membahas perkembangan peraturan dan tata niaga perdagangan jenis ikan dilindungi, apendiks CITES dan *look alike species*.

➤ *Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Apendiks CITES Hasil Pengembangbiakan*

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 26 September dengan melibatkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk Kalimantan Barat. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan perpindahan tusi dari KLHK ke KKP untuk beberapa jenis dapat berjalan secara lancar pasca perpindahan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mencari

informasi kendala yang dihadapi untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan tata kelola, menjangring informasi dari pelaku usaha dan tinjauan ke lapangan.



Gambar 3.1.9-23. Pemantauan dan Peninjauan Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.REB.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp184,882,000	Rp178,492,828 (96,54%)	-
2.	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp1,072,848,000	Rp1,072,570,122 (99,97%)	-
TOTAL		Rp1,257,730,000	Rp1,251,062,950 (99,46%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp1.251.062.950 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp1.257.730.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan gender yang terlibat dalam pelayanan operasional jenis ikan dilindungi. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pelayanan BPSPL Pontianak sesuai dengan Surat Tugas tim pelayanan nomor B.2793/BPSPL.2/KP.440/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melaksanakan pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan tahun 2025.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan tidak terdapat IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan IKU ini dikarenakan untuk mengakomodir anggaran Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diturunkan ke UPT

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak

Tabel 3.1.10 1. Capaian IKU 12 NDI BPSPL Pontianak								
SK-10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
	-	1	-	1	100	1	100	5

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen berupa Laporan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, sehingga persen realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU “Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak”. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Terdapat perbedaan satuan antara target yang tertuang dalam Renstra

DJPkRL dengan target kinerja tahun 2024 sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun, pencapaian IKU ini masih berkontribusi dalam pencapaian target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebesar 1 dokumen pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen telah berkontribusi sebesar 100% dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh keaktifan pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Telah dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan pada pelaksanaan IKU ini yaitu penggunaan *zoom meeting* dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan ALSE. Hal ini membantu menjaring peserta lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini yaitu:

a. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 orang yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan stakeholder terkait. Saat ini, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sedang direvisi, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya. Contoh perizinan berusaha di bidang jasa kelautan antara lain izin pemanfaatan pasir laut, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut dan izin-izin lainnya. Pemanfaatan ALSE dibagi menjadi dua KBLI: 36001 (penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum) dan 36001 (penampungan dan penyaluran air baku). Dokumen dan persyaratan khusus merujuk pada merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Perizinan Berusaha Jasa Kelautan

b. Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kegiatan identifikasi di Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 September 2024 pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Singkawang, PT GCL Indo Tenaga yang berlokasi di Kab. Mempawah dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Mempawah. Sebelum kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan menyampaikan jenis-jenis pemanfaatan ALSE, KBLI yang digunakan, dasar hukum, gambaran umum pemanfaatan ALSE, pembagian kewenangan dan tarif PNBP.



Gambar 3.1.10-2. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat peraga berupa kuisisioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya: tujuan pemanfaatan ALSE, kapasitas pemanfaatan ALSE, metode dan teknologi yang digunakan, sarana yang digunakan, waktu operasi dan intensitas dan tenaga kerja yang digunakan. Dari hasil wawancara pada ketiga perusahaan tersebut, didapatkan informasi bahwa tujuan dari pemanfaatan ALSE yaitu untuk bahan baku pembuatan uap, metode demineralisasi, air pendingin kompresor dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALSE ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan profil pemanfaatan ALSE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.10-3. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Kegiatan identifikasi pemanfaatan ALSE di Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Identifikasi dilakukan pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan dan PT Kutai Refinery Nusantara. Pemanfaatan air laut selain energi yang dilakukan PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan digunakan sebagai sistem pendingin kondensor (cooling water), siklus produksi dan kebutuhan domestik/service water. Sedangkan Pemanfaatan air laut selain energi yang dilakukan PT Kutai Refinery Nusantara yaitu air baku sebagai bahan baku pembuatan uap, metode demineralisasi dan sebagai air pendingin kondensor.

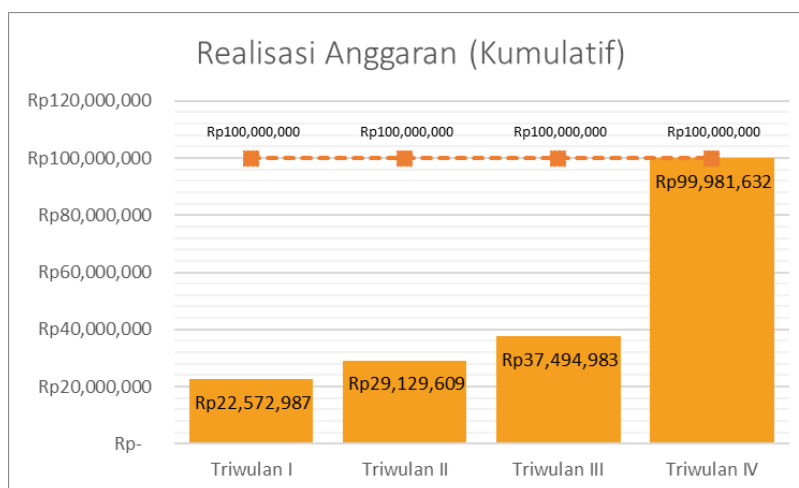
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2363.PBW.002.052] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp99.981.632 (99,98%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.981.632 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.981.632 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.10-4. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan IKU ini masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat beberapa perempuan terlibat baik hadir dalam sosialisasi maupun dari pihak pelaku usaha yang diidentifikasi.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK-11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU-13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	4	-	4	100	4	100	5	80

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat BPSPL Pontianak Nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut telah dilaksanakan di 4 lokasi wilayah kerja BPSPL Pontianak yaitu Kota Balikpapan, Kab. Tanah Laut, Kab. Kubu Raya dan Kota Singkawang. Persentase capaian terhadap target IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak” merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL sebesar 80%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU ini telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 4 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor aksesibilitas lokasi yang mudah diakses juga mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

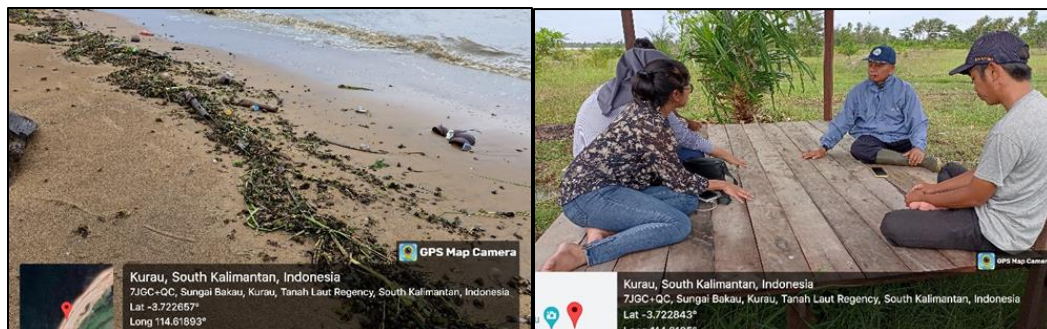
7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024. Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan di Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 16 – 18 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.



Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

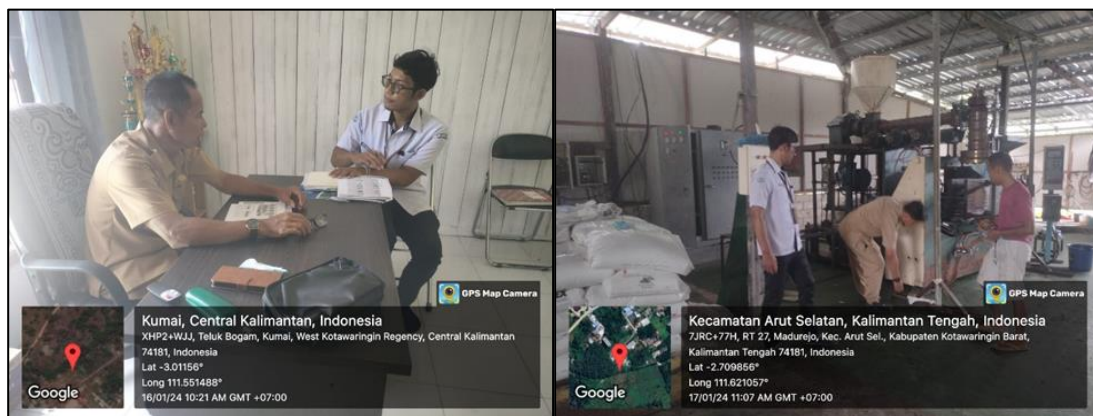
Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapak Besar, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengelola sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggian Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model economy sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 80 nelayan dan KUB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/ pengepul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra *offtaker* potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan terendah dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.



Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.



Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota

Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapak Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPRKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Galak Super	10
	KUB Kakap Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

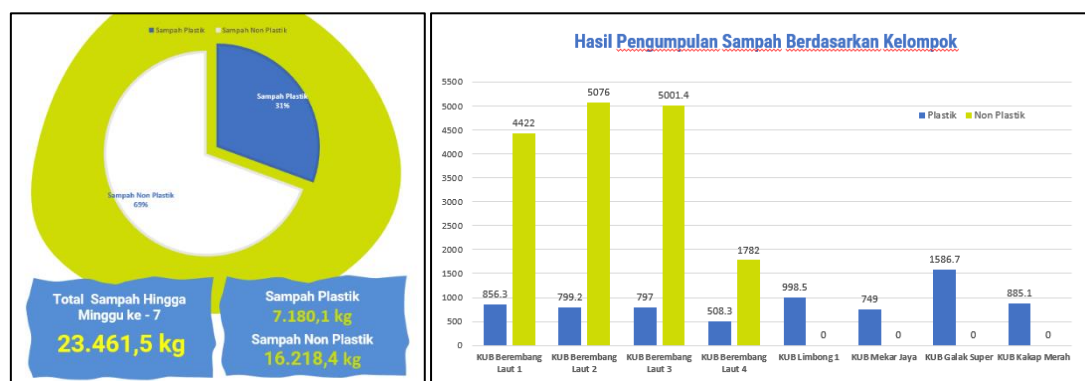
Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengelolaan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

➤ *Kegiatan Penimbangan dan Evaluasi Pelaksanaan*

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.863.000. KUB Berembang Laut II menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.875,2 kg.



Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya

d. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Surya Perdana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mutiara	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bawal	10
	KUB Barakuda	10

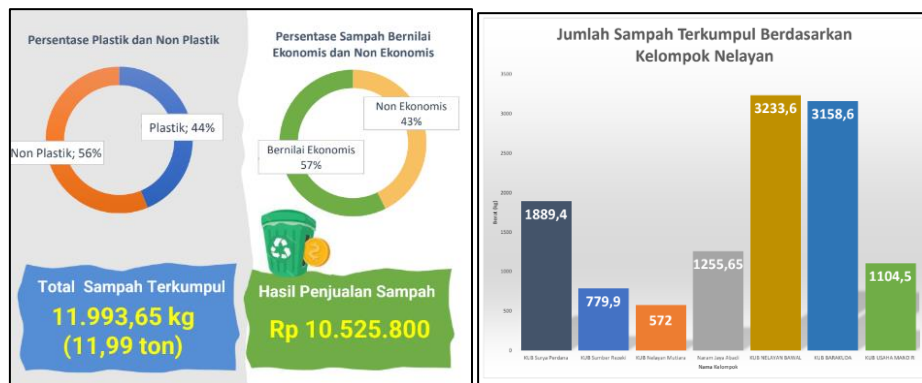
➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.993,65 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 57% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.525.800. KUB Nelayan Bawal menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.233 kg.



Gambar 3.1.11-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

e. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Citra Lestari	34
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.860,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.393 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.11-10. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut

f. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggian sebanyak 80 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggian	KUB Minasari	26
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Seraya	18
	KUB Lee Batakan Fajar	12
	KUB Anugrah Sinergi	12

➤ *Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah*

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengelolaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.



Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta laut di Kabupaten Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,18 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.000.



Gambar 3.1.11-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

h. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 6,87 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.525.800.



Gambar 3.1.11-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

i. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.196.950.



Gambar 3.1.11-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

j. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggian sebanyak 80 orang). Kegiatan ini juga bemitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,84 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.161.700.



Gambar 3.1.11-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

k. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,348 kg di Pantai Singka; 7,887 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,619 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, foam/bus, kertas, kain, kaca dan logam.



Gambar 3.1.11-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

l. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebusus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik sisa kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya.



Gambar 3.1.11-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

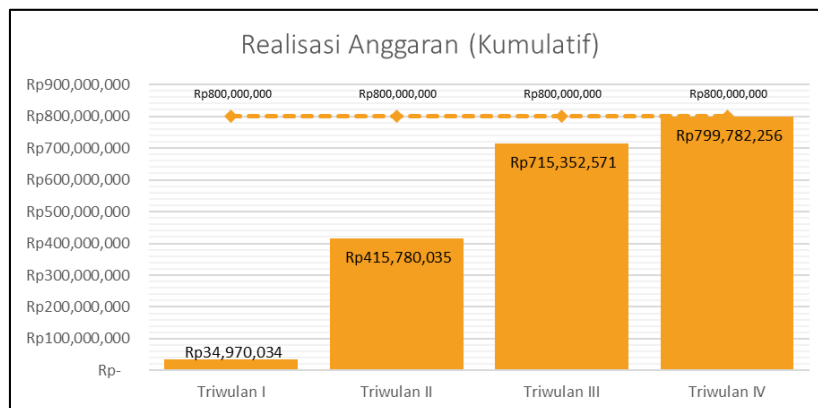
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitas Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp799.782.256 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada keseluruhan kegiatan gernas BCL masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat keterlibatan perempuan sebesar 14% dalam Gernas BCL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gernas BCL berupa keterlibatan dalam kepanitian kegiatan, pemberian materi dan evaluasi kegiatan.



Gambar 3.1.11-19. Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL

Pada pelaksanaan Gernas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Secara umum, pertanyaan dan saran/masukan didominasi oleh peserta laki-laki. Ketimpangan penyampaian aspirasi ini karena sebanyak 320 nelayan yang menjadi peserta Gernas BCL semuanya laki-laki. Perempuan yang mengajukan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Gernas BCL ini yaitu peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pesisir baik laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait dengan keberlanjutan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2024.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
93,03	94,98	+1,95	93,76	101,3	90	105,5	90	105,5

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

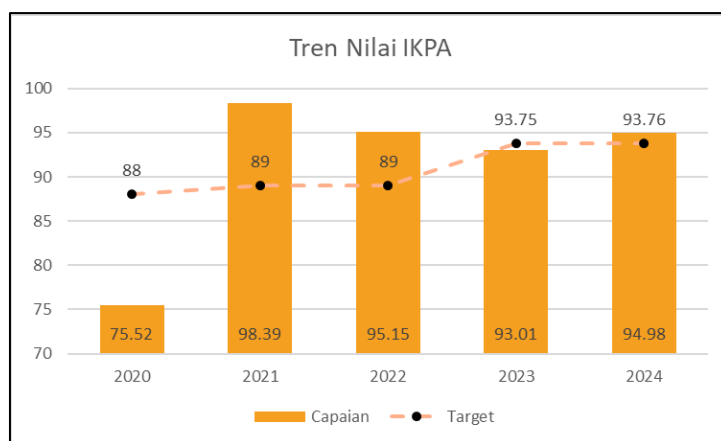
1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini tahun 2024 dilakukan secara semesteran. Berdasarkan hasil pemantauan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulanan pada situs OMSPAN, progres Nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 94,98 dengan kategori baik. Capaian IKM nilai IKPA disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor

196/SJ.2/RC.610/I/2025. Secara umum capaian pada tahun 2024 telah mencapai target tahunan sebesar 93,76 atau tercapai sebesar 101,3%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai IKPA pada tahun 2023 sebesar 93,03. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,95 atau meningkat sebesar 2,09%. Peningkatan nilai tersebut dikarenakan terdapat peningkatan pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan tren target dan capaian Nilai IKPA selama 5 tahun terakhir, nilai IKPA tahun 2024 berada pada nilai tengah (median). Nilai IKPA tertinggi didapatkan pada tahun 2021 sebesar 98,39 sementara nilai IKPA terendah didapatkan pada tahun 2020 sebesar 75,52. Tren target dan capaian nilai IKPA selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.1.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

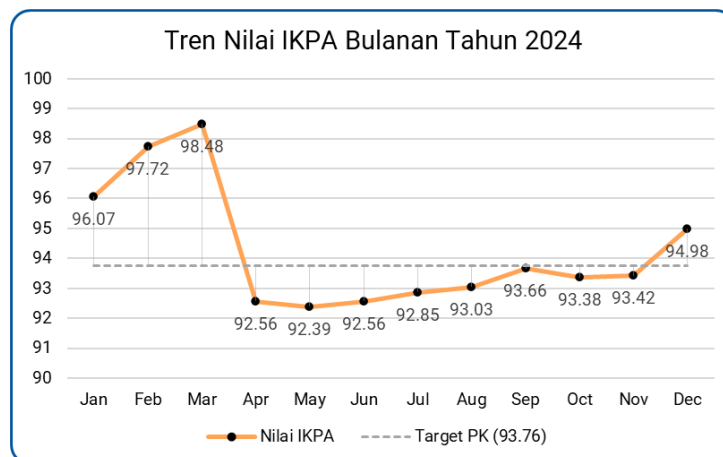
Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Progres Capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 105,53% (94,98 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu Nilai IKPA sebesar 92 untuk tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024 sebesar 103,32% (94,98 dari 92). Capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.



Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

Selain itu, berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak, terdapat rekomendasi untuk melakukan pemantauan IKPA secara rutin setiap bulan hingga akhir Tahun. Berdasarkan hasil pemantauan, Tren bulanan nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami penurunan tajam pada bulan Maret ke bulan April. Namun, nilai IKPA mengalami peningkatan secara perlahan dari bulan Mei hingga melebihi target pada bulan Desember. Nilai IKPA tertinggi dicapai pada bulan Maret dengan nilai 98,48 sementara nilai IKPA terendah didapatkan pada bulan Mei dengan nilai 92,39.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

a. Revisi DIPA

- 1 (satu) kali pada 30 Januari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK).
- 1 (satu) kali pada 13 Februari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 15 Maret 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 22 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Halaman III DIPA)
- 1 (satu) kali pada 29 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 3 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 11 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi DJA)
- 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 12 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 5 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)

- 1 (satu) kali pada 20 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
 - 1 (satu) kali pada 9 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
 - 1 (satu) kali pada 29 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
 - 1 (satu) kali pada 14 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi DJA)
 - 1 (satu) kali pada 20 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
 - 1 (satu) kali pada 29 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
 - 1 (satu) kali pada 17 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Kanwil)
 - 1 (satu) kali pada 21 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK)
 - 2 (dua) kali pada 25 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK)
 - 1 (satu) kali pada 26 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK dan Pemutakhiran KPA)
- b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.739.996.019 atau 98,59% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp19.008.625.000 (Sumber Data: OMSPAN per 31 Desember 2024)
- c. Data Kontrak sebanyak 27 sepanjang tahun 2024 (bulan Januari – Desember):
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.26/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 3 Unit Xpander selama 1 Tahun sesuai SP.27/BPSPL.2/PPK/SP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 1 Unit Fortuner selama 1 Tahun sesuai SP.28/BPSPL.2/PPK/SP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Putussibau sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Mahakam Hulu sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.35/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.37/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Komunikasi Pelayanan sebanyak 1 Unit sesuai SP.39/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.

- Belanja Keperluan Perkantoran - Pengadaan Seragam Pegawai BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 95 Stel sesuai SPK.40/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kapal dan Longboat sebanyak 2 Paket sesuai SPK.42/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.45/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya - Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.46/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai SP.51/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 54/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
 - Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-B/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
 - Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
 - Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
 - Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KIOSK sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
 - Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebanyak 1 Paket sesuai SP.59/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket sesuai SPK.61/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
 - Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Januari s.d. Desember 2024.
 - Pembayaran atas Belanja Bahan
 - Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.
- d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan
- e. Penyelesaian UP sebanyak 2 kali dan TUP 3 kali
- f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) periode Juli – September 2024
- g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran:
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Penyesuaian Target dan Pagu Penggunaan PNPB TA 2025 pada 3 – 5 Januari 2024 di Mercure Hotel Cikini Jakarta.
 - Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.527/DJPKRL.1/TU/140/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNPB lingkup Ditjen PKRL melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.198/BPSPL.2/KU.440/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNPB di BPSPL Pontianak.
 - Menghadiri kegiatan Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 dan Manual IKU DJPKRL 2024 pada 17 – 18 Januari 2024 secara daring berdasarkan Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.239/DJPKRL.1/TU.330/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Lingkup DJPKRL.
 - Menghadiri kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi pada 25 – 26 Januari 2024 di Mercure Bandung City Centre Bandung berdasarkan Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.559/DJPKRL.1/TU.330/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Dialog

Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan Pagu PNBP Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.

- Menghadiri undangan pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 12 Februari 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Nomor S-377/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Penyampaian Informasi Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.
- Menghadiri undangan Sekretaris DJPRL Nomor B.1255/DJPKRL.1/TU.330/II/2024 hal Undangan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan DJPKRL yang dipantau KSP dan Penetapan Kegiatan yang Termasuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 28 Februari 2024 secara daring.
- Menghadiri pembahasan penggunaan PNBP SDA 2024 pada 20 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1056.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1416/DJPKRL.1/HK.410/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Persuratan dan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL.
- Menghadiri pembahasan Rencana Revisi Pencairan Blokir (RSPP) dan Percepatan Penarikan PHLN Lautra secara daring pada 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1481/DJPKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Perubahan Waktu Rapat Koordinasi Revisi DIPA DJPKRL.
- Melakukan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1104/BPSPL.2/PL.750/IV/2024 tanggal 18 April 2024 hal Permohonan Hibah Aset Tanah untuk UPT Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Bupati Kutai Kartanegara.
- Melakukan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1135/BPSPL.2/PL.750/IV/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Berkas Proposal Profil Organisasi dan Site Plan Permohonan Hibah Tanah BPSPL Pontianak Wilayah Kerja Pangkalan Bun kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan pada 20 s.d. 22 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2718/DJPKRL.1/TU.330/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Pembahasan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1505/BPSPL.2/KU.440/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 hal Penyampaian Usulan dan Data Dukung Penggunaan PNBP SDA 2024. Selanjutnya rekapitulasi disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.3078/DJPKRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Hasil Rapat Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan.
- Menyampaikan Permohonan Arahan terkait Usulan Revisi Anggaran di BPSPL Pontianak TA 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1880/BPSPL.2/HP.320/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PKRL.
- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PKRL dengan UAPPA-E1 Periode Semester 1 TA 2024 pada 10 s.d. 13 Juli 2024 di Yogyakarta.

- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi PNBPDJPKRLL s.d 31 Agustus 2024 pada 10 September 2024 pada tautan tautan https://bit.ly/Lap_Realisasi_PNBPDJPKRLL_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. 5348/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan Proyeksi PNBPDJPKRLL s.d 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. 5349/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.3973/DJPKRLL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PNBPDJPKRLL Non SDA Tahun 2025-2027 pada 13 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5413/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Revisi Penggunaan PNBPDJPKRLL Non SDA TA. 2025-2027 pada 30 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5736/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Revisi Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5700/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5700/DJPKRLL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Satker Pusat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal PKRL pada 7 Oktober 2024 secara daring berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5828/DJPKRLL.1/TU.330/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 29 Oktober 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.4380/SJ.2/TU.330/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 hal Undangan Peserta.
- Melakukan penyampaian Usulan Target PNBPDJPKRLL Tahun 2026 dan Perkiraan Target PNBPDJPKRLL Tahun 2027 – 2029 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4283/BPSPL.2/RSDM.120/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.1492/SJ/KU.510/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Bendahara dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Pedoman Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Perencanaan/penyusunan RKA sudah melibatkan pihak yang berkompeten baik secara aspek teknis, kinerja, dan keuangan. Hal tersebut didukung dengan keikutsertaan pegawai dari perwakilan Tim Kerja BPSPL Pontianak secara luring dan daring dalam penyusunan RKA. Selanjutnya hasil penyusunan RKA telah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal KKP.

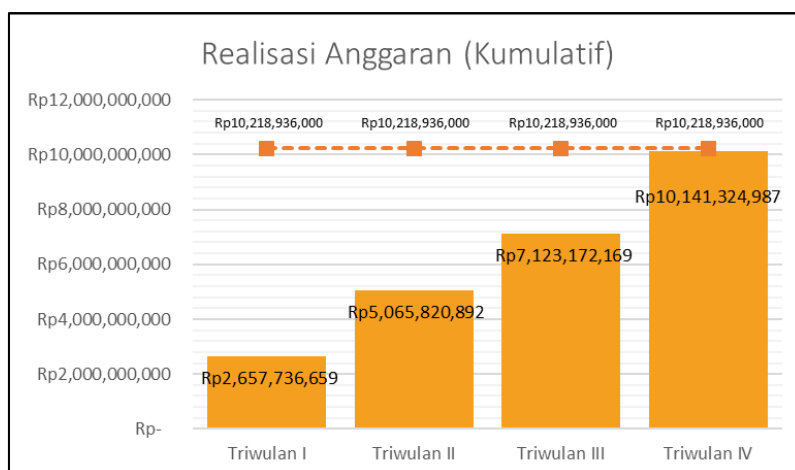
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp43.800.000	Rp43.774.984 (99,94%)	-
2.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp 55.565.000	Rp 55.565.000 (100,00%)	-
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.707.512.000	Rp 6.650.764.235 (99,15%)	-
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.704.534.000	Rp 2.704.029.684 (99,98%)	-
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp133.800.000	Rp 133.797.102 (100,00%)	-
TOTAL		Rp9.645.211.000	Rp9.587.931.005 (99,41%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp9.587.931.005 atau 99,41% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp9.645.211.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 1/BPSPL.2/KU.110/I/2024 tentang Struktur Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IKM 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sebagai perubahan dari IKU “Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak” mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 dan menindaklanjuti pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 8 Oktober 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
- Baik, apabila NKPA $> 80 - 90$;
- Cukup, apabila NKPA $> 60 - 80$;
- Kurang, apabila NKPA $> 50 - 60$;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

Capaian IKM 15 NKPA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	98,11	-	71	120	71	120	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan data pada aplikasi SMART DJA (monev.kemenkeu.go.id), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 98,11. Nilai ini didapatkan dari perhitungan efektivitas (capaian RO) sebesar 100; efisiensi penggunaan SBK sebesar 100 dan efisiensi SBK sebesar 87,4. Persentase realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 120%. Capaian NKPA BPSPL Pontianak disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.

NK Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
				Download Excel		
Tampilkan 30 entri				Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	98,11	100,00	100,00	87,40
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri				Sebelumnya 1 Selanjutnya		

Gambar 3.1.12-4. Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat capaian “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran”. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena tidak terdapat IKM tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tidak terdapat target mengenai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, sehingga capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 tidak dapat dibandingkan. Namun, terdapat target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 89 pada Renstra Ditjen PKRL tahun 2024. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sehingga capaian NKPA BPSPL Pontianak berkontribusi terhadap pencapaian NKA Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Terdapat target mengenai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 sebesar 71 pada tahun 2024. Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 sebesar 98,11 telah mencapai target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar lebih dari 120% jika dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya. Faktor penghambat capaian kinerja ini yaitu sinkronisasi dalam penentuan/perubahan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk mempercepat sinkronisasi data yang sudah diinput.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Desember 2024. 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

- Menghadiri kegiatan Finalisasi Penyesuaian Target dan Pagu Penggunaan PNBP TA 2025 pada 3 – 5 Januari 2024 di Mercure Hotel Cikini Jakarta.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.527/DJPKRL.1/TU/140/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP lingkup Ditjen PKRL melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.198/BPSPL.2/KU.440/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP di BPSPL Pontianak.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Nomor S-377/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Penyampaian Informasi Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.

- d. Menghadiri pembahasan penggunaan PNPB SDA 2024 pada 20 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.1056/DJPKRL.1/HK.410/III/2024.
- e. Menghadiri pembahasan Rencana Revisi Pencairan Blokir (RSPP) dan Percepatan Penarikan PHLN Lautra secara daring pada 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.1481/DJPKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Perubahan Waktu Rapat Koordinasi Revisi DIPA DJPKRL.
- f. Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNPB SDA Kelautan pada 20 s.d. 22 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2718/DJPKRL.1/TU.330/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
- g. Menyampaikan Permohonan Arahan terkait Usulan Revisi Anggaran di BPSPL Pontianak TA 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1880/BPSPL.2/HP.320/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PKRL.
- h. Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.3973/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- i. Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PNPB Non SDA Tahun 2025-2027 pada 13 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5413/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
- j. Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Penggunaan PNPB Non SDA TA. 2025-2027 pada 30 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5736/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
- k. Melakukan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal PKRL Nomor B.5413/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3321/BPSPL.2/KU.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Penggunaan PNPB BPSPL Pontianak Tahun 2025 – 2027.
- l. Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5700/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- m. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5840/DJPKRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Hasil Rapat Pembahasan Pagu Penggunaan PNPB Tahun 2025 – 2027.
- n. Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Usulan Target dan Pagu Penggunaan PNPB Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2026 pada tanggal 3 – 6 Desember 2024 sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor B.4849/SJ.2/KU.340/XII/2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perencanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 1/BPSPL.2/KU.110/I/2024 tentang Struktur Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan target kinerja IKU NKPA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
90,81	90,81	0	75	120	75	120	10	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

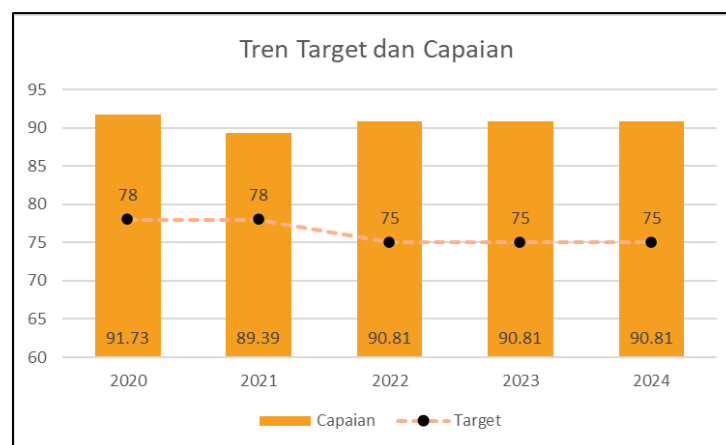
1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKM ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor 28 /DJPKRL.1/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan memorandum tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai

sebesar 90,81 yang didapatkan dari hasil pemantauan penilaian TPI KKP tahun 2022. Persen realisasi capaian IKM ini terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 120%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar 90,81. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan tidak ada penilaian WBK dari Kementerian PANRB untuk BPSPL Pontianak pada tahun 2023 dan 2024 sehingga capaian kinerja kedua tahun tersebut menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 90,81. Berdasarkan tren capaian nilai WBK BPSPL Pontianak selama 5 tahun terakhir, nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar 91,73. Sementara nilai terendah didapatkan pada tahun 2021 sebesar 89,93.



Gambar 3.1.12-5. Tren target dan capaian WBK BPSPL Pontianak

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perbedaan target antara yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL dengan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang didapatkan BPSPL Pontianak telah berkontribusi terhadap capaian target jangka menengah Ditjen PKRL sebesar 10%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 75 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebesar 90,81 telah berkontribusi sebesar lebih dari 120% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari - Desember 2024.
- b. Melaksanakan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Surveillance ISO 9001:2015 di BPSPL Pontianak pada tanggal 28 Februari hingga 13 Maret 2024. Hasil Surveillance ISO 9001:2015 ini berupa Sertifikat Nomor QAIC/ID/11114-A tanggal 13 Maret 2024.
- c. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1512/DJPKRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis.
- d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1513/DJPKRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Hasil Rekapitulasi SIPPN UPP Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
- e. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1515/DJPKRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
- f. Melaksanakan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja 2024 pada 13 Maret 2024 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.697/BPSPL.2/TU.330/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Undangan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja.
- g. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1543/DJPKRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 hal Permohonan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2024.
- h. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.989/BPSPL.2/OT.710/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Pegawai pada Hari Raya di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.
- i. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.990/BPSPL.2/OT.710/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Pengguna Jasa/Rekanan pada Hari Raya di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.
- j. Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 terhadap Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada 14 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2652/DJPKRL.1/TU.330/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
- k. Melakukan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2801/DJPKRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Permohonan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Lingkup Ditjen PKRL.
- l. Menghadiri Rapat Reviu Akhir Data Dukung PEKPPP Nasional dengan Lokus BPSPL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.2787/SJ.7/TU.330/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- m. Menghadiri Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL pada 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan undangan dari Sekretariat Ditjen PKRL Nomor B.4606/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- n. Menghadiri Rekonsiliasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 pada 14 dan 15 November 2024 sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.6411/DJPKRL.1/TU.330/XI/2024.

- o. Melakukan penetapan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4038/BPSPL.2/KP.440/XI/2024 tanggal 18 November 2024 hal Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.
- p. Melaksanakan Tindak Lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.6505/DJPRL.1/HP.430/XI/2024 tanggal 18 November 2024 hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada UPP Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
- q. Melaksanakan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Sertifikasi ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak pada tanggal 18 Februari hingga 6 Desember 2024. Hasil Sertifikasi ISO 37001:2016 ini berupa Sertifikat Nomor QAIC/ID/11114-A tanggal 5 Desember 2024.
- r. Melaksanakan Internalisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada tanggal 4 November dan 11 Desember 2024 di Kantor BPSPL Pontianak.

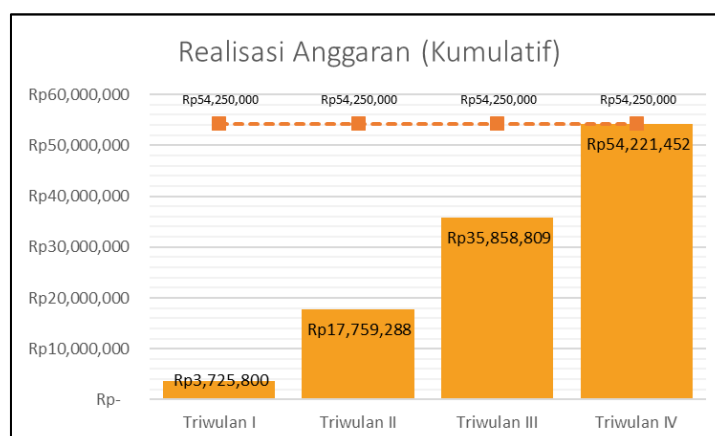
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2367.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp54.250.000	Rp54.221.452 (99,95%)	-
TOTAL		Rp54.250.000	Rp54.221.452 (99,95%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp54.221.452 atau 99,95% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp Rp54.250.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.



Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Sistem Manajemen Integrasi BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4038/BPSPL.2/KP.440/XI/2024 tanggal 18 November 2024 hal Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi pada tahun 2025 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas tahun 2024. Diharapkan pada tahun 2025 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi memiliki bobot 25%
- Kompetensi memiliki bobot 40%
- Kinerja memiliki bobot 30%
- Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan Indikator tersebut diambil langsung dari *dashboard* IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
90,84	93,65	+2,81	88	106,42	76	120	76	120

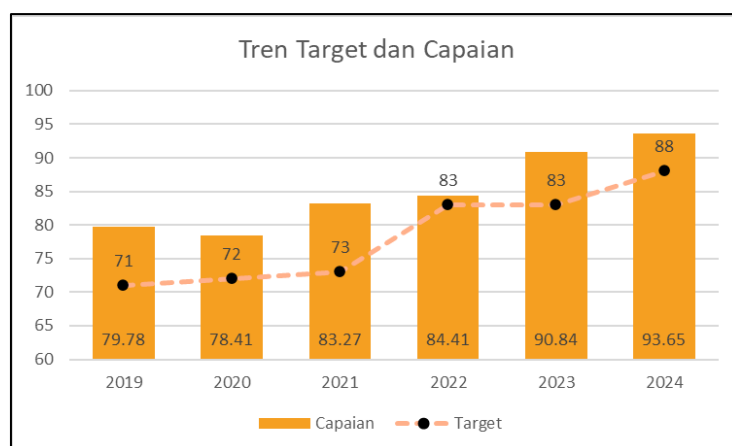
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Berdasarkan pemantauan Nilai IP ASN melalui situs ropeg.kkp.go.id per tanggal 31 Desember 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 93,65 dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini telah melebihi target pada perjanjian kinerja dengan persentase 106,22%. Capaian IKU ini disampaikan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor B.125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Periode pencapaian kinerja tahun 2023 dan 2024 dilakukan secara semesteran. Namun, capaian Nilai IP ASN pada tahun 2024 adalah 93,65 (106,22% dari target tahunan 88), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 90,84 (109,44% dari target tahunan 83). Sehingga progres Capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sejumlah 2,81 dibandingkan progres capaian tahun 2023 atau meningkat sebesar 3,09% jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Tren nilai IP ASN mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan nilai tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Nilai terendah didapatkan pada tahun 2020 sebesar 78,41. Peningkatan nilai IP ASN didukung oleh pencantuman gelar untuk pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Selain itu, pengumpulan sertifikat bimtek, pelatihan dan seminar menjadi nilai tambah untuk penilaian IP ASN.



Gambar 3.1.12-7. Tren Capaian IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap jangka menengah Ditjen PKRL sebesar 120% (93,65 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 120% (93,65 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Selain itu, telah adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu proses unggah di Aplikasi SIASN yang terkendala dalam system. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan memantau perkembangan capaian bimbingan teknis pada tiap pegawai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada Januari – Desember 2024
- b. Kegiatan pendukung terkait dengan kepegawaian lingkup BPSPL Pontianak pada Januari – Desember 2024, diantaranya adalah:
 - Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.101/DJPKRL.1/KP.720/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyelesaian Pengisian dan Penilaian SKP Triwulan IV dan Akhir Periode Tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL.
 - Menghadiri kegiatan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKRL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APJK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada 16 – 19 Januari 2024 di Surabaya berdasarkan Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.238/DJPKRL.1/TU.330/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKRL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APJK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - Melakukan tindak lanjut atas Permohonan Mutasi/Alih Tugas atas nama Rini Tajuddin, S.E. tanggal 11 Januari 2024 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak ke Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.157/BPSPL.2/KP.440/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 hal Mutasi/Alih Tugas.

- Melakukan tindak lanjut atas Surat DJPKRL Nomor B.206/DJPKRL.1/RC.330/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Data PPNNP terkait Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Melakukan penyampaian Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.675/DJPKRL.1/TU.210/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Penyampaian Jadwal Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi terkait Keuangan Negara di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembaharuan Fitur Aplikasi Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 1 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Tutorial Pengajuan PAK Integrasi Terbaru di e-Kinerja 2024.
- Menghadiri undangan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat Nomor UND-3/PWK.19/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Undangan Sosialisasi Beasiswa LPDP Tahun 2024 di Kalimantan Barat pada 29 Februari di Balai Diklat Keuangan Pontianak.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL B.1048 hal Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional PELP dan APJK.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1044 hal Usulan Kenaikan Pangkat Periode April 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.629/SJ.7/TU.210/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Pemberitahuan terkait Cuti Elektronik.
- Menghadiri Pengarahan PPPK Lingkup Ditjen PKRL pada 29 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengumuman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Statistisi.
- Melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai BPSPL Pontianak Tahun 2023.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1387/DJPKRL.1/KP.750/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan Periode Tahun 2023 lingkup DJPKRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1414/DJPKRL.1/KP.530/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Informasi Beasiswa Dukungan Pendidikan Gelar Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP Tahun 2024.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1511/DJPKRL.1/KP.520/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Lingkup DJPKRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1629/DJPKRL.1/KP.520/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Jalur Pendidikan.
- Mengikuti kegiatan Peningkatan Nilai IP ASN Lingkup Ditjen PKRL, Verifikasi SK Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024, serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi Lain pada 2 dan 3 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1929/DJPKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 28 Maret 2024

- Mengikuti kegiatan Implementasi Manajemen Talenta ASN Serta Penyusunan Soal Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dan Kenaikan Jenjang JF pada 29 April 2024 secara daring.
 - Melakukan tindak lanjut atas Permohonan Mutasi Alih Tugas melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1089/BPSPL.2/KP.440/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
 - Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.2043/DJPRL.1/TU.210/IV/2024 tanggal April 2024 hal Permohonan Pengisian Form Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.
 - Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.2217/DJPRL.1/KP.420/IV/2024 tanggal 19 April hal Penyampaian Hasil Kenaikan Pangkat Pegawai Periode April 2024 dan Usul Kenaikan Pangkat Periode Juni 2024. Adapun pegawai BPSPL Pontianak yang mendapatkan Kenaikan Pangkat yaitu a.n. Andrian Saputra, Hetty Priyanti Effendi, Hanizam, dan Hendrikus Luat Maring.
 - Melakukan Penyampaian Usulan Calon Peserta Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian dan Permohonan Tanda Tangan sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1260/BPSPL.2/KP.930/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
 - Mengikuti Coaching Clinic Manajemen ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional PELP dan APJK serta Pelaksanaan Layanan Kepegawaian pada 29 s.d. 31 Mei 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2966/DJPRL.1/TU.330/2024 tanggal 27 Mei 2024.
 - Menghadiri Kegiatan Asistensi Peremajaan Data Diklat/Kursus pada Aplikasi MyASN BKN secara daring pada 28 Juni 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.3665/DJPRL.1/TU.330/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
 - Menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko pada 19-20 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan nomor B.5474/DJPRL.1/TU.330/IX/2024
 - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4602/DJPRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
 - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang pada tanggal 22 Agustus 2024.
 - Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12 - 14 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor 4604/DJPRL/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
 - Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5353/DJPRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
 - Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum tanggal 22 - 26 Juli 2024.
 - Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.3042/SJ.7/KP.930/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
 - Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini turut mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.
- c. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Januari – Desember 2024 dan Monitoring Tahun 2024.

- d. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.
- e. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.
- f. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada Januari – Desember 2024.

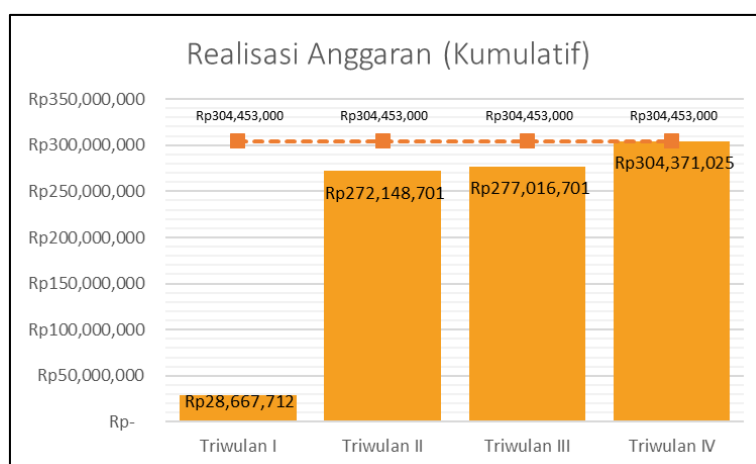
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp 304.453.000	Rp 304.371.025 (99,97%)	-
TOTAL		Rp 304.453.000	Rp 304.371.025 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 304.371.025 atau 99,97% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp304.453.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.



Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
	88,2	85,55	-2,65	81	105,62	80	106,9	83,75

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

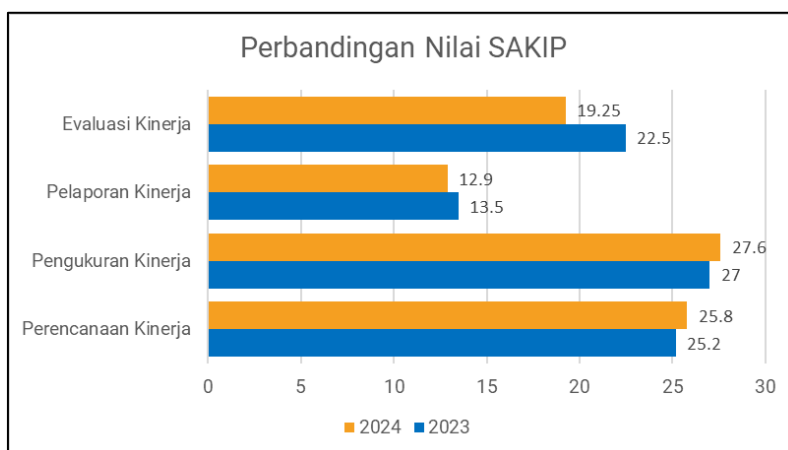
Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan rapat pleno Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 85,55 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target perjanjian kinerja dengan persentase capaian sebesar 105,61%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25.80
2	Pengukuran Kinerja	30	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15	12.90
4	Evaluasi Internal	25	19.25
Nilai Hasil Evaluasi		100	85.55
Predikat Penilaian			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Periode pencapaian IKU ini pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PM SAKIP pada tahun 2023 sebesar 88,2 sehingga terdapat penurunan nilai PM SAKIP sejumlah 2,65 atau menurun sebesar 3% jika dibandingkan dengan nilai PM SAKIP tahun 2024. Jika dibandingkan dengan nilai per komponen antara tahun 2023 dengan 2024, terdapat penurunan yang signifikan pada komponen Evaluasi Kinerja. Hal itu dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penurunan nilai kinerja anggaran dan persentase capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun begitu, terdapat peningkatan nilai pada komponen pengukuran dan perencanaan anggaran.



Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Komponen Nilai PM SAKIP Tahun 2023 dan 2024

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 83,75. Capaian tahun 2024 sebesar 85,55 telah berkontribusi terhadap target jangka menengah Ditjen PKRL 2020 – 2024 sebesar 102%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak sebesar 80. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan Matriks Kinerja & Pendanaan, capaian tahun 2024 sebesar 85,55 telah mencapai target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 106,9%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal itu didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya *achievable*. Laporan Kinerja BPSPL Pontianak telah memuat tabel perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain. Namun, belum memuat analisis lebih lanjut terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang lebih rendah. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karena berdasarkan hasil NKA pada BPSPL

Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2022 sebesar 6,62 sedangkan 2023 sebesar 1,15.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis *google form* untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Melakukan reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL dengan hasil Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 BPSPL Pontianak tanggal 7 Februari 2024.
- b. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.1356/DJKRL.1/HK.160/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.1356/DJKRL.1/HK.160/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- d. Menghadiri undangan Rapat Finalisasi Manual Indikator Kinerja Level 2 Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada 20 – 21 Maret 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.1631/DJKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- e. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d.4 April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1882/DJKRL.1/TU.330/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
- f. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024 Lingkup DJPKRL pada 18 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2120/DJKRL.1/TU.330/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, didapatkan hasil capaian kinerja 115 (Istimewa).
- g. Mengikuti kegiatan Forum Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.1214/SJ.1/RC.610/V/2024 tanggal 10 Mei 2024.
- h. Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 9/BPSPL.2/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
- i. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2953/DJKRL.1/RC.610/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115 (Istimewa) dan NKO Verifikasi sebesar 115 (Istimewa).
- j. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan DJPKRL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di Kab. Sleman sesuai

- dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL Nomor B.3440/DJPKRL.1/RC.610/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai PM SAKIP sementara sebesar 81,75. Nilai ini telah mencapai target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, namun masih menurun dibandingkan nilai tahun lalu. Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen tambahan dalam rangka menambah nilai SAKIP hingga ditetapkan pada saat pleno.
- k. Mengikuti kegiatan Verifikasi Pelaporan e-Monev Bappenas dan SMART DJA pada tanggal 1 - 5 Juli 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase kemanfaatan hingga bulan Juni 2024 telah mencapai 46%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Persentase serapan anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 45,33% sementara persentase pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 50,28%.
 - l. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk IKU dan IKM BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 105,24% dengan kategori hijau (Baik). Capaian kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 116%.
 - m. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4003/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
 - n. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.2490/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.
 - o. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4602/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
 - p. Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,94 dengan predikat baik sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4946/DJPKRL.1/RC.610/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
 - q. Menghadiri pleno Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 85,55 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.
 - r. Menghadiri Undangan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Triwulan III dan Pemantauan Kegiatan DJPKRL secara daring pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5837/DJPKRL.1/TU.330/X/2024.
 - s. Menghadiri Undangan Pembahasan Perubahan Perjanjian Kinerja Satker lingkup DJPKRL Tahun 2024 secara daring pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5881/DJPKRL.1/TU.330/X/2024.
 - t. Menghadiri Undangan Verifikasi Laporan Online melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 9 - 13 Oktober 2024 secara daring sesuai dengan surat undangan Sekretaris Ditjen

PKRL nomor B.5868/DJPKRL.1/TU.330/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase kemanfaatan hingga bulan September 2024 telah mencapai 59%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Sementara itu, hasil verifikasi capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan III mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,5% dengan predikat Baik.

- u. Menghadiri Undangan Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 secara daring pada tanggal 15 – 19 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5888/DJPKRL.1/TU.330/X/2024.
- v. Menghadiri Undangan Pemantauan Kegiatan Prioritas dan Kinerja DJPKRL sampai dengan Bulan November Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 secara daring sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6707/DJPKRL.1/TU.330/XII/2024.
- w. Menghadiri Undangan Pemabahasan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6829/DJPKRL.1/TU.330/XII/2024.
- x. Menghadiri Undangan Finalisasi Rencana Strategis Ditjen PKRL tahun 2025 – 2029 pada tanggal 17 – 19 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6830/DJPKRL.1/TU.330/XII/2024.



Gambar 3.1.12-10. Kegiatan pleno Evaluasi AKIP

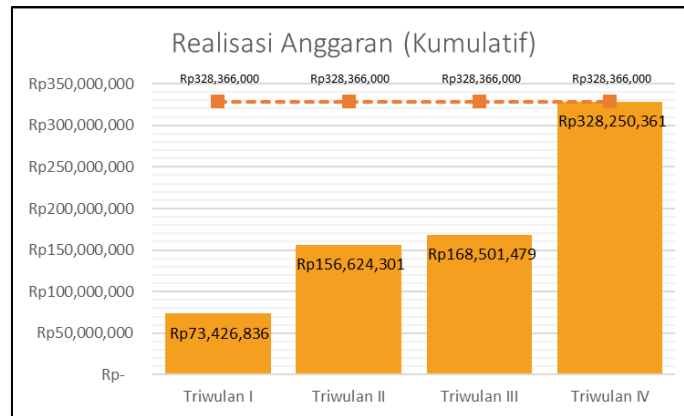
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-11. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 94.066.000	Rp 94.032.591 (99,96%)	-
2.	2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 100.500.000	Rp 100.420.668 (99,92%)	-
TOTAL		Rp194.566.000	Rp194.453.259 (99,94%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp194.453.259 atau 99,94% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp194.566.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-11. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.178/BPSPL.2/RC.610/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi pada tahun 2025 yaitu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV atau Tahunan 2024. Perlu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Selain itu dalam rangka pengelolaan kinerja tahun 2025, perlu melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Rencana Kerja.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.12-12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
4	4	4	0	4	100	4	100	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tercapai 4 (empat) dokumen (100%) dari target 4 (empat) dokumen. Capaian IKM 19 berdasarkan:

- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.
- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 adalah sama meliputi 4 (empat) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKRL sebesar 3. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena berbeda satuan dan cara perhitungan. Namun, capaian kinerja pada Tahun 2024 telah berkontribusi untuk nilai maturitas SPIP Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen SPIP yang disampaikan pada tahun 2024. Capaian kinerja pada Tahun 2024 dengan jumlah 4 (empat) dokumen telah berkontribusi 100% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Tahun 2024 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (minggu pertama setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu pada tanggal 10 Januari 2025 (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 1 Januari 2025). Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu diantaranya pemenuhan dokumen pendukung Laporan SPIP MR yang masih belum optimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4152/DJPKRL.1/HP.660/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (*Three Lines Models*).
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4297/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4298/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.
- Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan IV Tahun 2023 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.2/TU.140/I/2024 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan IV Tahun 2023.
- Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1123/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
- Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan II Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.
- Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan III Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM 19 Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 6.348.000 atau 99,59% dari Pagu Revisi anggaran Rp15.388.000.

Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp 6.348.000	Rp6,321,866 (99,59%)	-
TOTAL		Rp 6.348.000	Rp6,321,866 (99,59%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara

partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.674/BPSPL.2/KP.440/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2024.

10.Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025, penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, serta melakukan penyusunan manajemen risiko untuk kegiatan tahun 2025.

IKM 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office* KKP pada laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5.
- Konten berupa infografis dengan poin 1.
- Konten video/*campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:

- Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II
- SesDitjen PKRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Target TW IV	Realisasi TW IV	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
	94	133,33	0	94	120	90	120	90	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

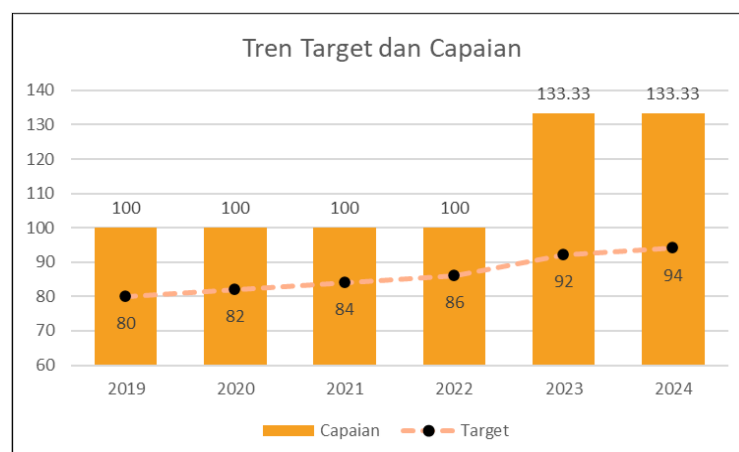
Pada Triwulan IV Tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 120% dengan persentase capaian 133,33% dari target nilai 94. Sehingga target pada Matriks Kinerja & Pendanaan maupun Renstra DJPKRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Capaian IKM 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.

4. BPSPL Pontianak	
BPSPL Pontianak	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4.0
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	116.67%
Nilai MP TW II	116.67%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	122.22%

Gambar 3.1.12-12. Nilai MP BPSPL Pontianak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu 133,33 sedangkan capaian tahun 2023 yaitu 133. Artinya tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian manajemen pengetahuan terstandar pada tahun 2023 dan 2024. Jika dibandingkan dengan tren 5 tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2023 cenderung meningkat. Hal itu karena terdapat perbedaan metode perhitungan dan teknologi informasi yang digunakan.



Gambar 3.1.12-13. Tren Target dan Capaian Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target rencana jangka menengah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2024 sebesar 133,33% (120% dari target triwulanan 94). Hal itu didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai dan pejabat aktif lingkup BPSPL Pontianak dan memenuhi target keaktifan minimal 3 poin.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pekegiatan pendukung dilakukan secara daring. Selain itu, pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pegawai dan pejabat BPSPL Pontianak pada grup *whatsapp* membantu mempercepat pengisian kegiatan pada aplikasi portal.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP. Dokumentasi kegiatan rapat/seminar yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta narasi 5W1H.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan penerapan system manajemen pengetahuan terstandar. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.204/BPSPL.2/KP.440/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2024.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Perlu keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal *Collaboration Office* KKP pada tahun 2025.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Tahun 2024 Tahun 2023 s.d. Triwulan IV/ Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerja sebesar 120%.

Tabel 3.1.12-15. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	80	120	80	120	80	120

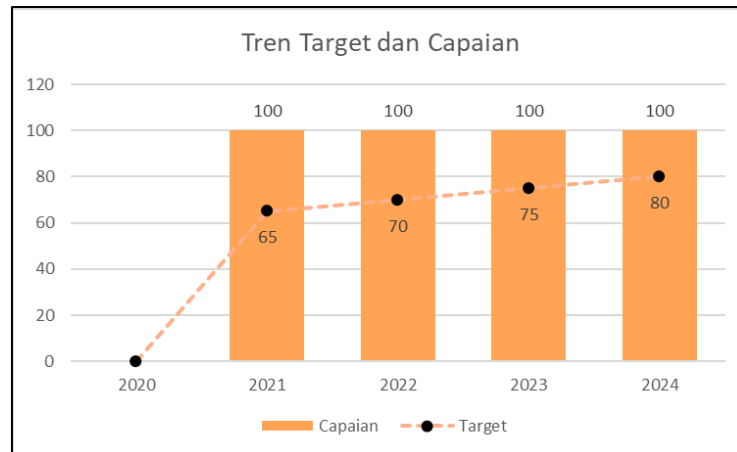
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Pada Tahun 2024, IKM 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (120%) dari target 80. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.94/DJPKRL.1/HP.470/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL" Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PKRL 9 Januari 2025). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (120% dari target triwulanan 75). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.



Gambar 3.1.12-14. Tren Target dan Capaian IKU

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya. Salah satu faktor penghambat yaitu update tindak lanjut LHE Itjen yang belum diubah statusnya aplikasi SIDAK. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Inspektorat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Untuk periode tahun 2024 (Januari – Desember) terdapat beberapa rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya:

- a. Audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 20 – 29 Januari 2024. Laporan hasil audit kinerja disampaikan melalui Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor T.133/ITJ.3/HP.110/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 hal Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.
- b. Evaluasi PNBPTA 2023 – 2024 pada tanggal 24 – 29 Juni 2024. Hasil evaluasi PNBPTA disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 126/ITJ.1/HP.410/VII/2024 tanggal 2 Juli hal Laporan Hasil Evaluasi PNBPTA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.

Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan diunggah pada SIDAK sebagai berikut.

- a. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 2990.31.03/ITJ/PL.420/III/2024 tanggal 31 Maret 2024
- b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. B.1925/BPSPL.2/KU.340/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBPTA Semester 1 Tahun 2024.
- c. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. B.2382/BPSPL.2/PRL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Koordinasi Hasil Rekomendasi kepada Direktur KEBP.
- d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 14/BPSPL.2/HP.410/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi kpd Ketua Tim Kerja dan Bendahara Penerimaan.
- e. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 13/BPSPL.2/PRL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024.
- f. Penyampaian BAP Stok No. B.2237/BPSPL.2/KP.510/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024.

Selanjutnya BPSPL Pontianak menghadiri Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada DJPKRL Periode Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5628/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	100	100	100	100	≤1	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup BPSPL Pontianak, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor 166/DJPKRL.1/HP.520/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas KKP tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (100% dari target tahunan 100), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (100% dari target tahunan 100). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan satuan dan metode perhitungan. Namun capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap capaian Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada tahun 2024 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKM ini.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada tahun 2024 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada tahun 2024 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2025.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

- Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan

No	Predikat	Nilai	Interpetasi
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKM 23 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	80	120	72,5	120	-	-

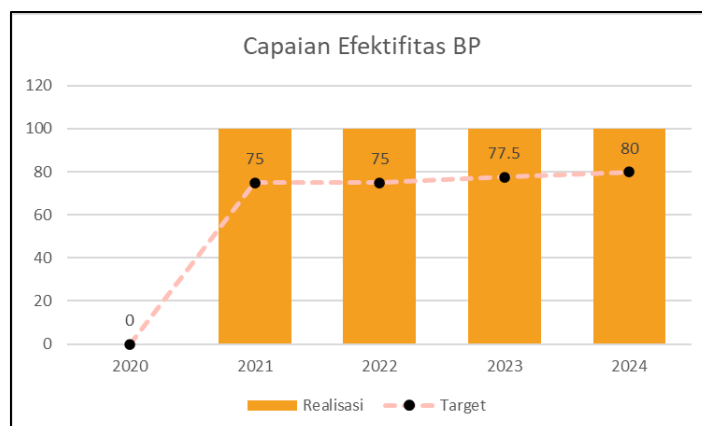
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKM ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan ini disampaikan melalui surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023. BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang diserahkan pada tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian kinerja IKM ini pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 100 sehingga perbandingan capaian tahun 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Berdasarkan tren capaian dalam 5 tahun terakhir, capaian IKM ini juga tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan meskipun terdapat peningkatan target secara berkala.



Gambar 3.1.12-15. Tren Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKM tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 72,9% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar lebih dari 120%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung diantaranya adalah pemanfaatan bantuan telah memenuhi aspek yang dievaluasi meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

a. Monitoring Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah dilakukan dalam rangka pemantauan berkala terhadap kondisi dan manfaat barang bantuan yang telah diberikan oleh BPSPL Pontianak sesuai dengan Kepdirjen PKRL nomor 71 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring yaitu observasi langsung, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Pada tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melakukan monitoring bantuan konservasi kepada seluruh penerima bantuan tahun 2023 yaitu sebanyak 3 (tiga) kelompok.

➤ *Pokmaswas Pesut Lestari*

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pesut Lestari dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 berlokasi di Desa Pela, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan kelompok ini yaitu Perlindungan kawasan konservasi perairan nasional dan pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi (Pesut) serta ikan ekonomis di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu. Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp95.649.188 berupa teropong, papan informasi dan peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan kelompok. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi terkini barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat sehingga kegiatan pemantauan aktivitas penangkapan ikan lebih optimal.



Gambar 3.1.12-16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Pesut Lestari

➤ *Pokmaswas Penyu Baro*

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Penyu Baro dilakukan pada tanggal 10 September 2024 berlokasi di Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu Perlindungan kawasan konservasi dan pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi (Penyu). Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp99.595.500 berupa sarana pendukung kegiatan seperti GPS, Handy Talkie, Radio Rig dan lainnya. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi terkini barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat dalam pemantauan penyu.



Gambar 3.1.12-17. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Penyu Baro

➤ *Perkumpulan Peduli Mangrove Surya Peradna Mandiri*

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Perkumpulan Peduli Mangrove Surya Mandiri dilakukan pada tanggal 11 September 2024 berlokasi di Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu perlindungan Kawasan dan pelestarian mangrove. Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp99.113.750 berupa perahu fiber dan peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi terkini

barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat dalam menunjang kegiatan pemantauan pesisir.



Gambar 3.1.12-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Surya Perdana Mangrove

b. Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Kegiatan evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen PKRL pada tanggal 9 – 13 Oktober 2024 secara daring melalui *zoom meeting*. Berdasarkan hasil penilaian pada kertas kerja evaluasi efektivitas bantuan pemerintah TA 2023, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang diserahkan pada tahun 2023 sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023.

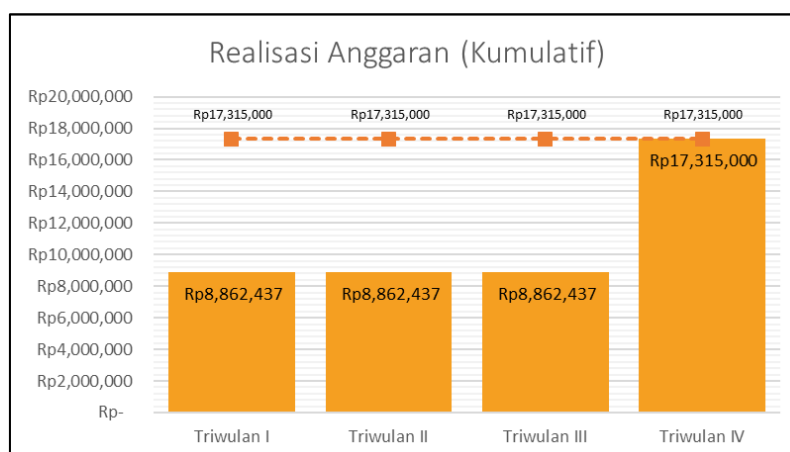
8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 23 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2362.QEH.001.052] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp17.315.000	Rp17.315.000 (100%)	-
TOTAL		Rp17.315.000	Rp17.315.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17.315.000 atau 100% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp17.315.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.



Gambar 3.1.12-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintahdi lingkup BPSPL Pontianak tahun 2024.

10.Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024, dan belum ada IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan IKU ini dilakukan untuk mengakomodir penilaian kearsipan lingkup KKP yang dilaksanakan setiap tahun.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.12-21. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak

SK-12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2025	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	81,35	-	65	120	65	120	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada untuk IKM ini dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja IKM ini disampaikan melalui Nota Plt Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa nomor 2457/SJ.6/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai pengawasan internal kearsipan sebesar 81,35 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 3.1.12-22. Tabel nilai pengawasan kearsipan

NO.	UNIT PENGOLAH	ASPEK						NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	RANK DI UP KKP
		Penciptaan (25)	Penggunaan (25)	Pemeliharaan (25)	Penyusutan (25)	SDM (50)	SARPRAS (50)					
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22,59	25,00	25,00	23,96	16,37	50,00	48,27	33,19	81,46	A (MEMUASKAN)	95
2	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	25,00	25,00	25,00	25,00	17,57	50,00	50,00	33,78	83,78	A (MEMUASKAN)	69
3	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak	22,60	25,00	25,00	23,96	16,17	50,00	48,28	33,08	81,36	A (MEMUASKAN)	96
4	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	23,44	25,00	23,81	23,96	19,64	45,24	48,10	32,44	80,54	A (MEMUASKAN)	106

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 sebesar 65. Capaian tahun 2024 telah mencapai target sebesar lebih dari 120% jika dibandingkan dengan Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan pada pencapaian Iku ini yaitu mengikuti kegiatan penilaian pengawasan internal kearsipan secara daring sehingga dapat mengurangi pemakaian sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1416/DJPKRL.1/HK.410/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Persuratan dan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL
- Rapat terkait Rencana Aksi Penyelamatan Arsip Kemaritiman secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2903/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Alih Media Arsip secara daring pada 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.3119/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan Bimbingan Teknis Alih Media Arsip.
- Menghadiri Undangan Kegiatan Pemusnahan Arsip PPN Pemangkat pada tanggal 16 Desember 2024 sesuai surat undangan nomor B.2369/PPN.PMK/TU.330/XII/2024.
- Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4185/SJ.6/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 s.d. 5 Juli 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.2942/SJ.8/TU.330/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4185/SJ.6/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5353/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 23.098.452 atau 67,30% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp 34.320.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 34.048.000	Rp 34.011.192 (99,89%)	-
TOTAL		Rp 34.048.000	Rp 34.011.192 (99,89%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat dikarenakan partisipasi pegawai dalam kegiatan ini masih didominasi perempuan seluruhnya.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

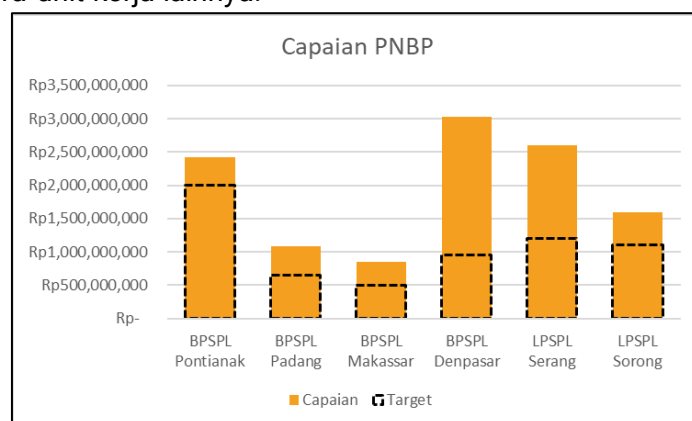
Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan IV.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki Indikator Kinerja yang serupa sebanyak 22 indikator dari 24 indikator kinerja di BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan BPSPL Pontianak mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan yang umumnya tidak dikelola oleh unit kerja PSPL lainnya. Perbandingan capaian kinerja tiap indikator kinerja yang sama dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai PNBP (Rp000)

Berdasarkan perbandingan, nilai PNBP yang diterima oleh BPSPL Pontianak pada tahun 2024 berada di urutan ketiga di bawah BPSPL Denpasar dan LPSPL Serang. Capaian nilai PNBP BPSPL Pontianak lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPSPL Padang, BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Namun, jika dibandingkan persentase capaian dengan target penerimaan PNBP, BPSPL Pontianak berada di urutan ke lima dari enam unit kerja. Hal itu dikarenakan target penerimaan PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.



Gambar 3.1.12-1. Perbandingan Penerimaan PNBP dengan Unit Kerja Lain

2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Orang)

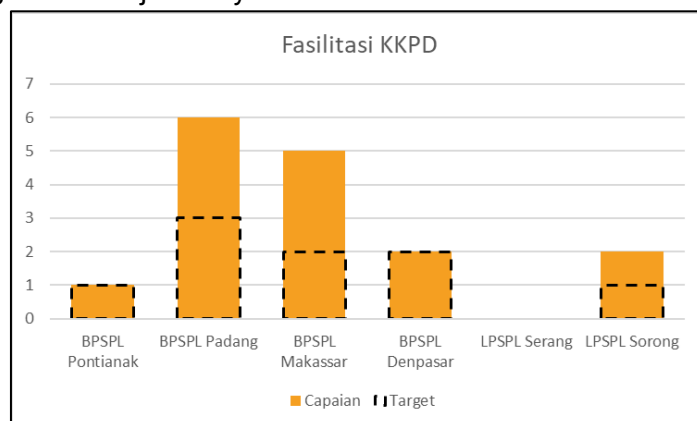
Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk tenaga kerja yang terlibat dalam Gernas BCL sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 320 orang dari 320 orang. Hanya BPSPL Padang yang memiliki capaian melebihi target, yaitu 323 orang dari 320 orang. Sementara itu, BPSPL Denpasar memiliki target dan capaian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan unit lain yaitu 160 orang dari 160 orang.

3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun (Dokumen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 3 dokumen dari 3 dokumen.

4. Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi (Daerah)

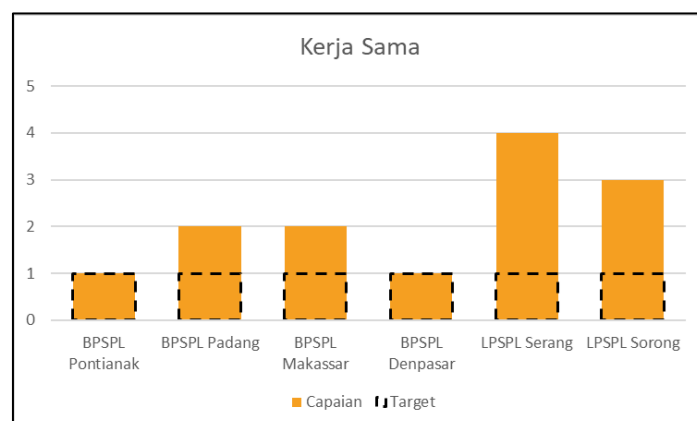
Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak untuk Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya.



Gambar 3.1.12-2. Perbandingan Capaian Fasilitasi KKPD dengan Unit Kerja Lain

5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi (Kesepakatan)

Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak bersama dengan BPSPL Denpasar untuk Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal itu dikarenakan pada sasaran kinerja kerjasama/kemitraan hanya BPSPL Pontianak yang memiliki dua indikator kinerja yaitu kerja sama dan kemitraan sehingga capaian keduanya hanya bisa dihitung sebanyak 100%.



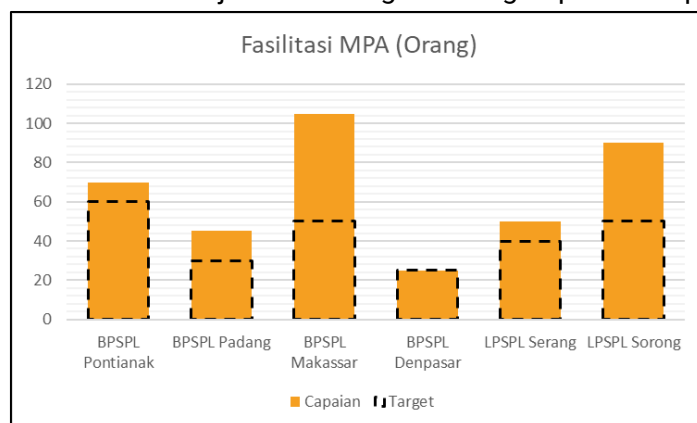
Gambar 3.1.12-3. Perbandingan Capaian Kesepakatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Lain

6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kelompok)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian BPSPL Pontianak untuk bantuan KOMPAK sama dengan unit kerja lainnya. Terdapat penurunan target dan capaian menjadi 2 kelompok jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal itu dikarenakan terdapat penurunan anggaran yang signifikan untuk Bantuan KOMPAK di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

7. Masyarakat di Kawasan Konservasi yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencapaian Alternatif (Masyarakat)

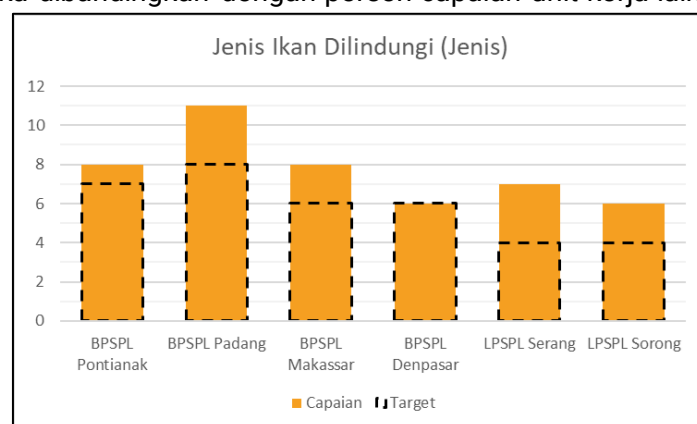
Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah orang pada Fasilitas Pengembangan Mata Pencapaian Alternatif berada di urutan ketiga di bawah BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Jumlah orang yang difasilitasi pengembangan mata pencapaian alternatif di BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, BPSPL Padang dan LPSPL Serang. Namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPSPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.



Gambar 3.1.12-4. Perbandingan Capaian Fasilitas MPA dengan Unit Kerja Lain

8. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian (Jenis)

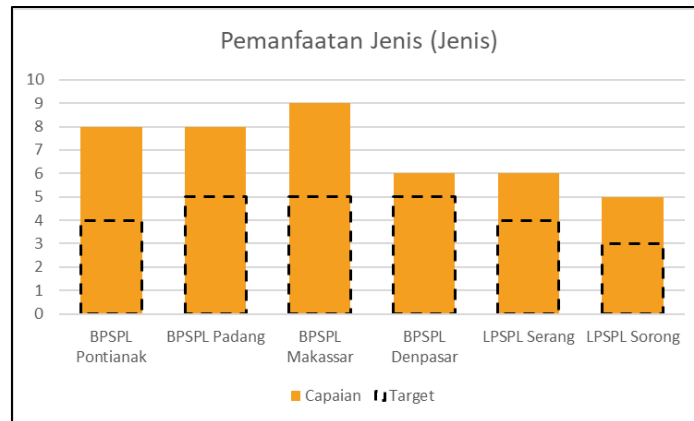
Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian berada di atas nilai tengah median. Jumlah jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian di BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, LPSPL Sorong dan LPSPL Serang. Namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPSPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.



Gambar 3.1.12-5. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain

9. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)

Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan terancam punah yang dimanfaatkan sama dengan BPSPL Padang dan lebih tinggi dari BPSPL Denpasar, LPSPL Serang dan LPSPL Sorong. Hanya BPSPL Makassar yang memiliki capaian lebih tinggi dari BPSPL Pontianak. Jika dibandingkan dengan target, persentase capaian BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.



Gambar 3.1.12-6. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain

10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi (Dokumen)

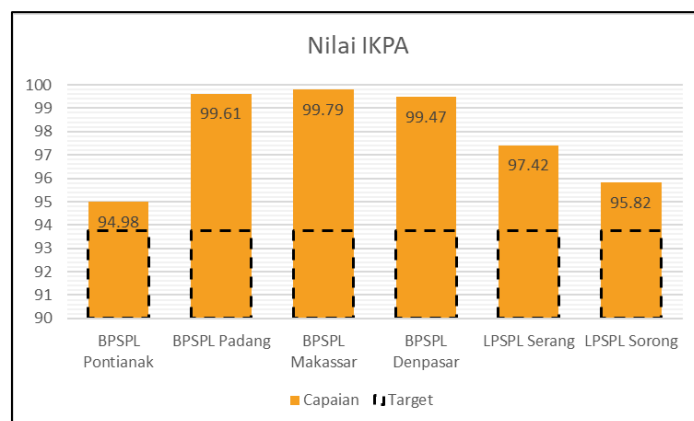
Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk identifikasi pemanfaatan air laut selain energi sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 1 dokumen dari 1 dokumen.

11. Kawasan P3K yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian BPSPL Pontianak kawasan yang dilakukan penanggulangan pencemaran dengan unit kerja lainnya, yaitu 100%. Hanya LPSPL Serang yang memiliki target dan capaian yang lebih rendah yaitu 2 kawasan dari 2 kawasan.

12. Nilai IKPA

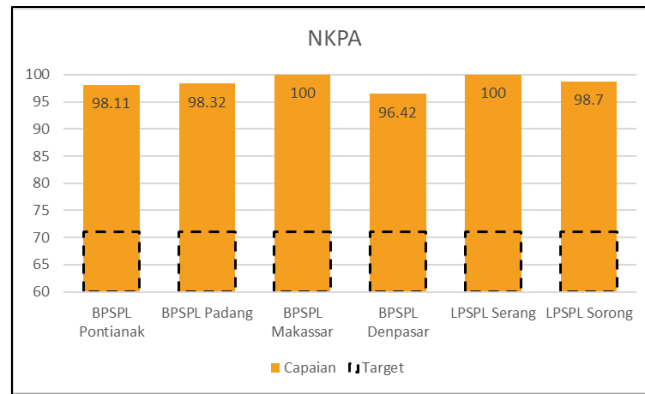
Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai IKPA BPSPL Pontianak merupakan yang paling rendah. Nilai IKPA paling tinggi dicapai oleh BPSPL Makassar dengan nilai 99,79.



Gambar 3.1.12-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)

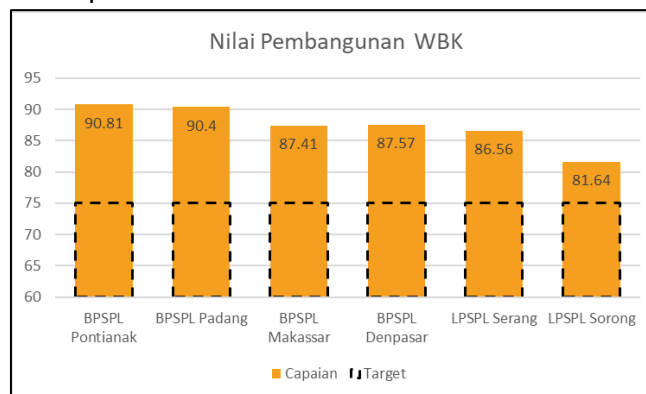
Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar. Namun, jika dibandingkan dengan unit kerja lain, nilai kinerja perencanaan anggaran BPSPL Pontianak masih lebih rendah.



Gambar 3.1.12-8. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)

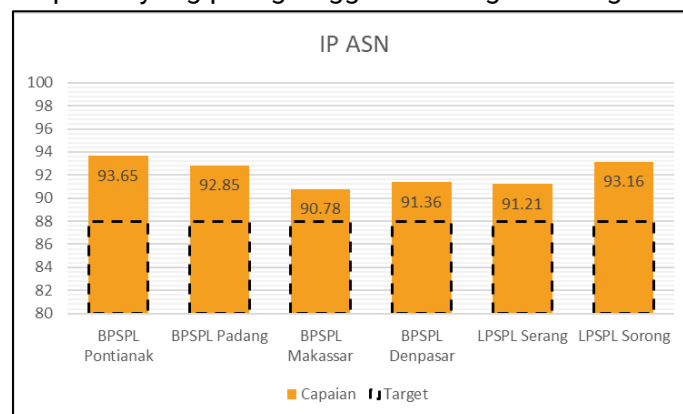
Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai evaluasi pembangunan Zona Integritas BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi. Hal itu dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat penilaian WBK sehingga nilai yang digunakan oleh BPSPL Pontianak merupakan nilai pada tahun 2022.



Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Capaian NKPA dengan Unit Kerja Lain

15. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

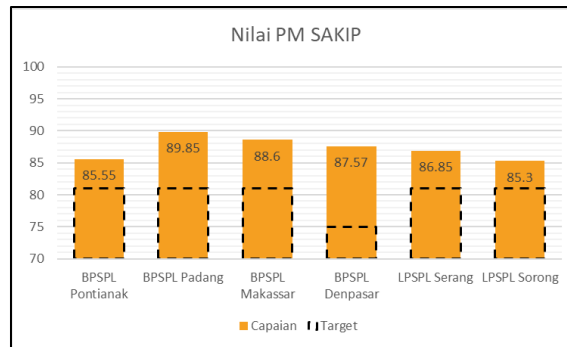
Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai indeks profesionalitas ASN BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan unit kerja lain.



Gambar 3.1.12-10. Perbandingan Capaian IP ASN dengan Unit Kerja Lain

16. Nilai PM SAKIP (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPSPL Sorong. Namun capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan unit kerja lainnya.



Gambar 3.1.12-11. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP dengan Unit Kerja Lain

17. Laporan SPIP yang disusun (Laporan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian laporan SPIP yang disusun oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 100% atau 4 laporan dari target 4 laporan.

18. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dan Disampaikan (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 120% atau sebesar 100% dari target 80%.

19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 100%.

20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Persen)

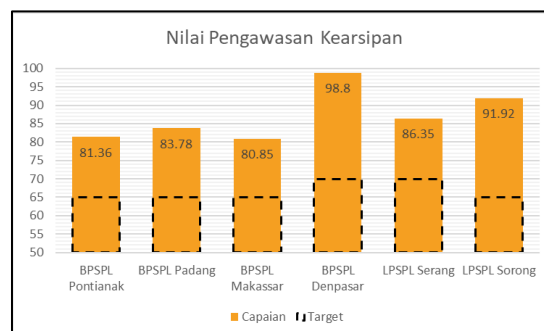
Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 120% atau sebesar 100% dari target 80%. Hanya BPSPL Denpasar yang mendapatkan nilai 97,50% dari target 80%.

21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian laporan SPIP yang disusun oleh BPSPL, yaitu lebih dari 120% atau sebesar 133,33% dari target 94%.

22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan (Nilai)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan yang didapatkan oleh BPSPL Pontianak sedikit lebih besar dari BPSPL Makassar. Namun nilai pengawasan internal kearsipan BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya.



Gambar 3.1.12-12. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan

Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai PNPB BPSPL Pontianak	2,00 M	2,42 M	0,65 M	1,09 M	0,5 M	0,85 M	0,95 M	3,03 M	1,2 M	2,6 M	1,1 M	1,6 M
2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	320	320	320	323	320	320	160	160	320	320	320	320
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	14	16,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1	1	3	6	2	5	2	2	-	-	1	2
6	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1	1	1	2	1	2	1	1	1	4	1	3
7	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru	60	70	30	45	50	105	25	25	40	50	50	90
10	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL pontianak	7	8	8	11	6	8	6	6	4	7	4	6

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
11	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	4	8	5	8	5	9	5	6	4	6	3	5
12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak	93,76	94,98	93,76	99,61	93,76	99,79	93,76	99,47	93,76	97,42	93,76	95,82
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak	71	98,11	71	98,32	71	100	71	96,42	71	100	71	98,70
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak	75	90,81	75	90,40	75	87,41	75	87,57	75	86,56	75	81,64
17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak	88	93,65	88	92,85	88	90,78	88	91,36	88	91,21	88	93,16
18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak	81	85,55	81	89,85	81	88,6	75	87,57	81	86,85	81	85,30
19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	133,33	94	133,33	94	133,33	94	133,33	94	133,33	94	133,33
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100
22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak	80	100	80	100	80	100	80	97,50	80	100	80	100
24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak	65	81,36	65	83,78	65	80,85	70	98,80	70	86,35	65	91,92

3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 032.07.2.477425/2024 dengan Pagu Revisi anggaran sebesar **Rp19.008.625,000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/> . Pada Tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **18.739.996.019** atau **98,59%** dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23.1.12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	5.876.306.000	5.719.742.814	97,34	-
2.	(2363) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	99.981.632	99,98	-
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1.120.000.000	1.148.581.822	99,88	-
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	11.082.319.000	10.971.907.495	99,00	-
5.	(4346) Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800.000.000	799.782.256	99,97	-
Total			19.008.625.000	18.739.996.019	98,59	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 30 September 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.122-3.1.12-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Tahun 2024	6.707.512.000	6.629.118.081	98,83
5.	(52) Barang	Tahun 2024	11.435.981.000	11.246.647.116	98,34
9.	(53) Modal	Tahun 2024	865.132.000	864.230.822	99,90

(*) Blokir Anggaran

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 31 Desember 2024)

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan September/Tahun 2024) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 99,83%, untuk belanja barang sebesar 98,34% dan untuk belanja modal 99,90%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp6.629.118.081 (85,02%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2024 sebesar Rp11.246.647.116 atau 98,34% dari Pagu Revisi anggaran Rp11.435.981.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp864.230.822 (99,90%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.26/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024
 - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 3 Unit Xpander selama 1 Tahun sesuai SP.27/BPSPL.2/PPK/SP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.

- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 1 Unit Fortuner selama 1 Tahun sesuai SP.28/BPSPL.2/PPK/SP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Putussibau sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Mahakam Hulu sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.35/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.37/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Komunikasi Pelayanan sebanyak 1 Unit sesuai SP.39/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- Belanja Keperluan Perkantoran - Pengadaan Seragam Pegawai BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 95 Stel sesuai SPK.40/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kapal dan Longboat sebanyak 2 Paket sesuai SPK.42/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.45/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya - Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.46/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Padaidi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai SP.51/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 54/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tanaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58-B/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KIOSK sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebanyak 1 Paket sesuai SP.59/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket sesuai SPK.61/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **13 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu **107,50%** (kategori Hijau = Baik). Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Pada tahun 2024 sebesar **Rp18.739.996.019** atau **98,89%** dari Pagu Revisi anggaran sebesar **Rp19.008.625,000**. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja telah terapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian unit kerja lain, masih banyak capaian kinerja BPSPL Pontianak yang lebih rendah. Capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak. Untuk itu, ke depannya perlu melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dan upaya pemecahan masalah pada saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga perlu mengidentifikasi Sasaran Kinerja pada tahun 2025 yang dapat meningkatkan Nilai Kinerja Organisasi secara signifikan sehingga kegiatan pendukung untuk Sasaran Kinerja tersebut dapat diprioritaskan

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan pembahasan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari rekomendasi laporan kinerja periode sebelumnya sebagai upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1.12-1. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2023			
1	Melakukan koordinasi secara aktif terkait dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut.	Telah melakukan koordinasi secara aktif ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada tanggal berikut ini: 1. 18 – 20 Januari 2024, Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. 4 – 7 Februari 2024, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KKPRL UPT Lingkup Ditjen PKRL	https://bit.ly/TLLKJPNK2024
Triwulan I Tahun 2024			
2	Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka membuka	Telah mengusahakan untuk buka blokir anggaran pada REA.003. Anggaran sudah	https://bit.ly/TLLKJPNK2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
	anggaran yang diblokir	dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi SCC.001.	
3	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat	https://bit.ly/TLLKJPNK2024
Triwulan II Tahun 2024			
4	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring.	https://bit.ly/TLLKJPNK2024
5	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan oleh KKP	https://bit.ly/TLLKJPNK2024
Triwulan III Tahun 2024			
6	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring.	https://bit.ly/TLLKJPNK2024
7	Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang	Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang)	https://bit.ly/TLLKJPNK2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
	difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 60 (Orang)		

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman <https://bit.ly/DadukLKJPNK2024>. Lampiran ini mencakup:

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024.
2. Penghargaan yang diterima oleh BPSPL Pontianak Pada tahun 2024:
 - Satker Dengan Realisasi Anggaran Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Pusat dan UPT pada tanggal 16 Januari 2024
 - Unit Kerja Berpredikat “Informatif” dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun 2024 tanggal 25 Juli 2024
 - 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tanggal 8 Oktober 2024
 - Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 5 Desember 2024
 - Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik III di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024
3. Matriks Kinerja Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024
4. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Sekretariat Ditjen PKRL nomor 83/DJPKRL.1/TU.220/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian PNBP Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
5. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
6. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 26/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
7. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 4/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
8. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 5/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
9. Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07/DJPKRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024 tentang

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Perjanjian Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/V/2025 dan Nomor B583/UN17.6/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 26/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok).
12. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang).
13. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 6/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 Penyampaian Capaian Kinerja IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
14. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 2/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Laporan Kegiatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan.
15. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
16. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
17. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024.
18. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024.
19. Memorandum Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Sekretariat Ditjen PKRL nomor 28 /DJPKRL.1/TU.210/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

20. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PKRL.
21. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 tanggal 27 September 2024 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.
22. Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan IV tahun 2023 dan Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan I - III tahun 2024
23. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.
24. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2024.
25. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B. 166/DJPKRL.1/HP.520/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tahun 2023.
26. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023.
27. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP nomor 2457/SJ.6/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKRL tahun 2024.